

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018

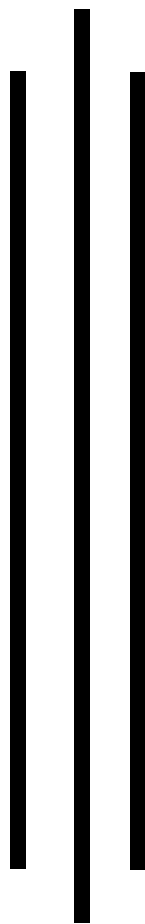


**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2017**



RANCANGAN AWAL

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA
2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-8
1.5. Maksud dan Tujuan	I-11
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Seluma	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Aspek Geografi.....	II-1
2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1.2 Wilayah Administrasi	II-4
2.1.1.1.3 Kecamatan Air Periukan	II-4
2.1.1.1.4 Kecamatan Sukaraja	II-5
2.1.1.1.5 Kecamatan Lubuk Sandi.....	II-5
2.1.1.1.6 Kecamatan Seluma Barat.....	II-5
2.1.1.1.7 Kecamatan Seluma	II-6
2.1.1.1.8 Kecamatan Seluma Timur	II-6
2.1.1.1.9 Kecamatan Seluma Selatan	II-6
2.1.1.1.10. Kecamatan Seluma Utara.....	II-7
2.1.1.1.11. Kecamatan Talo.....	II-7
2.1.1.1.12. Kecamatan Talo Kecil.....	II-8
2.1.1.1.13. Kecamatan Ilir Talo.....	II-8
2.1.1.1.14. Kecamatan Ulu Talo	II-8
2.1.1.1.14. Kecamatan Semidang Alas	II-9
2.1.1.1.15. Kecamatan Semidang Alas Maras.....	II-9
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-10
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	II-16
2.1.2. Demografi.....	II-18
2.1.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-19
2.1.2.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-19
2.1.2.1.1.1 Pertumbuhan PDRB	II-19
2.1.2.1.1.2 PDRB Per Kapita	II-25
2.1.2.1.1.3 Persentase Penduduk Miskin	II-25
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-25

2.1.3.1.	Pendidikan.....	II-25
2.1.3.1.1	Angka Partisipasi Sekolah.....	II-25
2.1.3.1.2	Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	II-26
2.1.3.1.3.	Rasio Guru/Murid.....	II-27
2.1.3.1.4.	Angka Putus Sekolah	II-22
2.1.3.2.	Kesehatan.....	II-31
2.1.3.2.1.	Rasio Posyandu.....	II-31
2.1.3.2.2.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu	II-32
2.1.3.2.3	Rasio Dokter.....	II-33
2.1.3.2.4	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	II-34
2.1.3.2.5	Porsi Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih.....	II-35
2.1.3.3.	Pekerjaan Umum.....	II-40
2.1.3.3.1.	Infrastruktur Jalan	II-40
2.1.3.3.2	Tempat Peribadatan	II-49
2.1.3.3.3.	Irigasi	II-49
2.1.3.4.	Perumahan	II-50
2.1.3.4.1.	Air Bersih	II-50
2.1.3.4.2.	Sanitasi.....	II-50
2.1.3.4.3.	Listrik	II-51
2.1.3.4.4.	Rumah Tidak Layak Huni	II-51
2.1.3.5.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-52
2.1.3.6.	Sosial.....	II-53
2.1.3.7.	Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.....	II-56
2.1.3.7.1.	Program Keluarga Harapan.....	II-56
2.1.3.7.2.	Bantuan Siswa Miskin.....	II-57
2.1.3.7.3.	Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)	II-58
2.1.4	Fokus Urusan Pilihan.....	
2.1.4.1	
2.1.5	Aspek Daya Saing	II-68
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD.....	II-69
2.2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016 - 2021	II-69
2.2.2.	Kinerja Pemerintah Daerah	II-70
2.2.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016	II-71
2.2.4	Capaian Indikator Misi RPJMD Kabupaten Seluma 2016 – 2021 Tahun Pelaksanaan Ke-1 (Tahun 2017) Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah yang Diselenggarakan	II-78

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN	
KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kondisi Perekonomian	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional	III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Provinsi Bengkulu	III-2
3.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Seluma	III-5
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-9
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-12
3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-14
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tema Pembangunan	IV-3
4.1.1. Dasar Penentuan Tema RKPD Tahun 2018.....	IV-3
4.2. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah	iv-9
4.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-4
4.2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu	IV
BAB V. RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH	V-1
5.1. Rincian Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018	V-1
BAB VI. PENUTUP	VI-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat: 1). Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; 2). Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); 3). Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan 4). Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal (Ranwal) RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang

RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui peraturan kepala daerah. Sejak proses penyusunan Ranwal RKPD, kebijakan yang ada di dalamnya berpedoman pada beberapa dokumen perencanaan di atasnya yaitu berpedoman pada RPJMD kabupaten, RPJMD provinsi, dan pada RPJMN.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Seluma telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 dilakukan dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, top - down dan bottom - up, serta partisipatif. Pendekatan politik dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dilakukan dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dan sinkronisasi atas hasil reses DPRD Kabupaten Seluma.

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional perencanaan, tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi; serta staf

perencana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

Pendekatan top-down dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dalam RPJMN 2015-2019. Pendekatan bottom-up dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten melalui forum Rembuk Dusun, Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrebang Kabupaten.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa dan kecamatan, terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan kawasan. Dengan menerapkan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD. RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan kedua dari periode RPJMD Tahun 2016-2021, yang memuat sasaran dan prioritas yang ingin dicapai, dalam rangka **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seluma Yang Beriman, Unggul dan Sejahtera serta Terlaksananya Percepatan Pembangunan Desa yang Berkeadilan”**.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Tahun 2018 yakni :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015-2019
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025.
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan operasional tahunan daerah. Hal ini berimplikasi adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik dari aspek proses, mekanisme, tahapan, dan tata cara pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

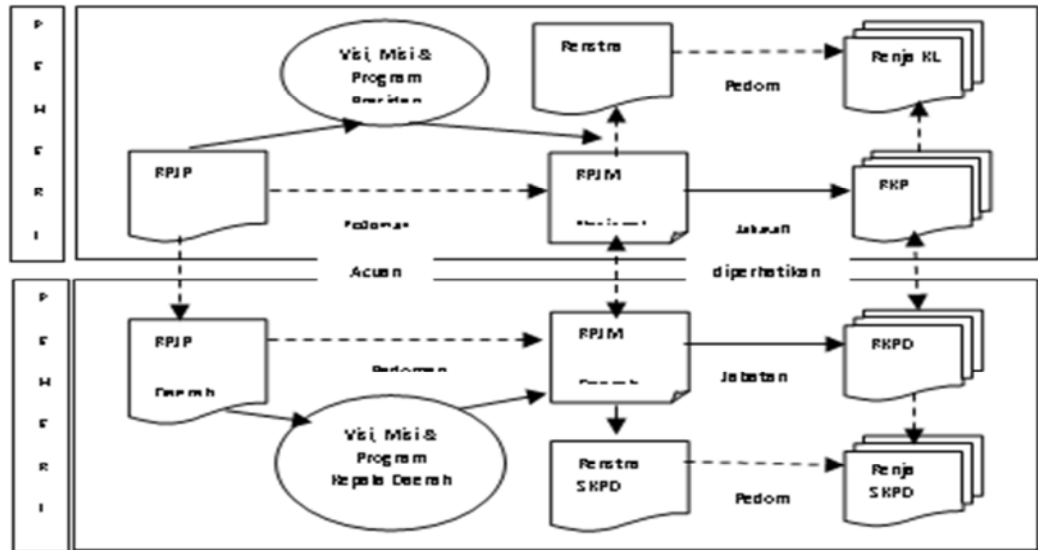
RKPD Kabupaten Seluma tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 06 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma 2016-2021 dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032. Gagasan yang akan dikembangkan baik didalam RKPD maupun RPJMD berakar pada RPJPD Kabupaten Seluma tahun 2005-2025. Selain itu dokumen RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 mengacu pada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 serta Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032. Penyusunan RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 menselaraskan dokumen RKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 disusun untuk mensinergikan perencanaan pembangunan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sinergitas yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan daerah dan pusat, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah dan nasional. Konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah dan potensi-potensi unggulan dari masing-masing kecamatan.

Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang terdapat di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan

bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.



Gambar 1. Keterkaitan Antar Dokumen

1.4 Sistematika Dokumen RKPd

RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan penjelasan ringkas mengenai RKPd, proses penyusunan RKPd, kedudukan RKPd tahun rencana dalam periode dokumen RPJPD, serta keterkaitan antara dokumen RKPd dengan dokumen RPJPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menguraikan dasar hukum yang berskala nasional maupun lokal yang digunakan dalam penyusunan RKPd. Dasar hukum berskala lokal/daerah yang diterbitkan berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pada bagian ini dijelaskan keterkaitan RKPd dengan dokumen lain

yang relevan, seperti RKPD provinsi yang berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJPD provinsi serta RTRW provinsi, demikian pula dengan RKP yang berpedoman pada RPJMN dan RPJPN.

1.4. Sistematika RKPD

Menggambarkan urutan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab beserta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Kondisi Umum Daerah

Bagian ini memberikan uraian mengenai gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi dasar-dasar analisis.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan realisasi RPJMD

Subbab ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD yang ditunjukkan melalui pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Evaluasi ini juga menunjukkan persentase realisasi RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan permasalahan pembangunan berdasarkan urusan serta permasalahan pokok yang menjadi dasar identifikasi isu strategis. Isu strategis kemudian menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan kriteria tertentu.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan daerah yang didasarkan pada hasil analisis kondisi perekonomian serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan nasional dan provinsi dibidang ekonomi serta pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi di Kabupaten Seluma.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam RKPD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui indikasi prioritas program dan kegiatan SKPD berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2018.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran RKPD tahun 2018 dengan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2018 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPD Tahun 2018, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas ini harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Pada bab ini juga diuraikan tentang matriks Renja dari program dan kegiatan SKPD tahun 2018 yang memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan secara singkat mengenai kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan akhir Renja SKPD, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD tahun yang direncanakan.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Seluma tahun 2018 ini, diantaranya :

- a. Untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan program-program pembangunan di daerah.
- b. Sebagai pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
- c. Sebagai pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Seluma Tahun Anggaran 2018.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Seluma

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

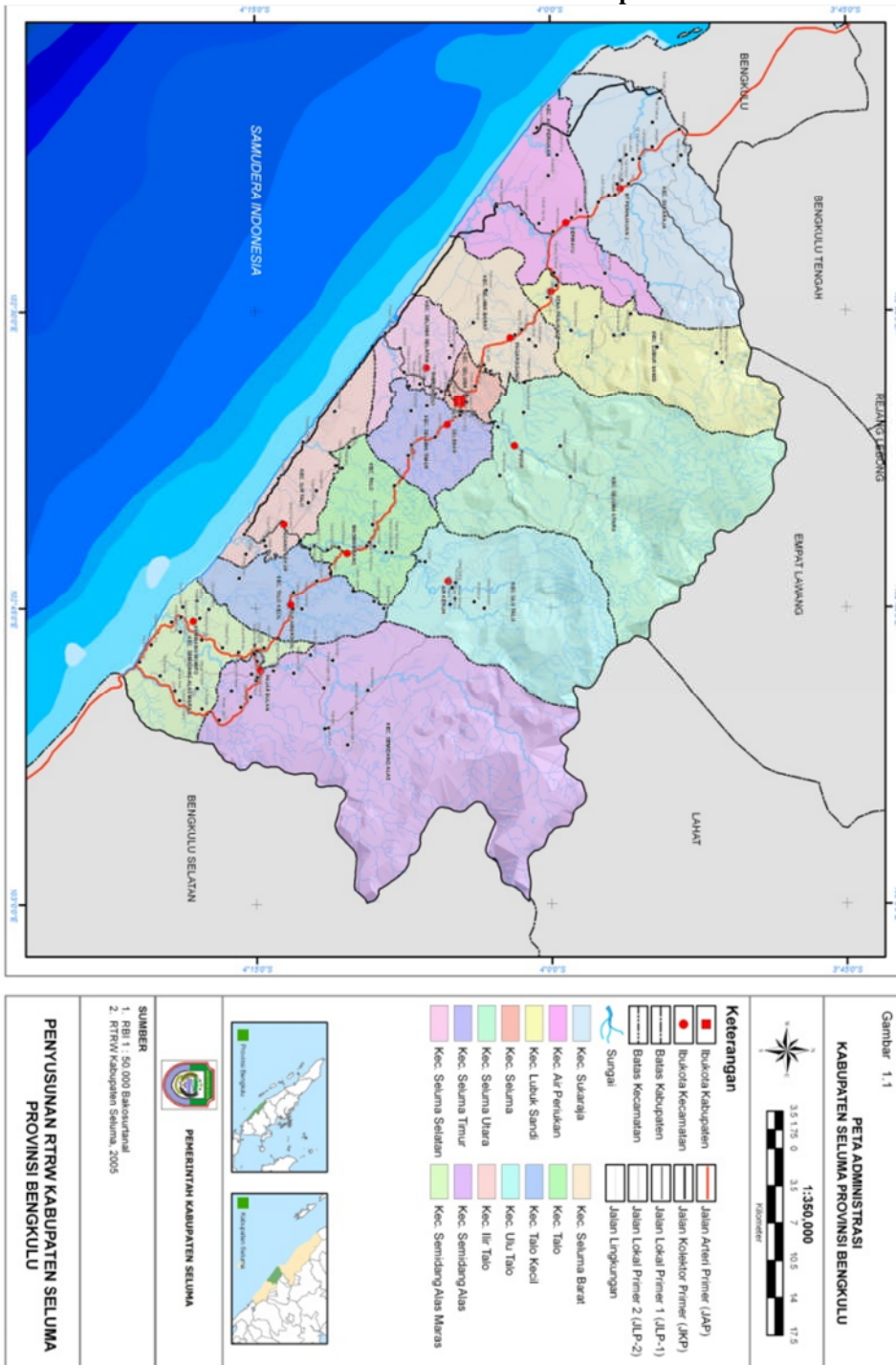
Kabupaten Seluma yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Dalam Provinsi Bengkulu dengan luas 2.400,44 km² atau 12,13 % dari luas Provinsi Bengkulu dan wilayah laut seluas 1.728,02 km² sehingga total keseluruhan luas Kabupaten Seluma adalah 4.128,46 km².

Ditinjau dari letak garis bujur dan lintangnya berada pada koordinat 03°49'55'66" LS - 04°21'40'22" LS dan 101°17'27' 57" BT - 102°59'40'54" BT dan secara geografis wilayah Kabupaten Seluma berada di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian selatan, membujur di sepanjang Bukit Barisan yang secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Kabupaten Seluma beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata maksimum antara 31°C - 33°C dan rata-rata suhu minimum antara 22°C - 23°C, sedangkan kelembaban rata-rata antara 80 — 88%, Rata-rata curah hujan di Kabupaten Seluma pada tahun 2014 sebesar 234,73 mm. Dimana rata-rata curah hujan terbesar terjadi pada bulan November. Sedangkan bulan dengan jumlah rata-rata curah hujan terkecil yaitu pada bulan Juni. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan November di pos Rimbo Kedui sebesar 677 mm. Sedangkan curah hujan terendah tercatat pada bulan Juni di pos Air Perjukan sebesar 0 mm.

Gambar 2.1 : Peta Administrasi Kabupaten Seluma



Gambar 2.1.

Sumber : RTRW Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma memiliki ketinggian tempat antara 0 - >1.000 m dpl, yaitu 0 – 25 m sebesar 30,67 %, 25 – 100 m sebesar 29 %, 100 – 500 m sebesar 21,50 %, 500 – 1.000 m sebesar 15,96 % dan > 1.000 m sebesar 16 %. Kelompok daerah perbukitan menempati lereng bawah dari rangkaian Bukit Barisan yang memanjang ke arah barat laut - tenggara dengan perbedaan ketinggian sekitar 300 m. Puncak-puncaknya berada pada ketinggian 500 – 2.000 m dpl dan ditengah-tengah jalur rangkaian dijumpai sistem patahan Sumatera.

Keadaan topografi di wilayah Kabupaten Seluma terdiri dari daerah datar dan berbukit sampai bergunung. Berdasarkan atas ketinggiannya dari permukaan laut, maka wilayah Kabupaten Seluma terbagi atas :

- Daerah yang berada pada ketinggian >10 m dpl dengan luas 30.810 Ha atau 12,834 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian 10 – 25 m dpl dengan luas 22.322 Ha atau 9,295 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian 25 – 50 m dpl dengan luas 27.274 Ha atau 11,357 %.
- Daerah yang berada ketinggian 50 – 100 m dpl dengan luas 18.773 Ha atau 7,817 % .
- Daerah yang berada ketinggian 100 – 500 m dpl dengan luas 58.409 Ha atau 24,322 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian 500 – 1.000 m dpl dengan luas 42.323 Ha atau 17,624 %.
- Daerah yang berada pada ketinggian >1.000 m dpl dengan luas 40.223 Ha atau 16,750 %.

Sungai-sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Seluma yang relatif besar mengalir dari hulunya di pegunungan Bukit Barisan dan bermuara di Samudera Indonesia. Sementara sungai-sungai yang relatif kecil dengan arah aliran yang sama, namun hulunya belum sampai ke Pegunungan Bukit Barisan.

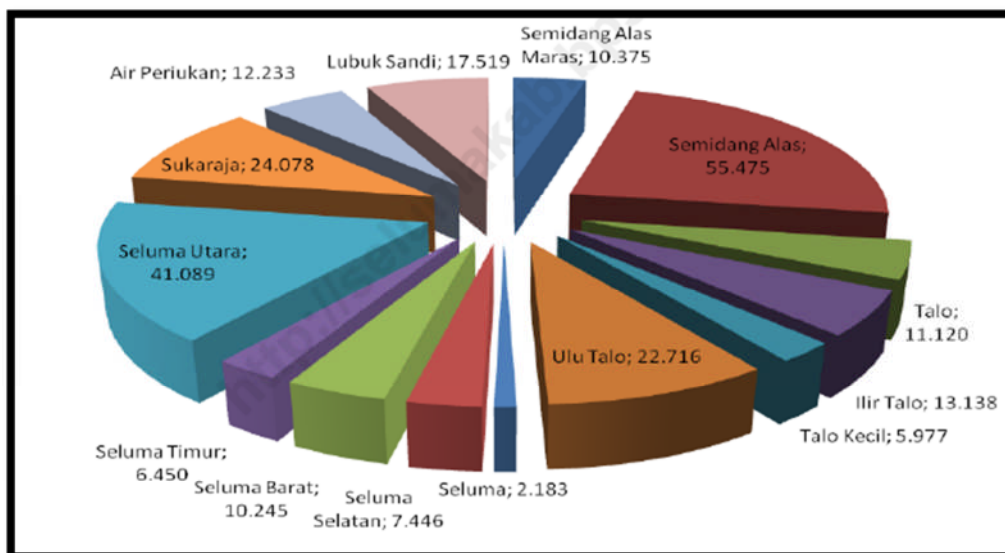
Kabupaten Seluma memiliki sungai besar dan kecil, antara lain : Air Ngalam, Air Seluma, Air Simpang, Air Dingin, Air Plubang, Air Gambiran, Air Rika, Air Plubang Simpang Kanan dan Simpang Kiri, Air Tanjung Aur, Air Nelas Kiri, Air Keruh, Air Nelas, Air Sindur, Air Kungkai, Air Penago, Air Talo, Air Alas, dan Air Maras. Sungai-sungai tersebut ada yang langsung bermuara ke Samudra Indonesia.

Sungai di Kabupaten Seluma berfungsi sebagai sumber irigasi dan sumber air minum PDAM. Wilayah Kabupaten Seluma juga berbatasan dengan Samudera Indonesia, dengan kedalaman laut cukup bervariasi mulai dari 5 m - 200 m

2.1.1.1.2 Wilayah Adminstrasi

Pada awal pembentukan Kabupaten Seluma, jumlah kecamatan di Kab. Seluma sebanyak 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma, Kecamatan Talo, Kecamatan Semidang Alas, dan Kecamatan Semidang Alas Maras. Sekarang sudah dimekarkan menjadi 14 (empat belas) kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa di Kab. Seluma pada tahun 2014 yaitu sebanyak 202 kelurahan/desa yang terdiri dari 20 kelurahan dan 182 desa.

Gambar 2.2. Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Seluma



Sumber : Kabupaten Seluma Dalam Angka Tahun 2015

2.1.1.2.1 Kecamatan Air Periukan

Kecamatan Air Periukan memiliki luas wilayah 12.233 Ha atau 5,10 % dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan Air Periukan terdiri dari 16 desa yaitu Desa Pasar ngalam, sukasari, tawang rejo, kungkai baru, keban agung, lawang agung, padang pelasan, air periukan, dermayu, sukamaju, talang benuang, talang alai, lubuk gilang, talang sebaris, lokasi baru dan taba lubuk puding.

Wilayah Administratif Kecamatan Air Periukan berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan

Sukaraja, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sandi Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Selatan dan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

2.1.1.2.2 Kecamatan Sukaraja

Kecamatan Sukaraja memiliki luas wilayah 24.078 Ha atau 10,03% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan Sukaraja terdiri dari 2 kelurahan dan 19 desa yaitu Kelurahan Sukaraja, Kelurahan babatan, Desa Lubuk sahung, padang pelawi, bukit peninjauan II, Kayu arang, niur, cahaya negeri, bukit peninjauan I, riak siabun, jenggalu, sidosari, sari mulyo, sidoluhur, sumber arum, riak siabun I, padang kuas, kuti agung, air kemuning, air petai, sumber makmur.

2.1.1.2.3 Kecamatan lubuk sandi

Kecamatan Lubuk sandi memiliki luas wilayah 17.519 Ha atau 7,3% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan lubuk sandi terdiri dari 14 desa yaitu Desa tumbuan, renah panjang, gunung agung, padang capo ulu, padang capo ilir, tanjung kuaw, talang giring, dusun tengah, talang kebun, arang sapat, napal jungur, cawang, sakaian dan lubuk terentang.

Wilayah Administratif Kecamatan Lubuk Sandi berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten bengkulu Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluma BaratSebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Air Periukan

2.1.1.2.4 Kecamatan seluma barat

Kecamatan Seluma barat memiliki luas wilayah 10.245 Ha atau 4,27% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma barat terdiri dari 9 desa yaitu Desa purbosari, talang prapat, air latak, pagar agung, talang tinggi, lunjuk, lubuk lagan, tanjung agung dan sengkung jaya.

Wilayah Administratif Kecamatan Seluma Barat berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan

Lubuk Sandi dan Kecamatan Air Periukan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Air Periukan dan Samudera Hindia Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Selatan dan Kecamatan Seluma dan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara.

2.1.1.2.5 Kecamatan seluma

Kecamatan Seluma memiliki luas wilayah 2.183 Ha atau 0,91% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma terdiri dari 7 kelurahan yaitu Kelurahan pasar tais, lubuk lintang, lubuk kebur, talang saling, talang dantuk, dusun baru dan napal.

Wilayah Administratif Kecamatan Seluma berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma timur, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma barat.

2.1.1.2.6 Kecamatan seluma timur

Kecamatan Seluma timur memiliki luas wilayah 6.450 Ha atau 2,69% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma timur terdiri dari 3 kelurahan dan 5 desa yaitu Kelurahan sembayat, bunga mas, selebar, desa kota agung, kunduran, tenagan, talang Sali, rawasari.

Wilayah Administratif Kecamatan Seluma timur berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara dan Seluma Kota, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara dan Kecamatan Talo, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Talo dan Kecamatan Ilir Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma selatan.

2.1.1.2.7 Kecamatan seluma selatan

Kecamatan Seluma selatan memiliki luas wilayah 7.446 Ha. Kecamatan seluma selatan terdiri dari 3 kelurahan dan 9 desa yaitu kelurahan rimbo kedua, kelurahan sidomulyo, kelurahan padang rambun, tanjung seluai, pasar seluma, tangga batu,

sukarami, padang genting, sengkung, tanjungan, tanjung seru, padang merbau.

Wilayah Administratif Kecamatan Seluma selatan berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma dan Kecamatan Seluma Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Timur, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Samudera Hindia dan Kecamatan Seluma Barat

2.1.1.2.8 Kecamatan seluma utara

Kecamatan Seluma utara memiliki luas wilayah 41.089 Ha atau 17,12% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan seluma utara terdiri dari 1 kelurahan dan 9 desa yaitu kelurahan puguk, desa simpang, selingsingan, pandan, talang beringin, talang rami, lubuk resam, sekalak, sinar pagi, talang empat.

Wilayah Administratif Kecamatan Seluma Utara berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Seluma dan Seluma Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Sandi danSeluma Barat

2.1.1.2.9 Kecamatan talo

Kecamatan talo memiliki luas wilayah 11.120 Ha atau 4,63% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan talo terdiri dari 1 kelurahan dan 15 desa yaitu kelurahan masmambang, desa air teras, air payangan, batu tugu, lubuk gadis, lubuk ngantungan, bunut tinggi, napal melintang, harapan mulya, kampai, durian bubur, simpang tiga pagar gasing, serambi gunung, muara danau, lubuk gio dan kembang seri.

Wilayah Administratif Kecamatan Talo berbatasan langsung dengan ; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Talo dan Kecamatan Seluma Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Talo Kecil, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan

Iilir Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Timur

2.1.1.2.10 Kecamatan talo kecil

Kecamatan talo kecil memiliki luas wilayah 5.977 Ha atau 2,45% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan talo kecil terdiri dari 11 desa yaitu desa pering baru, suka bulan, sukamerindu, talang padang, bakal dalam, napalan, lubuk lagan, sungai petai, tebat sibun dan batu balai.

Wilayah Administratif Kecamatan Talokecil berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras dan Kecamatan Ulu Talo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Iilir Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Talo dan Kecamatan Iilir Talo

2.1.1.2.11 Kecamatan ilir talo

Kecamatan ilir talo memiliki luas wilayah 13.138 Ha atau 5,47% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan ilir talo terdiri dari 15 desa yaitu desa dusun baru, penago baru, penago I, penago II, tanah abang, padang batu, rawa indah, talang kabu, talang panjang, padang cekur, nanti agung, pasar talo, paluah terap, margo sari, dan mekar sari.

Wilayah Administratif Kecamatan ilir Talo berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Talo dan Kecamatan Talo Kecil, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras, Sebelah Selatan berbatasan Samudera Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seluma Selatan

2.1.1.2.12 Kecamatan ulu talo

Kecamatan ulu talo memiliki luas wilayah 22.716 Ha atau 9,46% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan ulu talo terdiri dari 13 desa yaitu desa pagar banyu, pagar, air keruh, hargobinangun, mekar jaya, simpur ijang, muara simpur, tanjung agung, pagar agung, girimulya, banyu kencana, muara nibung, girinanto.

Wilayah Administratif Kecamatan ulu Talo berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara dan Kecamatan Talo Kecil, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas Maras, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Talo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Seluma Utara

2.1.1.2.13 Kecamatan semidang alas

Kecamatan semidang alas memiliki luas wilayah 55.475 Ha atau 23,11% dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan semidang alas terdiri dari 1 kelurahan dan 18 desa yaitu kelurahan pajar bulan, desa Maras Jauh, Tebat Gunung, Padang Serunaian, Gunung Mesir, Petai Kayu, Nanjungan, Bandung Agung, Pinju Layang, Nanti Agung, Rantau Panjang, Talang Durian, Air Melancar, Cugung Langu, Renah Gajah Mati I, Muara Dua, Renah Gajah Mati II, Kayu Elang, Napalan, Mekar Sari Mukti, Telatan, Suban, Gunung Megang, dan Kemang Manis.

2.1.1.2.14 Kecamatan semidang alas maras

Kecamatan semidang alas maras memiliki luas wilayah 10.375 Ha atau 4,32 % dari luas Kabupaten Seluma (data BPN Tahun 2009). Kecamatan semidang alas maras terdiri dari 1 kelurahan dan 25 desa yaitu kelurahan Kembang Mumpo, Desa Tedunan, Ketapang Baru, Padang Bakung, Talang Alai, Jambat Akar, Karang Anyar, Ujung Padang, Sendawar, Gelombang, Lubuk Betung, Padang Peri, Maras Tengah, Gunung Kembang, Gunung Bantan, Genting Juar, Padang Kelapo, Talang Beringin, Muara Maras, Pematang Riding, Serian Bandung, Rimbo Besar, Muara Timput, Maras Bantan, Talang Kemang dan Karang Dapo. Wilayah Administratif Kecamatan Semidang Alas Maras berbatasan langsung dengan; sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Semidang Alas, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten bengkulu selatan, Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Semidang Alas dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Talo Dan Talo Kecil

2.1.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Klasifikasi pengembangan wilayah yaitu dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung yang menjadi termasuk dalam pengembangan wilayah yaitu Dalam wilayah Provinsi Bengkulu, telah ditetapkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), yang menetapkan baik hutan dengan fungsi lindung maupun hutan dengan fungsi budidaya. Dimana penetapan kawasan hutan berdasarkan kepmenhutbun nomor: 420/kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu dan dilakukan perubahan terakhir sesuai dengan kepmenhut RI Nomor : SK.643/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 2.192 hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 31.013 hektar, dan penunjukan kawasan bukan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 101 hektar di Provinsi Bengkulu.

Dalam kawasan lindung juga terdapat kawasan resapan air dimana curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air di Kabupaten Seluma terdapat di Kecamatan Lubuk Sandi, Kecamatan Seluma Utara, Kecamatan Ulu Talo, dan Kecamatan Semidang Alas. Kawasan lindung juga berada pada kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, sempadan mata air, ruang terbuka hijau. Pada kawasan lindung di Kabupaten Seluma juga terdapat kawasan suaka alam dan cagar budaya.

Pada kawasan budidaya terdapat kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman serta peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan tanaman. Sedangkan kawasan peruntukan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain - lain.

Kawasan peruntukan pertanian baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan Kabupaten Seluma, baik terhadap PDRB, dan penyerapan tenaga kerja. Potensi sumberdaya lahan tanaman pangan dan hortikultura meliputi lahan sawah dan lahan

bukan sawah yang terdiri dari pekarangan, ladang, dan tegalan/kebun. Dari potensi yang ada masih menunjukkan bahwa intensitas pertanaman masih rendah, terutama lahan bukan sawah.

Untuk potensi kawasan perikanan khususnya perikanan tangkap di Kabupaten Seluma dikembangkan di sepanjang pesisir tiap kecamatan di Kabupaten Seluma, meliputi Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Barat, Seluma Selatan, Ilir Talo, Talo Kecil dan Semidang Alas Maras, sedangkan potensi pengembangan perikanan darat tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Seluma, sedangkan untuk budidaya air payau/tambak tersebar di Kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Seluma Selatan, Ilir Talo, Talo Kecil dan Semidang Alas Maras.

Kabupaten Seluma merupakan wilayah yang kaya akan hasil pertambangan, terutama : batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya. Terdapat 10 lokasi yang berpotensi mengandung batu bara dan baru 2 lokasi yang baru dikelola diantaranya di Kecamatan Lubuk Sandi dan Seluma Utara. Sedangkan potensi pasir besi di sepanjang pantai Kecamatan Ilir Talo dan Seluma Selatan. Dalam mengelola usaha pertambangan, pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), yang terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

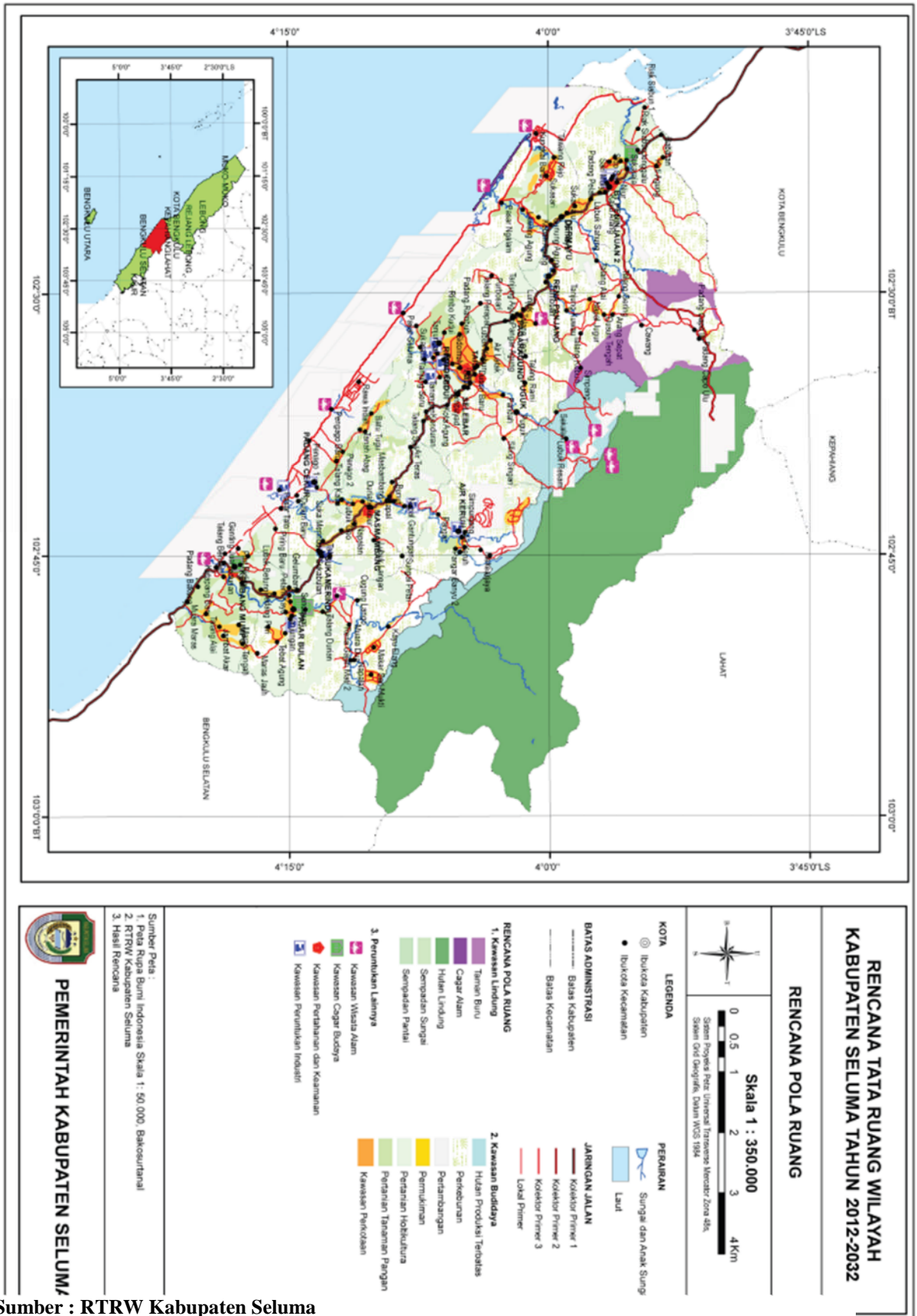
Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Pengembangan potensi kepariwisataan dilakukan dengan membagi destinasi pariwisata Kabupaten Seluma kedalam 5 (lima) Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP), sebagai berikut :

- a. DPP I , meliputi Koridor Kungkai Baru dan Pasar Ngalam
- b. DPP II, meliputi Koridor Tais, Puguk dan Lubuk Resam
- c. DPP III, meliputi Koridor Pasar Seluma
- d. DPP IV, meliputi Masmambang, Penago Baru dan Pasar Talo
- e. DPP V, meliputi Koridor Pajar Bulan, Air Melancar, Ketapang Baru dan Muara Maras

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Seluma, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Pengembangan potensi kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan yang tersebar.

Gambar 2.3 : Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Seluma 2012-2032

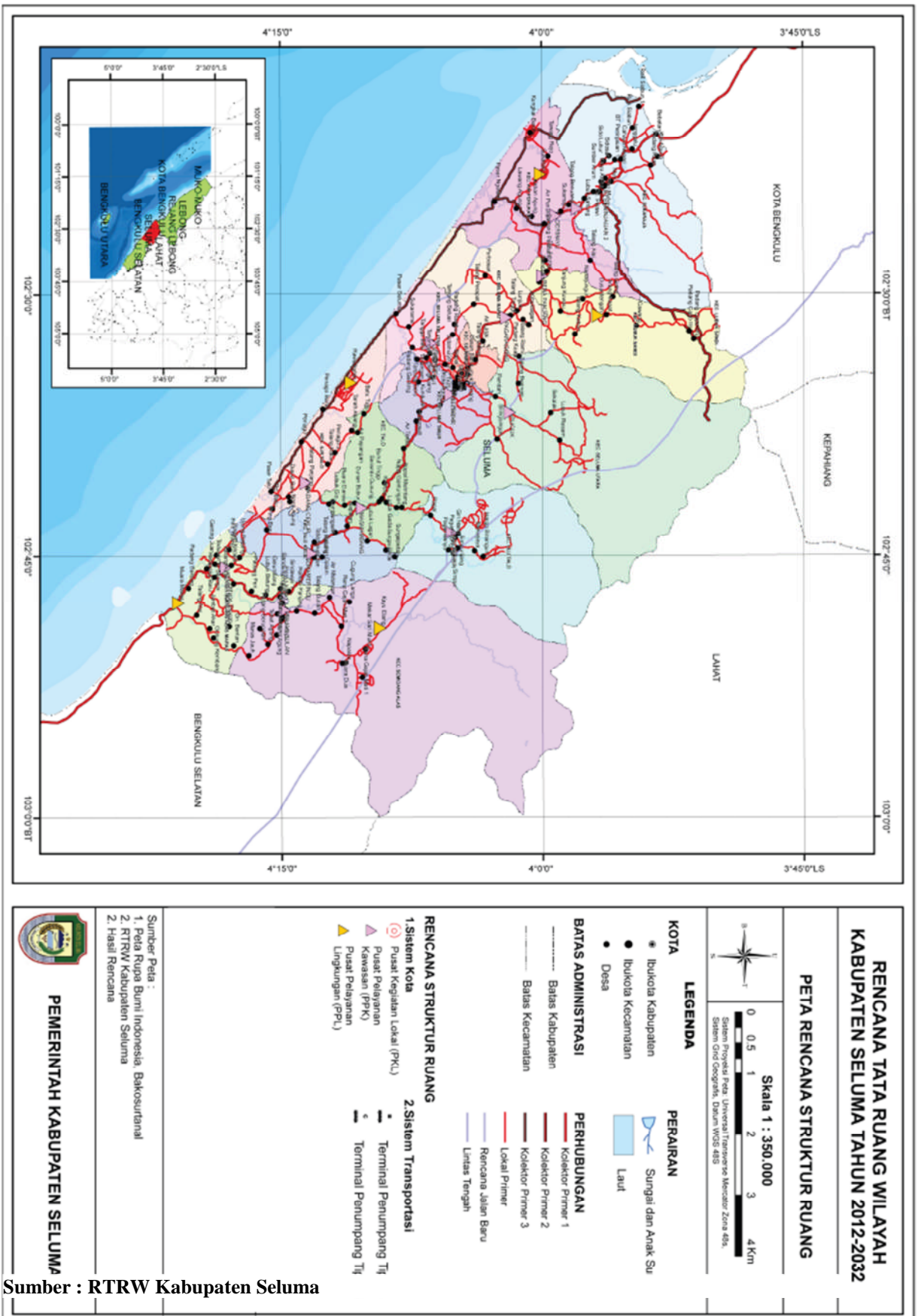


Sumber : RTRW Kabupaten Seluma

Kawasan peruntukan industri yang direncanakan untuk dikembangkan terutama untuk industri kecil dan menengah yaitu di 7 kecamatan yaitu : Sukaraja, Seluma Selatan, Talo, Ilir Talo, Ulu Talo, Talo Kecil, dan Semidang Alas.

Kawasan peruntukan lainnya yang akan dikembangkan di Kabupaten Seluma adalah kawasan pertahanan dan keamanan yang meliputi TNI AD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan instansi vertikal lainnya yang memiliki peran dalam pertahanan dan keamanan negara di Kabupaten Seluma. Untuk pertahanan dan keamanan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada instansi vertikal masing-masing yang nantinya dirakomodir di dalam penataan ruang daerah, pengembangan terhadap kawasan pertahanan dan keamanan berada di lokasi Kecamatan Sukaraja, Seluma, Seluma Timur, Semidang Alas Maras, dan Talo.

Gambar 2.4 : Peta Struktur Ruang 2012-2032



Sumber : RTRW Kabupaten Seluma

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Seluma adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) yang berlokasi di Kecamatan Seluma merupakan potensi wilayah yang diperuntukan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Terdapat 13 Lokasi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berada di Cahaya Negeri; Masmambang; Rimbo Kedui; Dermayu; Pajar Bulan; Puguk; Renah Panjang; Pagar Agung; Kembang Mumpo; Selebar; Air Keruh; Padang Cekur; dan Suka Merindu. dan penetapan 5 lokasi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berada di Sukasari; Kayu Elang; Muara Maras; Rawa Indah; dan Dusun Tengah.

2.1.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Secara geomorfologi Provinsi Bengkulu mempunyai empat karakter utama, yaitu dataran pantai yang membentang dari Kabupaten Muko-Muko sampai Kabupaten Kaur, dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi ini, maka Provinsi Bengkulu termasuk didalamnya Kabupaten Seluma wilayahnya rawan bencana,

Di Kabupaten Seluma terdapat beberapa kawasan rawan bencana. Oleh karena itu, penanganan terhadap rencana mitigasi bencana perlu dilakukan sejak dini. Laten gempa di wilayah Kabupaten Seluma berasal dari gempa tektonik dan gempa vulkanik dengan potensi pusat gempa (*episentrum*) berada di luar Kabupaten Seluma. Laten pusat gempa tektonik terletak di Samudera Indonesia, yang membentuk jalur gempa tektonik karena pertemuan 2 lempeng benua, yaitu Lempengan Indo-Australia dan Lempengan Eurasia. Gempa tektonik yang terjadi akan berdampak di daratan dan di dasar laut. Dampak di daratan adalah berupa guncangan gempa yang dapat merusak infrastruktur, permukiman, dan bentangan lahan lainnya. Sementara dampaknya di lautan akan berpeluang menimbulkan

gelombang pasang dan tsunami, yang selanjutnya berdampak ke pesisir daratan, seperti yang telah di alami di beberapa bagian di Pulau Sumatera.

Adapun sebaran potensi rawan bencana di Kabupaten Seluma dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Sebaran Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Rawan gerakan tanah/longsor (ha)			Total (ha)
		Potensi terjadi gerakan tanah tinggi	Potensi terjadi gerakan tanah sedang	Potensi terjadi gerakan tanah rendah	
1	Sukaraja	-	4.610	19.470	24.080
2	Air Periukan	-	200	12.030	12.230
3	Lubuk Sandi	-	7.680	9.840	17.520
4	Seluma	-	370	1.810	2.180
5	Seluma Utara	1.650	20.890	18.550	41.090
6	Seluma Timur	-	4.030	2.420	6.450
7	Seluma Selatan	-	660	6.790	7.450
8	Seluma Barat	-	-	10.240	10.240
9	Talo	2.440	2.960	5.720	11.120
10	Talo Kecil	1.880	-	4.100	5.980
11	Ulu Talo	2.370	3.240	17.100	22.710
12	Ilir Talo	-	-	13.140	13.140
13	Semidang Alas	34.410	-	21.060	55.470
14	Semidang Alas Maras	1.150	-	9.220	10.370
	JUMLAH	43.900	44.640	151.490	240.030

Sumber : Bappeda Kabupaten Seluma

Sedangkan untuk potensi bahaya rawan gempa relatif terjadi akibat tumbukan lempeng Hindia-Australia, dimana gempa yang ditimbulkan tersebut terkadang dapat menimbulkan dampak rawan tsunami, apabila tingkat kekuatan gempa hingga diatas 6SR.

Berkaitan dengan mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Seluma telah menyiapkan peta detail tentang risiko bencana. Peta risiko bencana ini berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbasis mitigasi bencana seperti dimandatkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004.

Tabel 2.2.
Sebaran Potensi Rawan Banjir di Kabupaten Seluma

No	Kecamatan	Luas (ha)	Rawan banjir
1	Seluma	96,89	Potensi genangan
2	Seluma Utara	27,65	Potensi genangan
3	Seluma Timur	53,01	Potensi genangan
4	Seluma Selatan	777,65	Potensi genangan
5	Talo	3,65	Potensi genangan
6	Semidang Alas Maras	1569,62	Potensi genangan
7	Sukaraja	32,62	Potensi genangan
8	Air Periukan	463,99	Potensi genangan
9	Semidang Alas	2671,16	Potensi genangan
10	Ulu Talo	2995,61	Potensi genangan
11	Ilir Talo	2304,11	Potensi genangan

Sumber : Bappeda Kabupaten Seluma

2.1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Seluma pada tahun 2015 sebesar 186.529 jiwa, yang tersebar menurut masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan yang ada.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk Kabupaten Seluma Tahun 2010-2015

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Semidang Alas Maras	20,801	21,122	21,644	22,046	22,391	22,701	22,701
2. Semidang Alas	13,591	13,803	13,926	14,081	14,197	14,500	14,500
3. Talo	10,591	10,754	10,831	10,941	11,020	11,266	11,266
4. Ilir Talo	13,135	13,337	13,246	13,292	13,299	13,687	13,687
5. Talo Kecil	9,259	9,402	9,673	9,873	10,047	10,166	10,166
6. Ulu Talo	4,816	4,891	4,935	4,990	5,031	5,138	5,138
7. Seluma	8,344	8,472	8,838	9,079	9,300	9,349	9,349
8. Seluma Selatan	10,588	10,751	10,852	10,974	11,066	11,300	11,300
9. Seluma Barat	7,798	7,919	7,949	8,015	8,060	8,253	8,253
10. Seluma Timur	8,901	9,038	8,901	9,007	9,199	9,275	9,275
11. Seluma Utara	7,736	7,857	7,933	8,025	8,095	8,264	8,264
12. Sukaraja	29,740	30,203	31,134	31,807	32,399	32,752	32,752
13. Air Periukan	18,526	18,812	18,779	18,890	18,946	19,451	19,451
14. Lubuk Sandi	9,681	9,832	10,048	10,222	10,370	10,526	10,526
Jumlah	173,507	176,193	178,689	181,242	183,420	186,629	186,629

Sumber : Seluma Dalam Angka Tahun 2010-2016

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

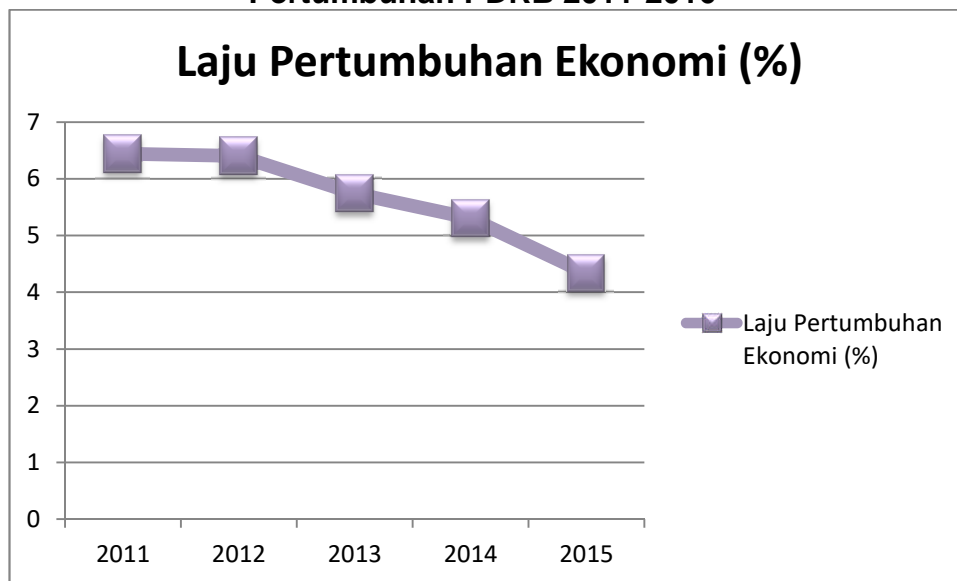
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

Perekonomian Kabupaten Seluma pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Seluma tahun 2015 mencapai 4,34 persen, sedangkan tahun 2014 sebesar 5,30, tahun 2013 sebesar 5,74 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,97 persen dan yang terendah adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, dan limbah dengan pertumbuhan sebesar 0,66 persen.

Tabel 2.4.
Pertumbuhan PDRB 2011-2016



Sumber :Kabupaten Seluma Dalam Angka Tahun 2016

Potensi ekonomi Kabupaten Seluma dapat dilihat dari struktur perekonomiannya yang didasari pada PDRB atas dasar harga berlaku, dimana perekonomian Kabupaten Selumadidominasi oleh lapangan usaha pertanian dengan peranan sebesar 53,65 persen. Meskipunperan lapangan usaha ini masih dominan, namun jika dilihat dari trennya tampak gejala penurunan peranan pertanian setiap tahun meskipun kecil.

Pada sisi lain, lapangan usahapertanian memiliki produktifitas tenaga kerja yang rendah dan juga didominasi oleh tenagakerja tidak dibayar (pekerja keluarga), sehingga pertumbuhan yang terjadi pada lapanganusaha ini belum mampu memberikan manfaat banyak terhadap kesejahteraan masyarakat(petani).Petanii tetap dalam kemiskinan dan cenderung kian kehilangan tanah sebagai asetnyayang menyebabkan banyaknya keluarga miskin di pedesaan.Oleh sebab itu, perhatian dankeberpihakan pemerintah terhadap daya saing dan produktivitas di lapangan usaha pertaniansangat dibutuhkan.

Lapangan usaha pertanian harus mendapatkan perhatian serius mengingat peranannyayang penting dalam perekonomian Kabupaten Seluma. Hal ini didasari beberapa alasan: Pertama,lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu hampir 60 persen tenaga kerjaterserap di lapangan usaha pertanian. Kedua, lapangan usaha pertanian dapat digunakanuntuk mendukung perkembangan lapangan usaha industri dengan adanya keterkaitan melaluipengembangan

agroindustri bahkan agrowisata. Ketiga, komoditas ekspor andalan berupakomoditas pertanian seperti sawit dan karet merupakan sumber devisa yang diperlukan. Keempat, keberhasilan lapangan usaha pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung pada sumber pendanaan luar.

Dalam perkembangannya, lapangan usaha pertanian menghadapi berbagai paradoks atau hal yang berlawanan yakni : (1) makin besar dorongan pertanian menumbuhkan lapangan usaha lain, makin kecil perannya dalam pertumbuhan ekonomi; (2) makin mengecil tingkat pertumbuhan pertanian, makin besar bagian angkatan kerja baru yang terserap oleh lapangan usaha tersebut; (3) makin berkembang lapangan usaha ekonomi di luar pertanian, makin sulit pekerja keluar dari lapangan usaha pertanian berhubung lemahnya daya saing di bursa tenaga kerja; (4) semakin intensif petani gurem mengekspansi lahan, semakin besar ancaman pelestarian lingkungan. Fenomena yang kontras ini tentu perlu segera diatasi dengan upaya yang sistematis dan melibatkan partisipasi banyak pihak agar perekonomian Seluma dapat semakin maju dan dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Selanjutnya dari analisis terhadap struktur perekonomian Kabupaten Seluma, diketahui juga peranan terbesar kedua ditempati oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dengan share sebesar 8,84 persen. Kemudian disusul lapangan usaha Industri pengolahan dengan peranan sebesar 7,99 persen. Sedangkan lapangan usaha pengadaan listrik dan gas menjadi yang paling kecil perannya hanya sebesar 0,06 persen.

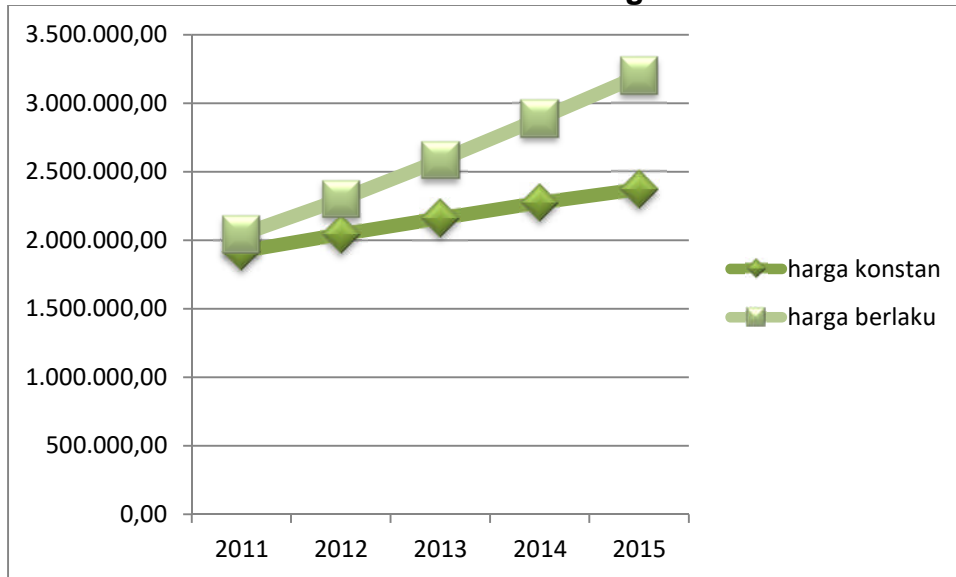
Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Kabupaten Seluma dari tahun ke tahun ditampilkan pada indikator dibawah ini.

Tabel 2.5.
PDRB Kab. Seluma Tahun 2010 – 2015 (Rp 000.000)

No.	PDRB	2011	2012	2013	2014	2015
1	Harga Berlaku	1.919.541,20	2.042.443,10	2.159.746,20	2.274.230,80	2.372.868,30
2	Harga Konstan	2.040.912,10	2.296.264,50	2.582.542,50	2.886.395,20	3.198.200,70

Sumber : Kabupaten Seluma Dalam Angka Tahun 2016

Gambar 2.6: Pertumbuhan PDRB atas Harga Berlaku dan Konstan



Sumber :Kabupaten Seluma Dalam Angka Tahun 2016

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Seluma masih sangat dominan.Kedudukan sektor pertanian sebagai *leadingsector* dalam perekonomian di Kabupaten Seluma masih sangat sulit ditransformasikan oleh sektor-sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Seluma dibandingkan dengan sektor-sektor lain.

Tabel 2.6.
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Seluma

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014*	2015**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.113.839,2	1.248.535,6	1.398.020,9	1.542.543,5	1.649.050,4
B	Pertambangan dan Penggalian	75.226,0	88.525,8	96.737,3	110.991,4	121.769,3
C	Industri Pengolahan	165.871,5	186.963,3	210.434,8	238.685,4	266.119,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.473,7	1.558,3	1.409,9	1.668,4	2.228,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.896,5	5.138,2	5.219,9	5.331,4	5.575,5
F	Konstruksi	87.427,1	99.108,6	114.391,3	128.332,8	147.101,9
G	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	133.856,0	147.651,8	166.830,7	187.563,7	211.754,8
H	Transportasi dan Pergudangan	41.514,4	45.075,6	49.470,5	54.949,5	62.854,1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.787,5	27.122,8	31.571,4	37.487,0	43.997,3
J	Informasi dan Komunikasi	17.961,4	19.610,2	21.971,0	24.823,3	28.311,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.860,8	17.598,0	19.949,9	22.738,2	26.044,4
L	Real Estate	76.966,4	88.223,6	97.137,5	109.701,5	124.528,4
M,N	Jasa Perusahaan	2.451,5	2.532,5	2.805,5	2.996,3	3.509,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	166.364,6	192.594,3	222.008,8	256.278,7	316.266,6
P	Jasa Pendidikan	89.391,5	97.312,5	113.204,0	126.566,1	146.817,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.752,8	17.121,4	18.658,3	21.305,8	25.110,1
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10.271,4	11.591,9	12.720,8	14.432,2	17.162,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		2,040,912.1	2.040.912,1	2.296.264,5	2.582.542,5	2.886.395,2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		2,040,912.1	2.040.912,1	2.296.264,5	2.582.542,5	2.886.395,2

Sumber :Kabupaten Seluma Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.7.
PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Seluma

Kategori	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.047.130,8	1.114.349,3	1.174.357,0	1.222.762,9	1.241.812,7
B	Pertambangan dan Penggalian	70.247,4	76.169,4	78.238,6	82.535,7	85.619,0
C	Industri Pengolahan	156.624,6	167.580,9	179.687,2	190.027,4	201.860,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.658,3	1.882,8	1.984,0	2.175,9	2.165,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.658,9	4.691,5	4.733,7	4.764,9	4.777,8
F	Konstruksi	82.102,3	86.879,9	91.445,6	97.204,8	104.232,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	124.656,7	132.815,2	141.704,2	150.698,1	162.416,4
H	Transportasi dan Pergudangan	39.695,7	41.939,9	43.477,6	46.780,9	50.164,3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21.438,7	23.667,0	25.803,2	28.374,9	30.992,1
J	Informasi dan Komunikasi	16.504,2	17.056,7	18.536,4	19.645,8	20.935,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13.884,0	15.459,3	16.177,8	17.146,8	18.038,3
L	Real Estate	70.509,2	74.555,3	80.574,9	87.329,0	94.390,0
M,N	Jasa Perusahaan	2.272,9	2.301,3	2.322,8	2.468,5	2.670,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	158.246,6	167.272,5	178.355,0	189.168,4	207.195,5
P	Jasa Pendidikan	85.311,2	89.989,7	95.177,6	103.856,1	113.683,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.401,4	15.125,7	15.916,8	17.335,8	18.871,5
R,S,T,U	Jasa lainnya	10.198,4	10.706,6	11.253,8	11.954,9	13.041,8
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.919.541,2	2.042.443,1	2.159.746,2	2.274.230,8	2.372.868,3
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	1,919,541.2	1.919.541,2	2.042.443,1	2.159.746,2	2.274.230,8

Sumber :Kabupaten Seluma Dalam Angka Tahun 2016

2.1.2.1.2 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Kabupaten Seluma mencapai 17,23 juta Rupiah mengalami kenaikan 12 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang bernilai 15,14 juta Rupiah.

2.1.2.1.3 Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk Kabupaten Seluma pada tahun 2015 tercatat 185.587 jiwa. Jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, jumlah penduduk Kabupaten Seluma termasuk yang tinggi, berada pada urutan empat dari 10 kabupaten/kota yang ada.

Sementara itu apabila dibandingkan persentase jumlah penduduk miskin antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Seluma berada di urutan ketiga jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu.

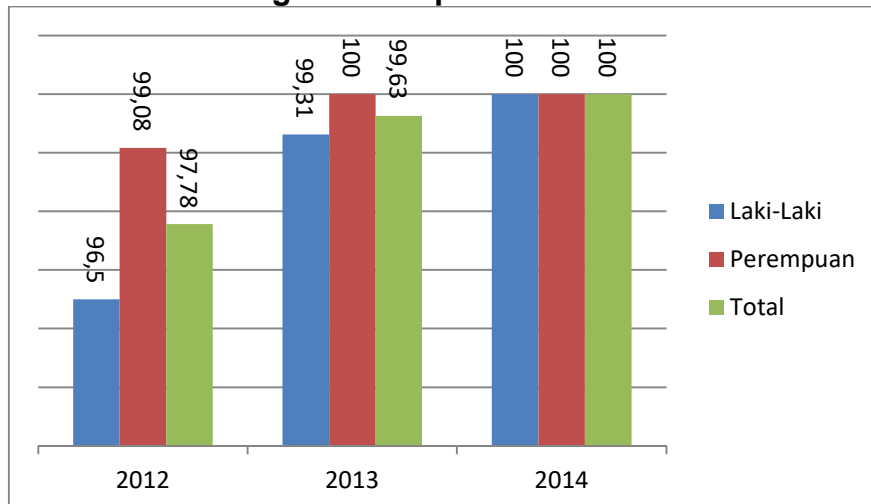
2.1.2 Aspek Pelayanan Umum

2.1.2.1 Pendidikan

2.1.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Ditinjau dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun, APS usia 7-12 tahun Kabupaten Seluma pada periode 2012-2014 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 APS 7-12 tahun Kabupaten Seluma mencapai 97,78%. Angka ini meningkat menjadi 100% pada tahun 2014. Selain itu, dalam kurun waktu 2012-2013 APS Perempuan selalu lebih tinggi daripada APS Laki-laki.

Gambar 2.29 : Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun (2012-2014)



Sumber: Susenas, 2012-2014

Sementara itu, secara umum APS usia 13-15 tahun Kabupaten Seluma dalam periode tahun 2012-2014 menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dimana pada tahun 2014, APS 13-15 tahun mencapai menjadi 97,95%. Ditingkat pendidikan menengah, pada tahun 2014 APS usia 16-18 tahun mencapai 72,56%. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian dalam penentuan kebijakan di bidang pendidikan.

2.1.3.1.2 Ketersediaan Sekolah / penduduk usia sekolah

Sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini, dalam rentang waktu 2011-2015 terjadi peningkatan Rasio Ketersediaan Sekolah Tingkat SD/MI menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 angka rasio ini mencapai 79 SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Seluma. Angka ini meningkat menjadi 83 SD/MI per 10.000 penduduk pada tahun 2015. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk tersedia 8 SD/MI untuk 1000 penduduk Kabupaten Seluma atau tersedia 1 sekolah untuk 125 penduduk usia 7-12 tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan untuk jenjang sekolah dasar (SD/MI), telah tersedia cukup sekolah bagi penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2.8.
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	180	180	180	180	180
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	22,815	20,705	21,357	21,614	21,658
1.3.	Rasio	78.9	86.9	84.3	83.3	83.1
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	27	26	43	48	49
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	10,499	10,358	10,039	10,159	10,709
2.3.	Rasio	25.7	25.1	42.8	47.2	45.8

Sumber : Seluma Dalam Angka 2011-2015

Dilain pihak, untuk jenjang pendidikan menengah pertama, terjadi peningkatan rasio Ketersediaan Sekolah secara drastis. Pada tahun 2011 rasio ini mencapai 25,7 SMP/MTs untuk 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Angka ini meningkatkan hampir mencapai dua kali lipat pada tahun 2015 yaitu mencapai 45,8 SMP/MTs untuk 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Artinya, telah tersedia 4 SMP/MTs untuk 1.000 penduduk usia 16-18 tahun atau 1 SMP untuk 250 penduduk usia 16-18 tahun.

2.1.3.1.3 Rasio guru/murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Dari segi kuantitas, pada periode 2011-2015 Rasio Guru per 1.000 murid di Kabupaten Seluma menunjukkan peningkatan baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Dari tabel dibawah ini, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 rasio guru/murid adalah 77,2 guru per 1000 murid SD/MI. Dengan kata lain tersedia paling tidak 7 guru untuk setiap 100 murid SD/MI atau 1 guru untuk 14 murid SD/MI.

Rasio ini sangat memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Dalam SPM diamanatkan bahwa di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan. Di Kabupaten Seluma tersedia 1 orang guru untuk 14 peserta didik dan 7 orang guru untuk 1 SD/MI.

Untuk jenjang sekolah menengah pertama, rasio guru per 1000 murid menunjukkan perkembangan yang sama dengan jenjang sekolah dasar. Pada tahun 2014 tersedia 78 orang guru untuk 1000 murid SMP/MTs. Dengan kata lain, terdapat 7 guru bagi 100 murid atau 1 guru untuk 14 murid SMP/MTs.

Tabel 2.9.
Rasio Guru/Murid

NO	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	1,999	1,421	1,277	1,714	1,715
1.2.	Jumlah Murid	26,117	24,641	24,355	23,953	22,214
1.3.	Rasio	76.5	57.7	52.4	71.6	77.2
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	520	389	504	703	665
2.2.	Jumlah Murid	6,896	6,609	8,141	8,486	8,459
2.3.	Rasio	75.4	58.9	61.9	82.8	78.6

Sumber : Seluma Dalam Angka 2011-2015

Meskipun secara keseluruhan rasio guru/murid untuk jenjang pendidikan dasar menunjukkan angka yang sangat layak, masih dibutuhkan informasi tentang pemerataan guru di setiap kecamatannya.

Tabel 2.10.
Jumlah Murid per 1 Orang Guru SD/MI berdasarkan Kecamatan

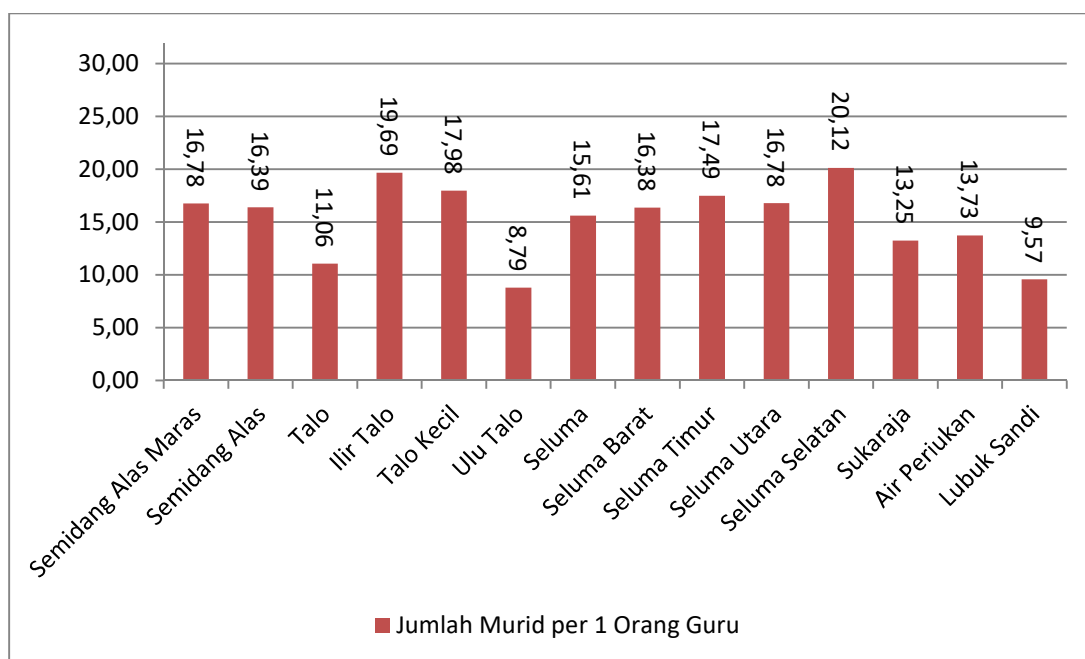
Kecamatan	Jumlah Murid per 1 Orang Guru					Rata-Rata /Tahun
	2011	2012	2013	2014	2015	
Semidang Alas Maras	18.14	22.17	15.83	15.77	16.78	17.73
Semidang Alas	16.75	22.31	16.50	15.55	16.39	17.50
Talo	12.41	14.29	10.38	10.20	11.06	11.67
Ilir Talo	27.26	28.13	16.04	15.91	19.69	21.40
Talo Kecil	21.06	23.58	16.80	16.85	17.98	19.26
Ulu Talo	13.75	12.49	7.09	6.70	8.79	9.76
Seluma	17.97	19.29	14.70	14.54	15.61	16.42
Seluma Barat	20.35	19.46	11.82	21.43	16.38	17.89
Seluma Timur	20.39	22.90	27.30	11.77	17.49	19.97
Seluma Utara	23.10	20.32	13.63	26.55	16.78	20.08
Seluma Selatan	29.98	26.64	22.49	12.65	20.12	22.38
Sukaraja	15.10	14.98	11.98	11.30	13.25	13.32
Air Periukan	19.74	20.19	15.08	7.68	13.73	15.29
Lubuk Sandi	7.89	12.76	9.51	9.75	9.57	9.90
Jumlah	17.34	19.07	13.97	12.95	14.91	15.65

Sumber : Seluma Dalam Angka (BPS, 2015)

Tabel 4.12 merangkum rasio 1 orang guru terhadap murid SD/MI di setiap Kecamatan. Dari tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa rasio Guru/Murid setiap kecamatan sangat memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan dasar yang tertuang

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Gambar 4. 1 : Jumlah Murid per 1 Orang Guru SD/MI Tahun 2015



Sumber : Seluma Dalam Angka (BPS, 2015)

Sementara itu, rasio 1 orang guru per murid SMP/MTs disajikan dalam tabel dibawah ini. Dari tabel dibawah ini, terlihat bahwa rasio 1 orang guru per murid SMP/MTs selama rentang waktu 2012-2015 setiap kecamatan masih memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Tabel 2.11.
Jumlah Murid per 1 Orang Guru SMP/MTs berdasarkan Kecamatan

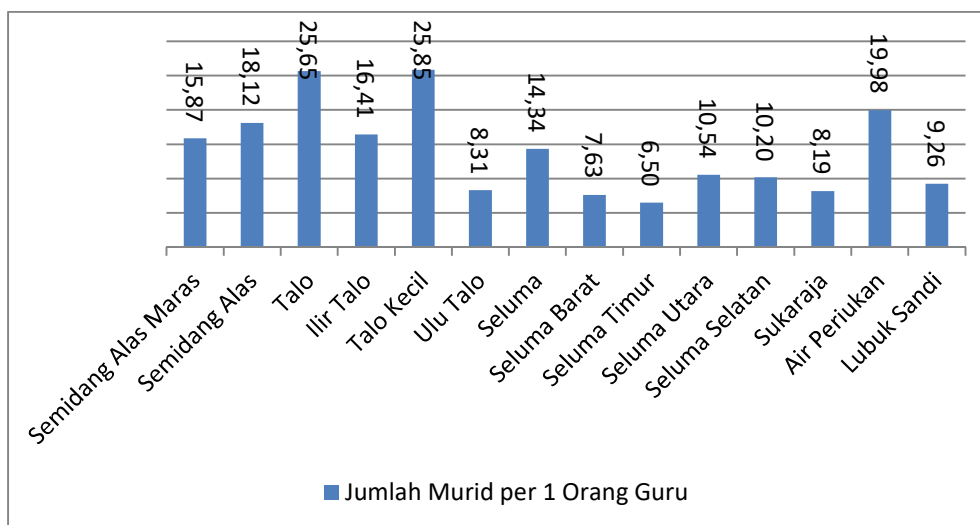
Kecamatan	Jumlah Murid per 1 Orang Guru					
	2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata
Semidang Alas Maras	18.30	31.87	21.63	16.12	15.87	20.76
Semidang Alas	11.62	20.09	23.46	14.24	18.12	17.51
Talo	15.61	21.53	28.41	17.48	25.65	21.73
Ilir Talo	24.72	33.21	35.06	18.76	16.41	25.63
Talo Kecil	17.33	30.56	26.31	26.46	25.85	25.30
Ulu Talo	9.11	14.50	14.93	8.66	8.31	11.10
Seluma	12.81	5.34	14.04	13.87	14.34	12.08
Seluma Barat	12.43	17.09	9.79	7.89	7.63	10.97
Seluma Timur	8.12	11.53	12.25	9.85	6.50	9.65
Seluma Utara	1.00	9.07	6.81	10.00	10.54	7.48

Kecamatan	Jumlah Murid per 1 Orang Guru					
	2011	2012	2013	2014	2015	rata-rata
Seluma Selatan	15.96	11.43	11.40	10.39	10.20	11.88
Sukaraja	12.07	15.30	11.70	7.77	8.19	11.01
Air Periukan	13.27	16.79	16.04	12.49	19.98	15.71
Lubuk Sandi	11.44	14.76	14.75	9.79	9.26	12.00
Jumlah	13.26	16.99	16.15	12.07	12.72	14.24

Sumber : Seluma Dalam Angka (BPS, 2015)

Lebih detail lagi, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini, pada tahun 2015 Kecamatan Seluma Talo Kecil, Kecamatan Talo, dan Kecamatan Air Periukan merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah murid per 1 orang Guru SMP/MTs tertinggi di Kabupaten Seluma. Di lain pihak Kecamatan Seluma Timur dan Kecamatan Seluma Barat adalah kecamatan-kecamatan dengan jumlah murid per 1 orang Guru SMP/MTs terendah.

Gambar 4. 2 : Jumlah Murid per 1 Orang Guru SMP/MTs Tahun 2015

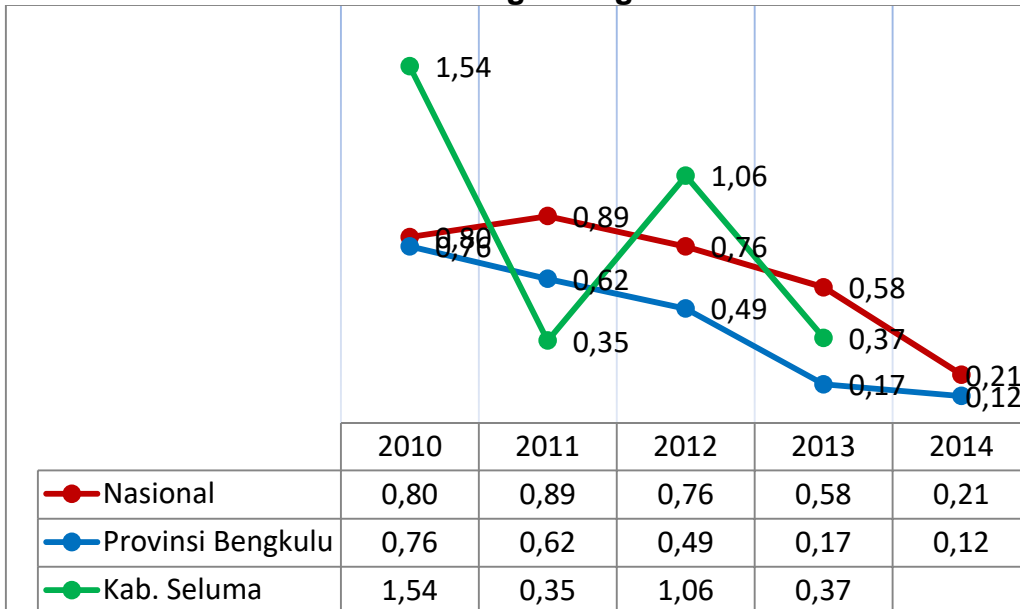


Sumber : Seluma Dalam Angka (BPS, 2015)

2.1.3.1.4 Angka Putus Sekolah

Dalam kurun waktu 2010-2013,Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Tahun Kabupaten Seluma menunjukkan penurunan. Pada tahun 2010 Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun adalah sebesar 1,54%. Angka ini menurun menjadi 0,37% pada tahun 2013. Angka ini diharapkan terus menurun pada tahun 2014 seiring dengan menurunnya Angka Putus Sekolah yang datanya sudah tersedia sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.20: Perkembangan Angka Putus Sekolah Usia 7-12 tahun



Sumber : Basis Data terpadu (TNP2K, 2014)

Untuk jenjang usia 13-15 tahun, Angka Putus Sekolah di Kabupaten Seluma menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Angka Putus Sekolah Usia 13-15 tahun menurun dari 9,19% pada tahun 2010 menjadi 2,05% pada tahun 2014.

Dilain pihak untuk tingkatan pendidikan menengah, Angka Putus Sekolah Usia 16-18 Tahun di Kabupaten Seluma juga mengalami penurunan yang signifikan. Angka Putus Sekolah Usia 16-18 tahun menurun dari 58,92% menjadi 26,34% pada tahun 2014.

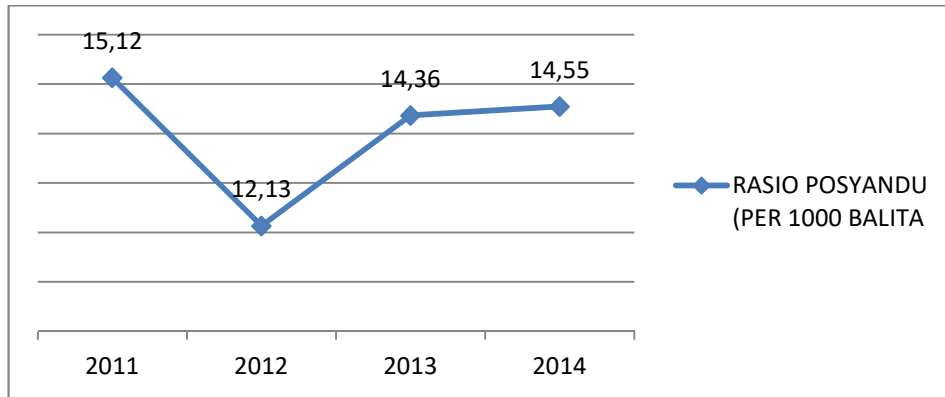
2.1.3.2 Kesehatan

2.1.3.2.1 Rasio Posyandu

Peningkatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik. Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti dimaksud diatas dapat dilakukan pada Posyandu.

Secara umum dalam rentang waktu 2011-2014, Rasio Posyandu per 1000 balita di Kabupaten Seluma menunjukkan perkembangan yang stabil. Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik dibawah ini, Rasio Posyandu per 1000 Balita di Kabupaten Seluma dalam kurun waktu 2011-2014 adalah rata-rata sebesar 14 posyandu per 1000 balita. Dengan kata lain selama periode tersebut 1 posyandu melayani 70 balita.

Gambar 2.21. Rasio Posyandu per 1000 balita



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Seluma 2011-2014

Adapun sebaran Rasio Posyandu berdasarkan kecamatan ditampilkan dalam tabel berikut ini. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa Rasio posyandu per 1000 balita tertinggi dalam periode 2011-2014 berada di Kecamatan Ulu Talo dimana rasio tertinggi terjadi pada kurun 2012-2014 yaitu secara berturut-turut 17,97 (2012), 27,5 (2013) dan 30,11 (2014). Sementara itu Rasio Posyandu terendah terdapat pada Kecamatan Talo Kecil yang terjadi pada kurun 2011-2013 dengan rincian 9,07 (2011), 8,41 (2012) dan 8,78 (2013).

Tabel 2.12.
Rasio Posyandu per 1000 balita.

KECAMATAN	RASIO POSYANDU (PER 1000 BALITA)			
	2011	2012	2013	2014
SEMIDANG ALAS MARAS	17.46	10.81	18.87	15.48
SEMIDANG ALAS	14.88	12.84	18.84	22.48
TALO	19.75	18.20	17.76	19.98
ILIR TALO	10.93	9.77	14.24	11.76
TALO KECIL	9.07	8.41	8.78	10.14
ULU TALO	21.21	17.97	27.50	30.11
SELUMA	24.56	10.57	9.40	6.76
SELUMA SELATAN	15.80	13.31	13.09	10.89
SELUMA BARAT	33.20	14.04	10.15	15.45
SELUMA TIMUR	10.69	9.48	12.78	13.65
SELUMA UTARA	11.46	10.91	15.41	15.82
SUKARAJA	14.34	12.60	11.93	13.11
AIR PERIUKAN	18.76	12.40	11.78	12.75
LUBUK SANDI	14.07	12.60	19.75	18.41
KABUPATEN SELUMA	15.12	12.13	14.36	14.55

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Seluma 2011-2014

2.1.3.2.2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu

Dari tabel dibawah ini, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1000 jiwa penduduk Kabupaten Seluma pada tahun 2014 adalah 0,35 Puskesmas/Poliklinik/Pustu per 1000

jiwa penduduk. Dengan kata lain, 1 Puskesmas/poliklinik/pustu melayani 3000 jiwa penduduk.

Tabel 2.13.
Rasio Puskesmas/Poliklinik/Pustu

PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU	JUMLAH PENDUDUK	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu PER 1000 PENDUDUK
22	43	183,420	0.35

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Seluma 2011-2014

2.1.3.2.3 Rasio Dokter

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Di Kabupaten Seluma, dalam kurun waktu 2012-2013 rasio dokter menurun dari 0,19 pada tahun 2012 menjadi 0,11 pada tahun 2014. Dengan demikian, selama periode tersebut terjadi pengurangan rasio dokter hingga 50%. Pada tahun 2014, dengan rasio dokter/1000 jumlah penduduk sebesar 0,11 berarti 1 orang dokter melayani 10.000 penduduk. Angka ini tentunya jauh dari angka ideal yaitu 1 dokter : 2.500 penduduk.

Tabel 2.14.
Rasio Dokter dengan Jumlah Penduduk

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Dokter	34	13	20
Jumlah Penduduk	178,689	181,242	183,916
Rasio Dokter per 1000 penduduk	0.19	0.07	0.11

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Seluma 2011-2014

Tabel 2.15.
Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Seluma tahun 2012-2014

Tenaga Kesehatan	2012	2013	2014
1. Dokter Spesialis	1	1	-
2. Dokter Umum	33	11	19
3. Dokter Gigi	1	2	1
4. S-2 Kesehatan	4	4	1
5. Apoteker	17	4	7
6. S-1 Farmasi	9	4	2
7. Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)	72	89	77

Tenaga Kesehatan	2012	2013	2014
8. Sarjana Keperawatan (S. Kep)	20	29	155
9. Akademi Keperawatan (AKPER)	83	76	-
10. Akademi Kebidanan (AKBID)	5	98	173
11. Tenaga Gizi	10	7	6
12. Perawatan Kesehatan/SPK/SPR	54	54	155
13. Perawat Gigi (SPRG)	6	8	7
14. D1 Bidan	105	83	80
15. Sanitasi (AKL/APK/SPPH)	8	4	3
16. Penata Rontagen (APR)	6	-	1
17. Asisten Apoteker (AA)	18	15	13
18. Pegawai (SLTA)	25	27	26
19. SPPM	-	-	-
20. Analis Kesehatan	10	8	-
21. S-1 Non Kesehatan	9	7	6
22. D III Rekam Medis	2	-	-
23. D III Perawat Gigi	-	-	-
24. S-2 Non Kesehatan	-	-	-
25. Fisioterapis	3	-	-
26. Analis Lab	5	3	7
27. Tenaga Kesehatan Lainnya	-	-	3
Jumlah/	506	534	742

Sumber : Seluma Dalam Angka, 2015

Pada Tahun 2014, jumlah tenaga kesehatan sebagian besar terletak pada akademi kebidanan (AKBID) sebesar 173 orang, sedangkan dokter umum mengalami penurunan dari tahun 2012 sebanyak 33 orang menjadi 19 orang pada tahun 2014. Dan tenaga apoteker dari 17 tahun 2012 menjadi 7 orang pada tahun 2014. Kebutuhan akan tenaga kesehatan yang handal masih dibutuhkan di Kabupaten Seluma.

2.1.3.2.4 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Dalam kurun waktu 2012-2014, secara keseluruhan Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Seluma mengalami peningkatan dari 30,64% pada tahun 2012 menjadi 69,74% pada tahun 2014. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Seluma walaupun belum mencapai SPM Bidang Kesehatan yang diamanatkan dalam Keputusan Menkes RI No. 828/Menkes/SK/IX/2008 yaitu sebesar 80% sudah mendekati target SPM tersebut.

Lebih rinci lagi, enam kecamatan pada tahun 2014 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sudah memenuhi SPM Bidang Kesehatan yaitu Kecamatan Talo (84,75%), Kecamatan Ilir Talo (81,60%), Kecamatan Seluma Selatan (93,02%), Kecamatan Seluma Barat (84,27%) Kecamatan Sukaraja (95,54%) dan Kecamatan Air Periukan (88,64%). Kecamatan-kecamatan lainnya masih perlu penanganan yang intensif untuk meningkatkan indikator ini.

Tabel 2.16.
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

KECAMATAN	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		
	2012	2013	2014
KAB. SELUMA	30.64	60.93	69.74
SEMIDANG ALAS MARAS	2.07	21.10	65.84
SEMIDANG ALAS	14.06	34.27	42.81
TALO	12.24	89.36	84.75
ILIR TALO	8.56	83.62	81.60
TALO KECIL	2.37	12.38	45.69
ULU TALO	19.46	4.59	11.81
SELUMA	9.71	14.29	55.56
SELUMA SELATAN	12.20	32.05	93.02
SELUMA BARAT	14.93	96.39	84.27
SELUMA TIMUR	80.00	78.95	46.57
SELUMA UTARA	39.02	117.35	33.33
SUKARAJA	52.24	89.42	95.54
AIR PERIUKAN	79.92	88.58	88.64
LUBUK SANDI	24.10	60.48	53.49

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Seluma 2012-2014

2.1.3.2.4 Proporsi Kelahiran Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih

Secara keseluruhan Cakupan Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Kabupaten Seluma dalam periode 2012-2014, cenderung stabil di angka $\pm 90\%$. Cakupan Kelahiran yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Kabupaten Seluma dapat dikatakan memenuhi SPM Bidang Kesehatan yang diamanatkan dalam Keputusan Menkes RI No. 828/Menkes/SK/IX/2008 yaitu sebesar 90%.

Berdasarkan SPM Kementerian Kesehatan, salah satu indikator SPM kesehatan Kabupaten Seluma yang telah mencapai cakupan 100% antara lain 1) cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, 2) Cakupan pelayanan tumbuh kembang anak balita (19-59 bulan), 3) cakupan desa siaga aktif, 4) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan oleh sarana kesehatan (RSUD Tais). Dan 5) Cakupan penderita DBD yang ditangani.

Tabel 2.17.
Indikator Kesehatan Tahun 2010 – 2015

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kesehatan						
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,94	-	4,45	3,31	-	4,53
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child	0,98	0,93	0,93	0,84	-	0,85

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Immunization (UCI)						
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	-	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	60,51	32,85	58,33	75,65	-	27,47
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	-	-	-	100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	-	-	-
Cakupan kunjungan bayi	-	-	83,05	-	87,61	225,36
Cakupan puskesmas	671,43	671,43	671,43	671,43	828,57	692,86
Cakupan pembantu puskesmas	25,25	25,25	27,93	27,47	28,02	27,47
rasio poliklinik per satuan penduduk	-	-	-	-	-	0,01
rasio pustu per satuan penduduk	0,26	-	0,24	0,23	-	0,24

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Tahun 2015

Tabel 2.18.
Cakupan Indikator SPM Kabupaten Seluma Tahun 2010-2015

No.	INDIKATOR -SPM	REALISASI						SASARAN						CAKUPAN SPM					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (mendapat pelayanan kehamilan paling sedikit 4 kali sesuai standar)	5,178	3,166	3,688	3,585	3,585	3,466	5,705	4,323	4,062	4,062	4,062	4,109	90.76	73.24	90.79	88.26	88.26	84.35
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	230	286	674	674	674	538	5,705	825	812	812	812	4,109	4.03	34.67	83.00	83.00	83.00	13.09
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	4,278	2,675	3,463	3,447	3,437	3,415	5,444	4,125	3,878	3,876	3,878	4,109	78.58	64.85	89.30	88.93	88.63	83.11
4	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (masa 6 sampai 42 jam pasca persalinan)	4,278	1,471	3,457	3,347	3,347	3,036	5,444	4,125	3,878	3,876	3,878	3,922	78.58	35.66	89.14	86.35	86.31	77.41
5	Cakupan Neonatus (bayi umur 0-28 hari) dengan Komplikasi yang Ditangani	33	207	192	356	356	406	5,185	785	739	477	477	4,109	0.64	26.37	25.98	74.63	74.63	9.88
6	Cakupan Kunjungan Bayi	4,274	3,422	3,444	3,381	3,313	3,037	5,185	3,906	3,693	4,255	4,255	3,515	82.43	87.61	93.26	79.46	77.86	86.40
7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (desa/kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar secara lengkap pada bayi >= 80%)	196	188	186	170	156	172	202	199	199	200	200	200	97.03	94.47	93.47	85.00	78.00	86.00
8	Cakupan Pelayanan Pemantauan Tumbuh-Kembang Anak Balita (12-59 bulan)	538	3,311	15,03	11,653	13,268	7,964	26,536	4,132	19,024	13,447	13,268	18,128	2.03	80.13	79.01	86.66	100.00	43.93
9	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	0	0	0	0	1,9	0	5,185	0	9,525	0	4,255	10,748	0.00	0.00	0.00	0.00	44.65	0.00
10	Cakupan Balita Gizi	0	11	17	10	8	25	26,536	11	17	10	8	18,748	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.13

No.	INDIKATOR -SPM	REALISASI						SASARAN						CAKUPAN SPM					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Buruk Mendapat Perawatan																		
11	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Kelas I SD dan Setingkat oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih (guru UKS/ dokter kecil)	0	4,573	4,48	41,032	86	0	0	5,012	25,913	4,001	20,224	3,623	0.00	91.24	17.29	1,025.54	0.43	0.00
12	Cakupan Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur	5,495	22,297	26,659	36,927	27,412	26,53	37,99	37,775	36,929	27,412	36,929	38,143	14.46	59.03	72.19	134.71	74.23	69.55
13	Angka Penemuan Acute Flacid Paralysis (lumpuh layuh mendadak) per 100.000 penduduk < 15 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	216,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	0	0	35	46	46	908	0	0	220	1,501	18,842	18,748	0.00	0.00	15.91	3.06	0.24	4.84
15	Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	167	60	90	261	261	208	0	60	9	0	2,501	2,671	0.00	100.00	1.00	0.00	10.44	7.79
16	Cakupan Penderita DBD yang ditangani	4	24	26	10	0	12	0	10	32	0	10	12	0.00	240.00	81.25	0.00	0.00	100.00
17	Cakupan Penemuan Penderita Diare	2,334	1,093	1,775	696	77	988	7,309	1,093	9,306	0	4,626	3,992	31.93	100.00	19.07	0.00	1.66	24.75
18	Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas/Balai Pengobatan/Praktek bersama dan Perorangan)	19,944	16,335	19,344	62	0	5,343	96,727	16,335	88,763	70,572	0	0	20.62	100.00	21.79	0.09	0.00	0.00
19	Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit/BKMM/BKPM/BKIM)	1	867	3,126	431	0	0	96,727	0	88,763	70,572	0	0	0.00	0.00	3.52	0.61	0.00	0.00

No.	INDIKATOR -SPM	REALISASI						SASARAN						CAKUPAN SPM					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kab/Kota	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
21	Cakupan Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 jam	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	Cakupan Desa Siaga Aktif	33	44	121	200	174	431	174	174	174	45	200	200	18.97	25.29	69.54	444.44	87.00	215.50

Sumber : Analisis Data

2.1.3.3 Pekerjaan Umum

2.1.3.3.1 Infrastruktur Jalan

Transportasi yang ada di Kabupaten Seluma sebagian besar hanya berupa transportasi jalan raya. Moda transportasi lainnya seperti transportasi air, transportasi udara, atau transportasi kereta api tidak tersedia di Kabupaten Seluma. Jalan di Kabupaten Seluma terbagi berdasarkan status pertanggung jawaban jalan, yaitu jalan nasional (105,9 Km), jalan provinsi (169,5 Km), jalan kabupaten (530,8 Km), dan jalan lingkungan kabupaten (537,7 Km). Total panjang ruas jalan di Kabupaten Seluma mencapai 1.343 Km.

Tabel 2.19.
Panjang Ruas Jalan di Kab. Seluma Menurut Status Jalan

Status Jalan	Panjang Jalan (Km)
Jalan Nasional	105.9
Jalan Provinsi	169.5
Jalan Kabupaten	530.8
Jalan Lingkungan	537.7
Jumlah	1343.9

Sumber :Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma, 2015

**DATA DASAR RUAS JALAN KABUPATEN
KABUPATEN SELUMA**

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)						
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH			
1	1	SR 01	BETUNGAN	SR 03	TABALAGAN	2.700	4	-		80	RR	20	RS	-
2	2	SR 04	TABALAGAN	SR 06	KUTIAGUNG	3.250	4	-		2	RR	98	RS	-
3	3	SR 07	AIR PETAI	SR 10	BETUNGAN	2.350	4	-		-		100	RR	-
4	4	SR 09	BABATAN	SR 11A	PADANG KUAS	3.700	4	-		35	RR	65	RR	-
5	5	SR 11	PADANG KUAS	SR 02	AIR KEMUNING	580	4	-		-		100	RR	-
6	6	SR 13	BABATAN	SR 14	PADANG SERAI	1.800	4	-		-		100	RS	-
7	7	SR 09 A	BABATAN	SR 13 A	BABATAN (PULAU SARI)	2.200	3	-		55	RR	45	RS	-
8	8	SR 15	JENGGALU	SR 16	PADANG SERAI	6.200	4	-		100	RB	-		-
9	9	SR 17	JENGGALU	SR 21	RIAK SIABUN	6.300	4	-		50	RS	50	RR	-
10	10	SR 22	CAHAYA NEGERI	SR 23A	PUSAT DESA (BP 1)	2.300	4	100	B	-		-		-
11	11	SR 23A	BP 1	SR 34	BP2	3.550	4	-		65	RB	35	RS	-
12	12	SR 24	SARIMULYO	AP 09	TAWANG REJO	5.550	4	-		25	RS	75	RS	-
13	13	SR 23	SIDOLUHUR	SR 27	SIDOSARI	1.100	4	-		100	RB	-		-
14	14	SR 26	CAHAYA NEGERI	SR 35	KAYU ARANG	3.850	4	-		95	RB	5	RS	-
15	15	SR 38	JL NASIONAL (SIMPANG NIUR)	SR 45	PADANG PELAWI	2.900	4	-		100	RB	-		-
16	16	SR 40	JL NASIONAL (KAYU ARANG)	SR 39	PEREMPATAN DESA NIUR	600	4	-		-		100	RS	-
17	17	SR 43	JL NASIONAL (LUBUK SAHUNG)	SR 45	PADANG PELAWI	2.400	4	-		100	RB	-		-
18	18	SR 45	PADANG PELAWI	AP 15	TALANG SEBARIS	7.800	4	-		10	RS	90	RS	-
19	19	SR 46	JL NASIONAL (LUBUK SAHUNG)	AP 01	TALANG BENUANG	1.800	4	-		100	RS	-		-
20	20	SR 44	PERBATASAN LUBUK SAHUNG	AP 14	SUKARAJA PERLUASAN	1.800	4	-		100	RB	-		-

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)							
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH				
21	21	SR 47	JL NASIONAL (SUARAJA)	AP 20	LUBUK GILANG	2.950	3	-		100	RB	-		-	
22	22	AP 03A	SUKAMAJU	AP 02	TALANG BENUANG	1.300	4	-		100	RS	-		-	
23	23	AP 12	SUKAMAJU	AP 04	LOKASI BARU	1.100	4	-		100	B	-		-	
24	24	AP 03	JL NASIONAL (SUKAMAJU)	AP 06	SUMBEREJO	3.800	4	-		100	RR	-		-	
25	25	AP 28	SUKASARI	AP 29	DERMAYU	2.200	3	-		-		100	RR	-	
26	26	AP 11	JL PROPINSI (KUNGKAI BARU)	AP 09	TAWANG REJO	2.700	4	-		100	RB	-		-	
27	27	AP 26	JL PROPINSI (LAWANG AGUNG)	AP 09	TAWANG REJO	5.650	4	-		100	RS	-		-	
28	28	AP 24	JL PROPINSI (KEBAN AGUNG)	AP 06	SIMPANGAN KE SUMBER REJO	4.000	3	-		-		100	RR	-	
29	29	AP 18	JL NASIONAL (AIR PERIUKAN)	AP 21	PERTIGAAN KE TALANG ALAI	4.600	4	-		100	RS	-		-	
30	30	AP 23	JL NASIONAL (PADANG PELASAN)	LS 02	TALANG ALAI	7.700	4	-		55	RB	45	RR	-	
31	31	LS 01	JL NASIONAL (GUNUNG AGUNG)	LS 03	SIMPANGAN KE TALANG GIRING	4.350	4	-		6	RB	94	RS	-	
32	32	LS 03	TALANG ALAI	LS 04	TALANG GIRING	7.300	3	-		-		100	RS	-	
33	33	LS 03	TALANG ALAI	LS 09	NAPAL JUNGUR	4.600	3	-		-		100	RS	-	
34	34	LS 06	JL NASIONAL (RENA PANJANG)	LS 10	NAPAL JUNGUR	6.100	4	100	B	-		-		-	
35	35	LS 10	NAPAL JUNGUR	LS 12	SIMPANGAN JALAN BATU BARA	2.300	4	-		20	RB	80	RB	-	
36	36	LS 10	NAPAL JUNGUR	LS 12 A	ARANG SAPAT	4.000	4	30	B	70	RB	-		-	
37	37	LS 12 A	ARANG SAPAT	LS 14	CAWANG	4.700	4	-		85	RB	15	RB	-	
38	38	LS 14	CAWANG	LS 16	PADANG CAPO ULU	12.100	3	-		-		100	RB	-	
39	39	LS 15	PADANG CAPO ILIR	LS 17	PADANG CAPO ILIR UJUNG	1.150	3	-		-		100	RB	-	
40	40	LS 18	TUMBUAN	LS 19	MINGGIR SARI	3.200	3	-		-		100	RB	-	
41	41	SB 03 A	JL NASIONAL (LUNJUK)	LS 19 A	MINGGIR SARI	7.600	4	-		-		100	RB	-	
42	42	LS 20	TUMBUAN	LS 21	TALANG KEBUN	8.700	4	-		-		44	RS	56	RB

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)							
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH				
43	43	LS 11	NAPAL JUNGUR	LS 22	TALANG KEBUN UJUNG	6.500	3	-		70	RB	30	RB	-	
44	44	SB 01	JL NASIONAL (SENGKUANG JAYA)	LS 22	TUGU PERBATASAN TALANG KEBUN	6.000	4	-		-		100	B	-	
45	45	SB 03	JL NASIONAL (LUNJUK)	SB 05	PIR 7 (CURUP TINGGI)	7.200	4	-		20	B	80	RB	-	
46	46	SB 06	TALANG TINGGI	SU 20	TALANG RAMI	6.400	4	20	B	-		80	RS	-	
47	47	SB 08 A	JL NASIONAL (AIR LATAK)	SS 06 A	PEREMPATAN PADANG RAMBUN	2.050	3	-		40	RR	60	RS	-	
48	48	SB 08 B	PERTIGAAN IRIGASI(AIR LATAK)	SS 12 A	PURBOSARI	4.200	3	-		30	RR	70	RS	-	
49	49	SB 08	PAGAR AGUNG	SB 10	TALANG PERAPAT	4.300	4	-		100	RB	-		-	
50	50	SB 10	PERTIGAAN TALANG PERAPAT	SB 11 A	PURBOSARI	1.500	4	-		80	B	20	RR	-	
51	51	SK 27	NAPAL	SS 03	SIMPANG KE PADANG RAMBUN	1.850	6X2	100	B	-		-		-	
52	52	SS 10 A	MANDI ANGIN	SS 07	SIDOMULYO (SD)	750	4	-		-		90	RB	10	RB
53	53	SS 03	SIMPANG KE PADANG RAMBUN	SS 05	PADANG RAMBUN (SD 57)	1.700	4	100	B	-		-		-	
54	54	SS 05	PADANG RAMBUN (SD 57)	S5 06	TANJUNG SELUAI	1.200	4	25	B	75	RS	-		-	
55	55	SS 06	TANJUNG SELUAI	SB 10	PERTIGAAN TALANG PERAPAT	3.000	4	-		100	RS	-		-	
56	56	SS 05	PADANG RAMBUN	SK 09	SIMPANG DISNAKER	2.000	3	100	B	-		-		-	
57	57	SS05 A	PADANG RAMBUN	SS 06	TANJUNG SELUAI	2.000	4	15	RS	85	RB	-		-	
58	58	SS 03	SIMPANG KE PADANG RAMBUN	SS 08	SIDOMULYO (LIKU 3)	1.650	4	100	B	-		-		-	
59	59	SK 26	PASAR TAIS	SS 22	PASAR SELUMA	11.250	4	100	B	-		-		-	
60	60	SS 09	SIMPANG SLB	SS 16	RIMBO KEDUI	2.000	4	100	B	-		-		-	
61	61	SS 10	SENGKUANG	SS 12	TANJUNGAN	1.150	4	-		-		100	RS	-	
62	62	SS 12	TANJUNGAN	SS 13	TANGGA BATU	750	3	-		100	B	-		-	
63	63	SS 15	TANGGA BATU	SS 17	RIMBO KEDUI UJUNG	1.700	4	85	B	15	RS	-		-	
64	64	SS 14	TANGGA BATU	SS 19	PERKEMBANGAN	4.500	4	55	B	-		45	RS	-	

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)							
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH				
65	65	SS 20	SUKARAMI	SS 19	PERKEMBANGAN	2.400	3	-		10	RS	90	RS	-	
66	66	SK 01	DUSUN BARU	SU 20	TALANGRAMI	4.100	4	-		70	RB	30	RS	-	
67	67	SK 04	TALANG SALING	SK 20	RUMAH DINAS BUPATI AMPAR GADING	2.000	6X2	100	B	-		-		-	
68	68	SK 20	RUMAH DINAS	ST 03	BALAI ADAT AMPAR GADING	1.600	4	-		65	RB	35	RB	-	
69	69	SK 07	SIMPANG ENAM	SS 02	SIMPANG KANTOR DKP	2.800	6X2	100	B	-		-		-	
70	70	SK 09A	TALANG SALING	SK 09	PUSAT PEMERINTAHAN	1.550	4	3	B	35	RB	62	RB	-	
71	71	SK 09	PEMATANG AUR (DISNAKER)	SK 14	MANDI ANGIN	1.300	4	-		-		100	RB	-	
72	72	SK 07	SIMPANG ENAM	SK 10	PEMATANG AUR	2.200	6X2	-		-		100	RB	-	
73	73	SK 07	SIMPANG ENAM	SK 01A	TALANG DANTUK	4.500	14	-		-		-		100	RB
74	74	SK 11	TALANG SALING	SS 01	MANDI ANGIN	2.650	6X2	-		-		100	RB	-	
75	75	SK 15	LUBUK LINTANG	SK 22	JL. NASIONAL (LUBUK KEBUR)	2.100	4	100	B	-		-		-	
76	76	SK 11 A	TALANG SALING	SK 05	RUMAH DINAS (JL. PANCOR RADEN)	1.100	4	-		-		100	RS	-	
77	77	SK 23	SIMPANGAN KE BENDUNG	ST 02	BUNGA MAS	800	3	-		100	RR	-		-	
78	78	SK 16	LUBUK KEBUR	SK 20	RUMAH DINAS	1.570	4	100	B	-		-		-	
79	79	ST 01	BUNGA MAS	SU 01 A	PANDAN	4.500	4	40	B	60	RB	-		-	
80	80	ST 05	BUNGA MAS	ST 04	SIMPANG KE BALAI ADAT	2.600	6X2	-		-		100	RB	-	
81	81	ST 06	BUNGA MAS SEMBAYAT	ST 10	KOTA AGUNG	4.750	6X2	-		-		100	RB	-	
82	82	ST 11	SELEBAR	SU 05	SIMPANG	6.750	4	-		-		100	RB	-	
83	83	SU 05	PEREMPATAN DESA SIMPANG	ST 20 A	LAPANGAN TEMBAK	7.500	8	-		-		-		100	RB
84	84	ST 13 A	KUNDURAN	ST 15	TRANSBANDEP	2.400	3	-		45	RS	55	RS	-	
85	85	ST 14	TALANG SALI	ST 15 A	TRANSBANDEP	1.700	3	-		-		100	RS	-	
86	86	ST 13	TALANG SALI	ST 16	TENANGAN	3.800	4	-		100	RB	-		-	

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)						
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH			
87	87	ST 16	TENANGAN	ST 18	RAWASARI	3.750	4	-		100	RB	-		-
88	88	ST 18	RAWASARI	SS 11	TANJUNGAN	2.150	3	-		-		100	RS	-
89	89	ST 20	TALANG SALI	UT 03	PAGAR	14.000	4	-		-		100	RB	-
90	90	SU 01 A	PANDAN	SU 07	PUGUK	4.800	4	-		100	RB	-		-
91	91	SU 01	TUGU AMD	SU 03	SELINGSINGAN	2.500	4	-		100	RS	-		-
92	92	SU 02	SELINGSINGAN	SU 07	PUGUK	2.500	4	-		-		100	RB	-
93	93	SU 03	SELINGSINGAN	SU 04	SIMPANG	3.000	3	-		-		100	RB	-
94	94	SU 03	SELINGSINGAN	UT 08	MEKARJAYA	14.000	4	-		-		100	RB	-
95	95	SU 07	PUGUK	SU 10	LUBUK RESAM	13.400	4	-		100	RB	-		-
96	96	SU 10	LUBUK RESAM	SU 11	SINAR PAGI	6.700	8	-		-		5	RB	95 RB
97	97	SU 10	LUBUK RESAM	SU 22	SEKALAK	9.700	4	-		-		100	RB	-
98	98	SU 14	PUGUK	SU 17	BUKIT PENYAMBUNGAN	5.400	4	-		5	RS	95	RB	-
99	99	SK 02	PERTIGAAN DUSUN BARU	SK 21	SIMPANG BALAI ADAT	4.900	4	-		70	RB	30	RB	-
100	100	SU 20	TALANG RAMI	SU 16	TALANG BERINGIN	5.400	4	-		60	RS	40	RB	-
101	101	SU 15	SIMPANG TALANG BERINGIN	SU 22	SEKALAK	8.000	4	-		-		100	RB	-
102	102	SU 22	SEKALAK	LS 22	PERTIGAAN TUGU TALANG KEBUN	10.800	4	-		-		100	RB	-
103	103	TI 01	AIR TERAS	TI 04	AIR PAYANGAN	4.000	4	-		-		100	RB	-
104	104	TI 02	AIR TERAS	TI 03	BATU TUGU	2.000	4	-		-		100	RB	-
105	105	TI 04	AIR PAYANGAN	IT 03	TANAH ABANG	2.700	4	-		-		100	RB	
106	106	TI 01 A	TEBING PENAGO (AIR TERAS)	IT 05 A	TALANG KABU	9.000	4	-		-		100	RB	
107	107	TI 07	JL. NASIONAL (BUNUT TINGGI)	TI 08	LUBUK NGANTUNGAN	2.500	4	85	B	15	RB	-		-
108	108	TI 10	MASMAMBANG	TI 11	MASMAMBANG (JALAN LINGKAR)	2.900	4	-		100	RS	-		-

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)						
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH			
109	109	TI 03	MASMAMBANG	TK 03	LUBUK LAGAN	3.500	8	-	-	-	-	100	RB	
110	110	IT 06	TALANG PANJANG	IT 05	TALANG KABU	2.900	4	-	100	RB	-	-		
111	111	IT 05	TALANG KABU	IT 04 A	PALUAH TERAP	2.800	4	100	B	-	-	-		
112	112	IT 04 A	PALUAH TERAP	IT 03	TANAH ABANG	3.900	4	100	B	-	-	-		
113	113	IT 03	TANAH ABANG	IT 01	RAWA INDAH	5.700	3	10	B	60	RB	30	RB	-
114	114	IT 07	PADANG CEKUR	IT 09	PENAGO SATU	2.500	4	-	100	B	-	-		
115	115	IT 10	TALANG PANJANG	IT 11	DUSUN BARU	4.000	4	-	100	RB	-	-		
116	116	IT 01 A	JL. PROPINSI (RAWA INDAH)	IT 04 A	PENAGO DUA	6.150	3	-	-	-	100	RB	-	
117	117	UT 01	SIMPANG NAPAL MELINTANG	UT 92 A	HARAPAN MULYA (TRANS)	3.200	3	-	40	RB	60	RS	-	
118	118	TI 08	LUBUK NGANTUNGAN	UT 05	AIR KERUH	9.000	4	-	100	RB	-	-		
119	119	UT 05	AIR KERUH	UT 08	MEKARJAYA	6.600	4	-	70	RB	30	RS	-	
120	120	UT 08	MEKARJAYA	UT 13	PAGAR BANYU	10.800	4	-	10	8	90	RS	-	
121	121	UT 05	TANJUNG AGUNG	UT 13	PAGAR BANYU	2.350	4	-	-	-	100	RS	-	
122	122	UT 12	MUARA SIMPUR	UT 15	MUARA NIBUNG	2.300	4	-	-	-	100	RB	-	
123	123	UT 13	PAGAR BANYU	TK 06	SIMPANG BATU BALAI	8.850	4	-	-	-	100	RS	-	
124	124	TK 01	NAPALAN	TK 04	SUNGAI PETAI	4.700	4	-	60	RR	40	RS	-	
125	125	TK 04	SUNGAI PETAI	TK 05 A	BATU BALAI	8.000	4	-	-	-	7	RS	93	RB
126	126	TK 05 A	TRANS BATU BALAI	TK 06	SIMPANGAN KE BATU BALAI	2.000	4	-	-	-	100	RB		
127	127	TK 02	LUBUK LAGAN	SA 09	AIR MELANCAR	13.300	4	-	5	RB	15	RS	80	RB
128	128	TK 07	SUKAMERINDU	TK 08	TALANG PANJANG	1.100	3	-	100	RB	-	-		
129	129	TK 07 A	JL.NASIONAL (TABA)	TK 07 B	JL. PROPINSI (PRING BARU)	7.700	4	100	RS	-	-	-		
130	130	TK 09	SUKAMERINDU (BITASAN)	SA 09	AIR MELANCAR	6.900	4	-	-	-	100	B	-	

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)					
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH		
131	131	SA 09 A	SIMPANGAN AIR MELANCAR	TK 05 A	TRANS BATU BALAI	4.500	4	-	-	100	B	-	
132	132	TK 06	SIMPANG BATU BALAI	SA 11	GUNUNG MEGANG	2.100	4	-	-	40	RB	60	RB
133	133	SA 01	JALAN SMPN 1	SA 01 B	PASAR PAJAR BULAN	850	3	-	100	RR	-	-	
134	134	SA 02 A	PINJU LAYANG	SA 02 C	SENDAWAR	1.900	3	-	100	B	-	-	
135	135	SA 01 C	PINJU LAYANG	SA 01 D	NANJUNGAN	2.800	3	-	40	RS	60	RS	-
136	136	SA 01 A	JL. PROPINSI (PAJAR BULAN)	SA 05	TALANG DURIAN	3.500	4	-	100	RB	-	-	
137	137	SA 05	TALANG DURIAN	SA 13	SP 2	7.900	4	-	52	RB	48	RB	-
138	138	SA 09	AIR MELANCAR	SA 08	CUGUNG LANGU	2.900	4	-	15	B	-	85	RB
139	139	SA 08	CUGUNG LANGU	SA 10	GUNUNG MEGANG	4.900	3	-	-	100	RB	-	
140	140	SA 05	TALANG DURIAN	SA 12	PONDOK UDEN	7.500	4	-	70	RS	30	RB	-
141	141	SA 07	TALANG DURIAN	SA 08	CUGUNG LANGU	1.500	3	-	-	100	RB	-	
142	142	SA 06	TALANG DURIAN	SA 09 B	AIR MELANCAR	3.100	3	-	-	100	RB	-	
143	143	SA 13 A	MUARA DUA	SA 14	NAPALAN	1.500	3	-	-	100	RS	-	
144	144	SA 15	KEMANG MANIS	SA 16	GAJAH MATI SATU	1.500	4	-	100	RS	-	-	
145	145	SA 13	MUARA DUA	SA 18	GUNUNG MEGANG	7.700	4	-	25	RB	75	RB	-
146	146	SA 13	SP 2	SA 13 B	TALANG KEDURANG	4.100	3	-	-	100	RB	-	
147	147	SA 02 A	NANTI AGUNG	SA 03 B	SUBAN	9.500	3	-	-	100	RB	-	
148	148	SA 03 A	JL. PROPINSI (TEBAT GUNUNG)	SA 03 B	SUBAN	12.000	3	-	15	RB	85	RB	-
149	149	SA 03	TEBAT GUNUNG	SA 04	DATARAMAN	1.300	3	-	-	100	RR	-	
150	150	SAM 02	KARANG ANYAR	SAM 01	JL.NASIONAL	1.500	4	-	100	RS	-	-	
151	151	SAM 03	KANTOR CAMAT	SAM 04	SMAN 6	900	3	-	100	RR	-	-	
152	152	SAM 08	UJUNG PADANG	SAM 09	PEMATANG RIDING	1.250	4	-	64	B	36	RR	-

NO	LINK	TITIK AWAL		TITIK AKHIR		PANJANG (m)	LEBAR (m)	PERKERASAN/KONDISI (%)								
		KODE	NAMA DESA	KODE	NAMA DESA			HOTMIK	LAPEN	KORAL	TANAH					
153	153	SAM 10	UJUNG PADANG	SAM 10 A	TEMATANG BATU (TPI)	2.300	3	-		22	B	78	RB	-		
154	154	SAM 11	TEDUNAN	SAM 07	UJUNG PADANG	4.100	3	-		100	RS	-		-		
155	155	SAM 11 A	TEDUNAN	SAM 11B	PANTAI MARAS	1.300	3	-		100	RS	-		-		
156	156	SAM 14	KETAPANG BARU	SAM 17	TALANG ALAI	6.700	3	-		30	RB	70	RB	-		
157	157	SAM 18	JL. PROPINSI (JAMBAT AKAR)	SA 02 B	PADANG SERUNAIAN	8.800	3	-		-		100	RB	-		

KETERANGAN NOTASI KONDISI JALAN :

1. B : BAGUS
2. RR : RUSAK RINGAN
3. RS : RUSAK SEDANG
4. RB ; RUSAK BERAT

2.1.3.3.2 Tempat Peribadatan

Tempat peribadatan Kabupaten Seluma telah merata di seluruh kecamatan baik masjid/musholla, gereja maupun pura. Sebagaimana dirangkum dalam tabel dibawah ini, jumlah tempat peribadatan proporsional dengan jumlah penduduk di kecamatan yang bersangkutan.

Tabel 2.20.
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Provinsi Bengkulu, 2014

Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja	Pura
Semidang Alas				
Maras	32	1	-	-
Semidang Alas	25	2	-	-
Talo	16	9	-	-
Ilir Talo	27	19	2	-
Talo Kecil	18	5	-	-
Ulu Talo	25	22	1	4
Seluma	15	9	-	-
Seluma Selatan	20	20	2	-
Seluma Barat	17	16	5	-
Seluma Timur	15	13	-	-
Seluma Utara	21	10	-	-
Sukaraja	62	32	15	2
Air Periukan	37	45	5	4
Lubuk Sandi	22	6	-	-
Kab. Seluma	352	209	30	10

Sumber : Seluma Dalam Angka, 2015

2.1.3.3.3 Irigasi

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nop.2093 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi Kabupaten Seluma, terdapat 87 Daerah Irigasi di Kabupaten Seluma. Daerah irigasi tersebut tersebar di 12 Kecamatan.

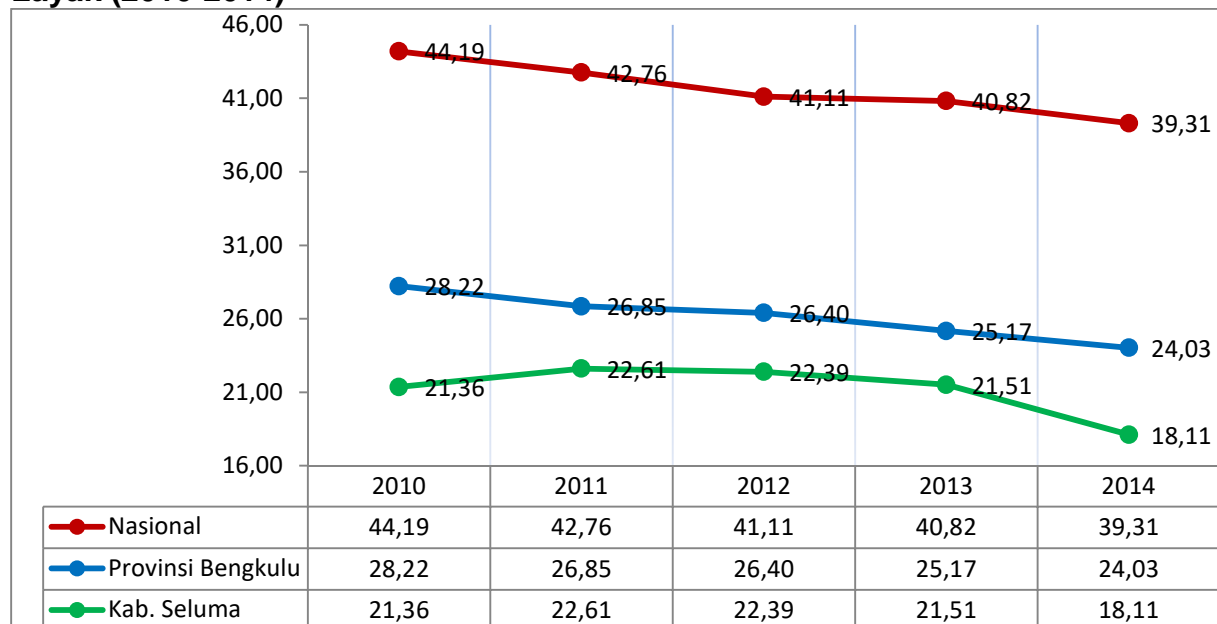
Luas irigasi dalam kondisi rusak berat mencapai 1.477 Ha. Sedangkan luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 6.413 Ha. Dengan demikian persentase luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 81,28%

2.1.3.3.4 Perumahan

2.1.3.3.4.1 Air Bersih

Persentase rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Seluma menunjukkan kecenderungan menurun selama kurun tahun 2010 – 2014. Pada tahun 2014 proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Seluma menurun menjadi 18,11% dari 21,51% pada tahun 2013. Pada gambar 2.24 disajikan perkembangan proporsi rumahtangga dengan air minum layak di Kabupaten Seluma selama kurun tahun 2010 – 2014. Selain itu, capaian Kabupaten Seluma masih tertinggal dari capaian rata-rata Provinsi Bengkulu dan nasional. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian serius untuk periode RPJMD berikutnya.

Gambar 2.22: Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (2010-2014)

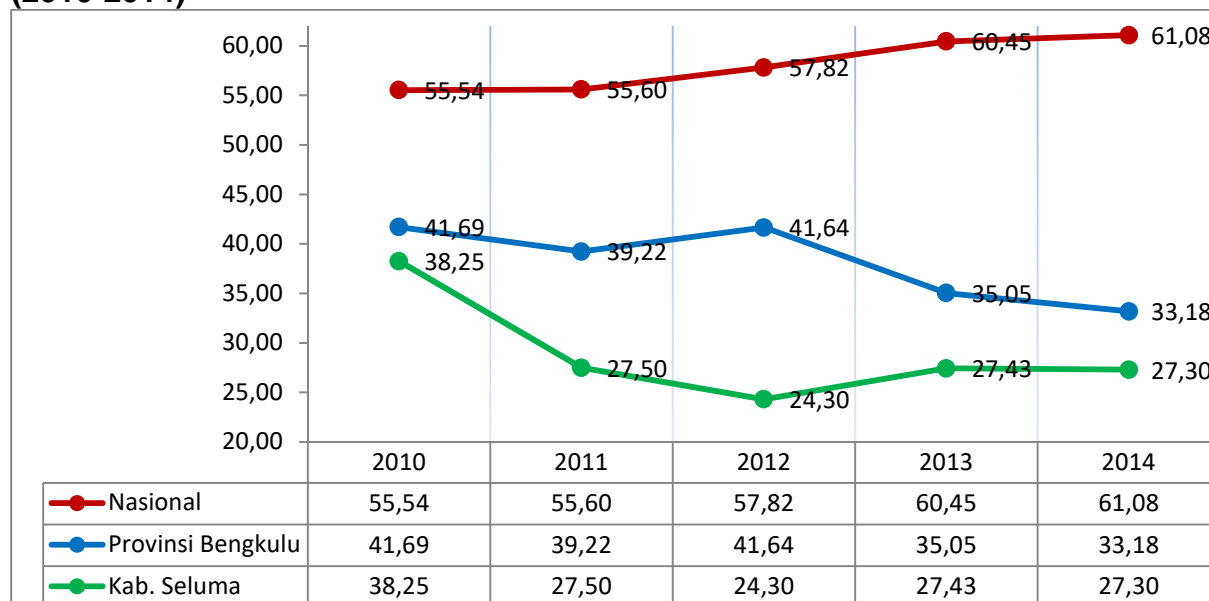


Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K 2016

2.1.3.3.4.2 Sanitasi

Selama kurun waktu 2010-2014, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Seluma cenderung menurun dari 38,25% pada tahun 2010 menjadi 27,30% pada tahun 2014. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Sementara itu capaian nasional menunjukkan peningkatan. Dengan demikian, sanitasi harus menjadi prioritas utama dalam periode RPJMD ini.

Gambar 2.3 :Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (2010-2014)



Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K 2016

2.1.3.3.4.3 Listrik

Proporsi rumah tangga dengan Jaringan Listrik PLN di Kabupaten Seluma pada tahun 2012-2014 menunjukkan peningkatan dari 83,42% (2012) menjadi 87,36% (2014). Dengan demikian, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Seluma telah mempunyai akses terhadap listrik. Namun demikian, Proporsi rumah tangga dengan Jaringan Listrik PLN tersebut masih perlu ditingkatkan terutama untuk desa-desa tertinggal.

Tabel 2.21.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2012-2014

Tahun	Sumber Penerangan					Jumlah
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Petromak/ Aladin	Pelita/ Senter	Lainnya	
2012	83.42	4.29	0.85	9.41	2.03	100.00
2013	86.51	5.09	0.18	8.01	0.21	100.00
2014	87.36	7.61	0.00	4.78	0.25	100.00

Sumber : Susenas (2012-2014)

2.1.3.3.4.4 Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan data tahun 2014, di Kabupaten Seluma terdapat 4.669 rumah tidak layak huni. Kecamatan Sukaraja, Semidang Alas Maras dan Kecamatan Semidang

Alas merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak yaitu masing-masing 798, 716 dan 630 unit.

Tabel 2.22.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Semidang Alas Maras	716
Semidang Alas	630
Talo	132
Ilir Talo	479
Talo Kecil	217
Ulu Talo	332
Seluma	170
Seluma Selatan	243
Seluma Barat	196
Seluma Timur	223
Seluma Utara	256
Sukaraja	798
Air Periukan	-
Lubuk Sandi	277
Total	4669

Sumber :Seluma Dalam Angka 2014

2.1.3.3.4.5 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Selama kurun waktu 2012-2014, cakupan KB aktif di Kabupaten menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 cakupan peserta KB aktif mencapai 70,07% dari total pasangan usia subur. Pada tahun 2014 jumlah ini meningkat menjadi 75,35% dengan rincian yang dirangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.23.
Cakupan peserta KB aktif

KECAMATAN	CAKUPAN PESERTA KB AKTIF		
	2012	2013	2014
KAB. SELUMA	70.07	74.23	75.35
SEMIDANG ALAS MARAS	72.23	73.93	83.17
SEMIDANG ALAS	81.26	83.27	87.70
TALO	90.38	80.40	73.80
ILIR TALO	80.44	79.03	82.47
TALO KECIL	69.61	75.63	86.87

KECAMATAN	CAKUPAN PESERTA KB AKTIF		
	2012	2013	2014
ULU TALO	47.64	81.84	26.93
SELUMA	30.16	48.85	61.20
SELUMA SELATAN	4.98	79.51	68.88
SELUMA BARAT	88.71	29.28	69.92
SELUMA TIMUR	60.95	67.55	82.09
SELUMA UTARA	66.80	61.62	71.98
SUKARAJA	79.59	86.89	78.69
AIR PERIUKAN	81.77	64.82	55.90
LUBUK SANDI	76.34	89.13	99.74

Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

Tabel 2.24.
Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, 2014

Kabupaten/ Kota	KKB	PPKBD
Bengkulu Selatan	48	158
Rejang Lebong	45	175
Bengkulu Utara	61	272
Kaur	19	197
Seluma	30	207
Mukomuko	38	169
Lebong	18	113
Kepahiang	23	115
Bengkulu Tengah	32	156
Kota Bengkulu	77	67
Provinsi Bengkulu	391	1.629
2013	370	1.670
2012	390	1.670
2011	382	1.654
2010	359	1.566

Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

2.1.3.3.4.6 Sosial

Pada tahun 2014 terdapat 24 kasus bencana yang tercatat. 13 kasus berupa bencana kebakaran, 1 kasus bencana longsong, 6 kasus bencana banjir, dan 4 kasus bencana puting beliung. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seluma mencapai 6.952 penyandang dimana sebagian besarnya berupa rumah tidak layak huni.

Tabel 2.25.
Jumlah Bencana di Kabupaten Seluma Menurut Kecamatan, 2014

Kecamatan	Kebakaran	Longsor	Banjir	Putting Beliung
Semidang Alas Maras	1	-	-	-
Semidang Alas	1	-	-	-
Talo	1	1	-	-
Iilir Talo	-	-	-	-
Talo Kecil	1	-	-	-
Ulu Talo	1	-	-	1
Seluma	-	-	-	1
Seluma Selatan	2	-	1	1
Seluma Barat		-	-	-
Seluma Timur	1	-	-	-
Seluma Utara	-	-	-	-
sukaraja	1	-	-	-
Air Periukan	1	-	3	1
Lubuk Sandi	3	-	2	-
Jumlah	13	1	6	4

Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

Tabel 2.26.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kab. Seluma
Menurut Kecamatan, 2014

Kecamatan	Anak Terlantar	Penyandang Cacat	Mantan Narapidana
Semidang Alas Maras	215	182	-
Semidang Alas Talo	282	74	23
Iilir Talo	-	118	-
Talo Kecil	31	50	-
Ulu Talo	62	58	27
Seluma	79	15	4
Seluma Selatan	23	26	11
Seluma Barat	70	57	37
Seluma Timur	4	40	15
Seluma Utara	25	69	10
sukaraja	54	48	6
Air Periukan	55	102	4
Lubuk Sandi	-	6	-
Jumlah	960	980	139

Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Seluma pada tahun 2014 sebagian besar berada di Kecamatan Semidang Alas Maras dengan anak terlantar berjumlah 215 orang, dan penyandang cacat sebanyak 182 orang.

Tabel 2.27.
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kab. Seluma
Menurut Kecamatan, 2014

Kecamatan	Rumah Tidak Layak Huni	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial
Semidang Alas Maras	716	-	-
Semidang Alas Talo	630	59	3
Iilir Talo	132	-	-
Talo Kecil	479	-	-
Ulu Talo	217	-	-
Seluma	332	-	-
	170	-	-

Kecamatan	Rumah Tidak Layak Huni	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial
Seluma Selatan	243	-	-
Seluma Barat	196	31	1
Seluma Timur	223	1	4
Seluma Utara	256	-	-
sukaraja	798	8	-
Air Periukan	-	-	-
Lubuk Sandi	277	1	-
Jumlah/ Total	4.669	102	8

Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

2.1.3.3.5 Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

2.1.3.3.8.1 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin, selama Keluarga tersebut memenuhi kewajibannya. Tujuannya adalah membantu keluarga sangat miskin untuk memastikan generasi berikutnya sehat dan menyelesaikan pendidikan dasar. Adapun Komponen Peserta PKH adalah Ibu Hamil/Nifas, Anak Usia Di bawah Lima Tahun, Anak Usia pra sekolah, Anak SD dan sederajat, Anak SMP dan sederajat dan Anak SMA dan sederajat.

Tabel 2.28.
Jumlah Penerima Manfaat PKH

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT PKH				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	AIR PERIUKAN	-	-		164	162
2	ILIR TALO	507	503	474	438	437
3	LUBUK SANDI	-	-	-	118	121
4	SELUMA BARAT	-	-	-	149	151
5	SELUMA SELATAN	-	-	-	275	277
6	SELUMA TIMUR	-	-	-	213	213
7	SELUMA UTARA	-	-	-	356	348
8	SEMIDANG ALAS	309	318	301	281	280
9	SEMIDANG ALAS MARAS	338	353	328	272	269
10	SUKARAJA	-	-	-	298	297
11	TALO	-	-	-	230	227
12	TALO KECIL	-	-	-	302	300
13	ULU TALO	351	364	318	294	291
14	SELUMA	-	-	-	-	-
JUMLAH		1505	1538	1421	3390	3373

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Seluma, 2015

Sampai dengan September 2015 PKH diselenggarakan di desa-desa yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seluma kecuali Kecamatan Seluma. Kecamatan Seluma belum mendapat alokasi PKH dikarenakan jumlah penerima manfaat kurang dari 100 RTM. Namun demikian, pihak Dinas Sosial pada tahun 2015 telah mengajukan proposal agar RTM di Kecamatan Seluma mendapatkan alokasi PKH.

2.1.3.3.8.2 Bantuan Siswa Miskin

Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran program sekolah. Pada tahun 2014, Kabupaten Seluma mendapatkan alokasi Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diperuntukkan bagi setiap jenjang pendidikan. Pada tahun 2014 Untuk SD, sebanyak 308 murid mendapatkan alokasi BSM dan 447 murid SMP mendapatkan alokasi BSM. Untuk pendidikan menengah, 1058 murid SMA dan 631 murid SMK mendapatkan alokasi BSM.

Tabel 2.29.
Jumlah Penerima Manfaat BSM

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT BSM			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	AIR PERIUKAN	-	21	258	64
2	ILIR TALO	57	34	33	
3	LUBUK SANDI	6	7	-	
4	SELUMA BARAT	20	20	-	
5	SELUMA SELATAN	47	27	82	27
6	SELUMA TIMUR	-	45	-	217
7	SELUMA UTARA	52	30	-	
8	SEMIDANG ALAS	0	34	0	20
9	SEMIDANG ALAS MARAS	13	66	258	
10	SUKARAJA	29	59	83	
11	TALO	49	56	175	218
12	TALO KECIL	2	40	-	
13	ULU TALO	33	8	0	85
14	SELUMA	-	-	169	-
JUMLAH		308	447	1058	631

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma , 2015

2.1.3.3.8.3 Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Di Kabupaten Seluma sampai dengan tahun 2015, terdapat 14.878 pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan penanda keluarga miskin. Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal dengan Program RASKIN. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Tabel 2.38.
Jumlah Pemegang KPS

KECAMATAN	PEMEGANG KPS
AIR PERIUKAN	994
ILIR TALO	1296
LUBUK SANDI	954
SELUMA	346
SELUMA BARAT	537
SELUMA SELATAN	996
SELUMA TIMUR	761
SELUMA UTARA	1263
SEMIDANG ALAS	1601
SEMIDANG ALAS MARAS	2019
SUKARAJA	1696
TALO	852
TALO KECIL	891
ULU TALO	672
Total	14878

Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K 2016

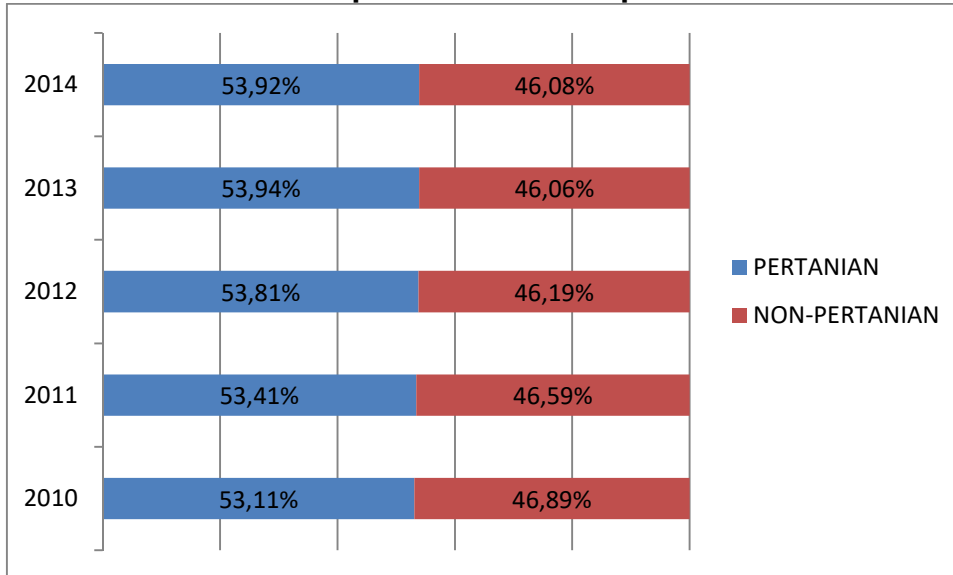
2.1.4 Fokus urusan pilihan

2.1.4.1 Pertanian

Ditinjau dari segi kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB, sebagaimana terlihat dalam tabel 2.26 dibawah ini secara umum sektor pertanian menyumbang $\pm 53\%$ dari total PDRB selama kurun waktu 2010-2014. Dengan kata lain sektor

pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Seluma dan diharapkan kedepannya dapat menjadi motor penggerak aktivitas perekonomian.

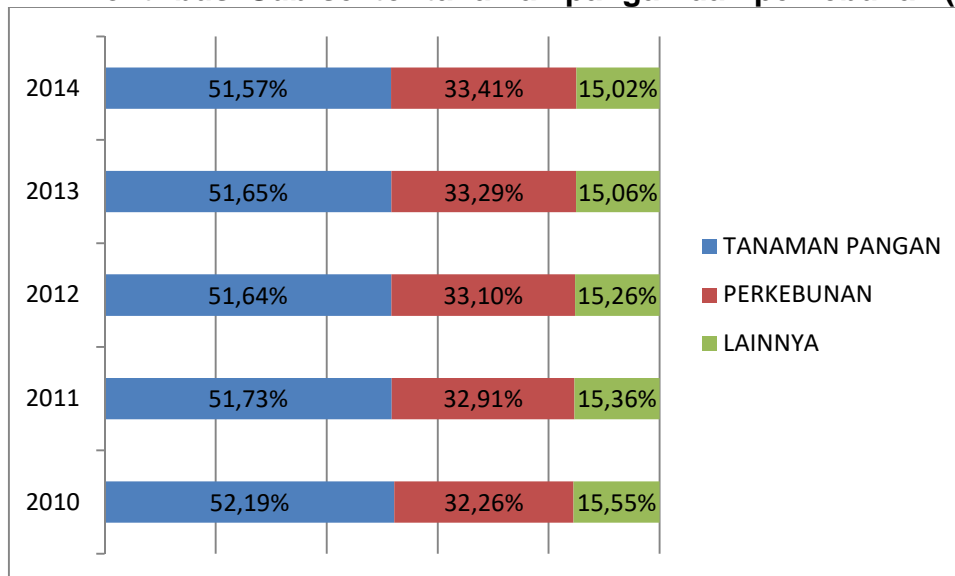
Tabel 2.1 : Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB 2010-2014



Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

Jika dilihat lebih rinci lagi (lihat gambar 2.27), selama periode 2010-2014 sub-sektor tanaman pangan merupakan kontributor terbesar bagi sektor pertanian yaitu rata-rata ±52% pertahun. Sementara itu perkebunan menjadi sub-sektor penyumbang kedua bagi sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi sebesar 46% per tahun. Sub-sektor lainnya (peternakan, perikanan dan kelautan) berkontribusi rata-rata 15% per tahun.

Tabel 2.2 : Kontribusi Sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan (2010-2014)



Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

Disisi produktifitas, produksi padi di Kabupaten Seluma pada tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan produksi tahun 2013. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dan hama sehingga banyak petani yang mengalami penurunan jumlah produksi. Penurunan produksi pada komoditas padi terjadi baik pada padi sawah maupun pada padi ladang.

Komoditas jagung dan ubi kayu masih mendominasi sektor palawija di Kabupaten Seluma, dengan total produksi mencapai 1.308 ton dan 1.398 ton. Sedangkan komoditas palawija lainnya memiliki produksi dibawah 500 ton pada tahun 2014.

Perkebunan rakyat di Kabupaten Seluma masih didominasi oleh komoditas kelapa sawit dan karet. Luas perkebunan kelapa sawit dan karet jauh mendominasi dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu adanya pabrik pengolahan kelapa sawit dan karet di Kabupaten Seluma sehingga petani tidak kesulitan dalam menjual produk perkebunannya. Selain itu, produksi kelapa sawit dan karet yang lebih stabil dan proses pemeliharaan yang lebih mudah juga membuat kelapa sawit lebih diminati oleh para petani di Kabupaten Seluma.

Bidang peternakan ternak kecil dan besar di Kabupaten Seluma pada tahun 2014 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah populasi berbagai ternak yang ada di Kabupaten Seluma. Peningkatan terbesar terjadi pada

populasi kambing yang meningkat sebesar 20,95% jika dibandingkan dengan populasi tahun 2013. Selain kambing, populasi ternak sapi juga mengalami peningkatan.

Populasi ternak yang mengalami penurunan yaitu populasi kerbau dan babi yang turun sebesar 41,28 % dan 14,70 %.Setelah mengalami penurunan jumlah populasi ternak pada tahun 2013. Populasi ternak unggas mengalami peningkatan jumlah populasi pada tahun 2014 meskipun persentase peningkatannya tidak terlalu besar.Populasi ayam buras mengalami peningkatan hingga 13,61 % sedangkan populasi ayam ras dan itik mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,38 % dan 0,01 %.

Tabel 2.30.
Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Seluma
Menurut Jenis Sawah, 2012 - 2014

Jenis Sawah	2012	2013	2014
Padi Sawah			
Luas Panen (Ha)	21.371	21.114	20.108
Produksi (Ton)	83.462	82.727	61.609
Padi Ladang			
Luas Panen (Ha)	774	431	1.048
Produksi (Ton)	1.733	997	1.830
Jumlah			
Luas Panen (Ha)	22.145	21.545	21.156
Produksi (Ton)	85.195	83.724	63.439

Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

Tabel 2.31.
Luas Panen dan Produksi Palawija di Kabupaten Seluma
Menurut Jenis Tanaman, 2014

Jenis Palawija	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Jagung/ <i>Maize</i>	384	1.308
Kedelai/ <i>Soyabeans</i>	159	165
Kacang Tanah/ <i>Peanuts</i>	110	139
Kacang Hijau/ <i>Small Green Pea</i>	41	40
Ubi Kayu/ <i>Cassava</i>	116	1.398
Ubi Jalar/ <i>Sweet Potato</i>	46	444

Sumber : Seluma Dalam Angka, BPS

Tabel 2.32.
Luas Tanaman (Ha) Perkebunan Rakyat di Kabupaten Seluma Menurut Jenis Tanaman dan Status Tanaman, 2012 - 2014

Tanaman	2012		2013		2014	
	TBM	TM	TBM	TM	TBM	TM
Cengkeh	-	9	-	9	-	9
Kopi	797	6.823	794	6.817	794	6.817
Kelapa	235	850	141	982	141	982
Lada	12	44	6	42	6	42
Karet	4.005	20.704	4.008	20.909	4.034	20.909
Kayu Manis	77	9	11	54	9	49
Aren	2	30	2	30	2	30
Kapuk	1	29	-	28	-	28
Kemiri	-	5	-	41	-	4
Kelapa Sawit	10.557	21.088	10.261	20.910	10.288	20.910
Coklat	229	632	218	645	218	634
Pinang	56	402	57	405	57	405

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Seluma

TBM = Tanaman Belum Menghasilkan/ *Non Producing Plants*

TM = Tanaman Menghasilkan/ *Producing Plants*

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Tabel 2.33.
Produksi (Ton) Perkebunan Rakyat di Kabupaten Seluma Menurut Jenis Tanaman Tahun 2011 – 2013

Tanaman	2011	2012	2013
Cengkeh	4	2	2
Kopi	4.810	4.912	4.908
Kelapa	1.129	1.131	1.311
Lada	30	31	30
Karet	25.817	25.580	26.136
Kayu Manis	-	10	52
Aren	28	22	28
Kapuk	22	10	2
Kemiri	1	1	1
Kelapa Sawit	67.274	67.280	66.807
Coklat	587	521	531
Pinang	186	187	158

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Seluma

Tabel 2.34.
Populasi Ternak dan Unggas di Kab. Seluma Menurut
Jenis Ternak Tahun 2012 – 2014

Jenis Ternak/ Cattle or Avian	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
Sapi Potong / <i>Beef Cattle</i>	13.315	15.630	16.801
Kerbau / <i>Buffalo</i>	833	763	448
Kambing / <i>Goat</i>	61.321	75.431	91.234
Domba / <i>Sheep</i>	586	608	642
Babi / <i>Pig</i>	9.129	4.756	4.507
Ayam Buras / <i>Local Chicken</i>	1.678.970	809.573	919.757
Ayam Ras / <i>Chicken</i>	789.680	713.994	730.987
Itik / <i>Duck</i>	25.370	14.629	14.630

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Seluma

2.1.4.2 Pariwisata

Bidang perhotelan mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak beberapa tahun ke belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, 2 hotel baru buka secara resmi di Kabupaten Seluma. Dengan dibukanya 2 hotel tersebut, maka pada tahun 2014 sudah terdapat 3 hotel melati di Kabupaten Seluma. Hotel-hotel tersebut yaitu: 1. Hotel Sartika 2. Hotel Rizky 3. Hotel Amanda.

Kabupaten Seluma memiliki banyak potensi obyek wisata. Karena bentuk geografis kawasannya, Kabupaten Seluma memiliki banyak variasi obyek wisata yang bisa ditawarkan. Wilayah bagian barat yang berbatasan langsung dengan samudra Indonesia menyediakan obyek wisata pantai. Sedangkan wilayah bagian timur Kabupaten Seluma yang berupa daerah perbukitan menyediakan obyek pariwisata pegunungan.

Tabel 2.35.
Banyaknya Hotel dan Akomodasi Lainnya di Kabupaten Seluma
Menurut Kecamatan, 2014

Kecamatan/ District	Hotel Berbintang/ Classified Hotels	Hotel Melati/ Unclassified Hotels	Akomodasi Lainnya/ Other Accommodations
(1)	(2)	(3)	(4)
Semidang	-	-	-
Alas Maras	-	-	-
Semidang	-	-	-
Alas	-	-	-

Kecamatan/ <i>District</i>	Hotel Berbintang/ <i>Classified Hotels</i>	Hotel Melati/ <i>Unclassified Hotels</i>	Akomodasi Lainnya/ <i>Other Accommodations</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Talo	-	-	-
Iilir Talo	-	-	-
Talo Kecil	-	-	-
Ulu Talo	-	-	-
Seluma	-	3	-
Seluma Selatan	-	-	-
Seluma Barat	-	-	-
Seluma Timur	-	-	-
Seluma Utara	-	-	-
sukaraja	-	-	-
Air Periukan	-	-	-
Lubuk Sandi	-	-	-
Jumlah/ Total	-	3	-

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Seluma

Tabel 2.36.
Nama-nama Objek Wisata di Kabupaten Seluma

Objek Wisata/ <i>Recreational Spots</i>	Alamat/ <i>Locations</i>	
	Desa/ <i>Village</i>	Kecamatan/ <i>Districts</i>
(1)	(2)	(3)
Wisata Pantai		
Pantai Muara Kungkai	Kungkai	Air Periukan
Pantai Muara Ngalam	Ngalam	Air Periukan
Pantai Muara Penago	Penago	
Pantai Muara Penago Baru	Baru	Iilir Talo
Pantai Penago	Marga Sari	Iilir Talo
Pantai Seluma	Pasar	
Pantai Ketapang Baru	Seluma	Seluma Selatan
	Ketapang Baru	Semidang Alas
		Maras
Wisata Air Terjun		
Air Terjun Kroya	Kroya	Sukaraja
	Air	
Air Terjun Melancar	Melancar	Semidang Alas

Objek Wisata/ Recreational Spots	Alamat/ Locations	
	Desa/ Village	Kecamatan/ Districs
(1)	(2)	(3)
Air Terjun Cughup	Lubuk	
Embun	Resam	Seluma Utara
Air Terjun Batu		
Bekinyau	Lunjuk	Lubuk Sandi
Air Terjun Lubuk	Lubuk	
Resam	Resam	Seluma Utara
Air Terjun Simpurn		
Besar	Giri Nanto	Ulu Talo
Air Terjun Palua ijang	Puguk	Seluma Utara
Wisata Bendungan		
	Lubuk	
Bendungan Seluma	Bintang	Seluma
	Pajar	
Bendungan Alas	Bulam	Semidang Alas
Wisata Arum Jeram		
Arum Jeram Lubuk	Lubuk	
Resam	Resam	Seluma Utara
Wisata Air Panas		
	Lubuk	
Suban Lubuk Resam	Resam	Seluma Utara
Suban Giri Nanto	Giri Nanto	Ulu Talo
Wisata Gua		
	Lubuk	
Gua Lubuk Resam	Resam	Seluma Utara

Sumber: Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Seluma

2.1.4.3 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Seluma merupakan daerah pesisir pantai yang memiliki potensi perikanan yang besar. Selain itu di Kabupaten Seluma juga terdapat banyak sungai dan perairan yang berpotensi untuk perikanan air tawar. Produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2014 sebesar 830 ton dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Sedangkan produksi perikanan tangkap sebesar 146 ton dengan nilai 7 miliar rupiah. Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Seluma mencapai 5.456 ton yang terdiri dari 2.717 ton dari budidaya kolam air tawar dan 2.739 ton dari budidaya tambak. Potensi tambak di Kabupaten Seluma mencapai 1.222 Ha dengan potensi terbesar ada di Kecamatan Ilir Talo dengan 374 Ha.

Tabel 2.37.
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kab. Seluma
Menurut Jenis Perikanan, 2014

Jenis Perikanan Tangkap/ <i>Fishery Type</i>	Produksi (Ton)/ <i>Production</i> (Tons)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)/ Production Value (Million Rupiahs)
1)	(2)	(3)
Perikanan Tangkap di Laut/ <i>Marine Fishery</i>	830	12.963
Perikanan Tangkap di Perairan Umum/ <i>Inland Fishery</i>	146	7.420

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Seluma

Tabel 2.38.
Produksi (Ton) Perikanan Budidaya di Kab. Seluma
Menurut Jenis Perikanan Budidaya, 2014

Jenis Perikanan Budidaya/ <i>Aquaculture Type</i>	Produksi (Ton)/ <i>Production</i> (Tons)
(1)	(2)
Budidaya Kolam Air Tawar/ <i>Fresh Water Ponds</i>	2.717
Budidaya Tambak/ <i>Brockish Water</i> <i>Ponds</i>	2.739

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Seluma

Tabel 2.39.
Potensi Perikanan Budidaya (Ha) Air Payau dan Laut di Kab. Seluma
Menurut Kecamatan, 2014

Kecamatan/ District	Potensi Air Payau/ Potency of Brackish Water	Potensi Laut/ Potency of Sea
(1)	(3)	(4)
Semidang Alas Maras	162	18
Semidang Alas Talo	-	-
Iilir Talo	374	15
Talo Kecil	36	3
Ulu Talo	-	-
Seluma	-	-
Seluma Selatan	181	3
Seluma Barat	126	3
Seluma Timur	-	-
Seluma Utara sukaraja	108	5
Air Periukan	235	15
Lubuk Sandi	-	-
Jumlah/ Total	1.222	62

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Seluma

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Pengeluaran perkapita dari tahun 2012 sebesar Rp.6.807.000 hingga tahun 2014 mengalami kenaikan Rp.6.894.000, kenaikan pengeluaran perkapita diikuti oleh kenaikan IPM dan Angka harapan hidup.

Tabel 2.45.
Nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Variabelnya di Kab. Seluma Tahun 2012 - 2014

Keterangan	2012	2013	2014	2015
Indeks Pembangunan Manusia	61,55	62,1	62,94	63,41
Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,38	66,39	66,4	66,70
Estimasi Lama Sekolah (Tahun)	11,62	12,03	12,55	12,59
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,11	7,13	7,37	7,38
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rupiah)	6.807	6.870	6.894	7.077

Sumber : BPS, 2016

Terkait dengan iklim usaha di Kabupaten Seluma dalam periode 2011-2015, secara keseluruhan terjadi kenaikan yang signifikan pada jumlah kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Pada tahun 2011, jumlah kredit yang disalurkan adalah 50,6 Milyar Rupiah. Angka ini meningkat drastis pada tahun 2015 menjadi 172,5 milyar Rupiah. Dengan kata lain terjadi peningkatan penyaluran kredit usaha sebesar 121.9 Milyar dalam lima tahun (2011-2015). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Seluma semakin membaik.

Tabel 2.46.
Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum (Rp. Juta)

Kriteria Usaha	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Seluma	50,596	84,491	107,264	142,985	172,538
- Mikro	14,160	26,007	32,827	56,079	87,229
- Kecil	23,335	29,847	41,102	50,472	50,498
- Menengah	13,101	28,637	33,335	36,435	34,812

Sumber : Bank Indonesia,

2.2 Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Kabupaten Seluma Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016 – 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benar-benar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun dan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Proses tersebut sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Seluma. Oleh karenanya, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu harus dilakukan secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas.

RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politik, top-down, bottom-up dan partisipatif dengan demikian RKPD menjadi dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan yang mencerminkan hasil karya seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan cerminan keterkaitan antar program daerah dan Program Pemerintah

Pusat. Oleh karena itu agar RKPD ini dapat diimplementasikan dan tercapai hasil yang optimal maka dalam proses evaluasi ini lebih terfokus pada evaluasi RKPD tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma terutama untuk kegiatan yang penting dan strategis.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Seluma merupakan proses yang melibatkan multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Seluma secara proporsional. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut benar-benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

Tujuan Pembangunan di Kabupaten Seluma adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Seluma lahir dan bathin serta mengupayakan tidak terjadinya ketimpangan baik dari sisi sosial ekonomi maupun lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini maka pembangunan dilakukan dengan memperhatikan posisi geografi dan potensi demografi, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mengoptimalkan faktor-faktor lingkungan strategis lainnya.

Dalam perspektif pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016 – 2021. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan ditentukan oleh kinerja seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat serta seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Seluma, dukungan dari Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kerjasama dengan Kota/Kabupaten sekitar Kabupaten Seluma.

2.2.2 Kinerja Umum Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 merupakan implementasi tahun pertama pada periode RPJMD Kabupaten Seluma periode 2016-2021. APBD tahun 2016 disusun berdasarkan RKPD tahun 2016 yang merupakan penjabaran dengan target kinerja yang diukur berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Seluma tahun anggaran 2016 telah melaksanakan 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan serta 7 urusan pemerintahan penunjang. Dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut Pemerintah Kabupaten Seluma mem 141 program dengan pagu anggaran

belanja langsung Rp. 227.073.725.899 Dalam pelaksanaannya, belanja langsung APBD yang terealisasi adalah sebesar Rp. 237.551.141.038.

Pencapaian sasaran yang merupakan perwujudan dari tujuan pembangunan di Kabupaten Seluma pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

2.2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016

Tabel 2.40.
Capaian Indikator Sasaran Utama RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian s.d 2015	Tahun 2016			Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Capaian s.d 2016 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	%	45	75	30	40	85	40
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih (%)	%	18,11	19,92	8	40	29,17	35
3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)	%	27,30	30,03	18	20	43,97	17
4	Panjang saluran Irigasi dalam Kondisi Baik/Sedang (m)	m	99.024	103,975	62.362	60	126.383	55
5	Jumlah Desa tertinggal/sangat tertinggal dengan jalan koral (desa)	desa	45	45	35	78	0	75
6	APS usia 13-15 tahun (%)	%	97,95	98,05	90	92	0,985391712	90
7	APS usia 16-18 tahun (%)	%	72,56	76,81	74,56	97,07		
8	Prosentase tenaga pendidik SMP yang sudah tersertifikasi (%)	%	59,30	62,27	58,63	94	75,68	89
9	APK usia 13-15 tahun (%)	%	90,49	90,58	85,78	96	91,03	88
10	APK usia 16-18 tahun (%)	%	73,86	76,81	73,43	94	76,34	80
11	APM usia 13-15 tahun (%)	%	79,41	79,49	70,08	85	79,89	83
12	APM usia 16-18 tahun (%)	%	60,33	62,74	49,54	79	76,34	75
13	Angka Putus Sekolah usia 13-15 (%)		2,05	1,948	1,603	1,453	1,507	1,453
14	Angka Putus Sekolah usia 16-18 (%)		26,20	24,89	19,34	17,84	19,26	15,73
15	Prosentase tenaga pendidik SD yang sudah tersertifikasi (%)		72,70	76,34	52,63	69	92,75	66
16	Angka Kematian Ibu perseratus ribu kelahiran hidup		118,6	106,74	101,24	42	98,45	42
17	Angka Kematian Bayi perseribu kelahiran		2,67	2,65	1,65	62	2,56	58
18	Angka kematian Balita perseribu kelahiran hidup		14	13,78	9	65	12,95	58
19	Prosentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)	%	89,65	90,64	35	39	94,69	39
20	rasio dokter perseribu penduduk		0,11	0,14	0,05	36	11	29
21	prosentase desa yang memiliki bidan desa		86,36	88,95	71	80	0,34	78
22	rasio posyandu per seribu balita		14,55	16,73	14,53	87	29,27	77
23	Rasio anggaran program	%	0,48	0,67	0,40	60	2,58	57

No	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian s.d 2015	Tahun 2016			Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Capaian s.d 2016 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	promotif terhadap total anggaran kesehatan (%)							
24	Prosentase gizi buruk (%)	%	0,15	0,147	0,087	59	0,136	58
25	Angka kejadian DBD per seratus ribu penduduk		18,20	15,5	3	19	8,1	26
26	Angka kejadian malaria per seribu		0,78	0,66	0,45	68	0,35	64
27	Prosentase kasus rabies yang sudah ditangani (%)	%	50	50	35	64	50	65
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih (%)	%	18,11	19,92	15	75	41,31	70
29	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak (%)	%	27,30	30,03	21	70	43,97	67
30	Jumlah Produksi Padi sawah dalam satu tahun (ton)	ton	81.755	105.662	79.065	75	219.101,56	73
31	Jumlah Produksi Padi ladang dalam satu tahun (ton)	ton	1.342	12,51	9	72	14	67
32	Jumlah Produksi Jagung dalam satu tahun (ton)	ton	3.650					
33	Jumlah Produksi Kedelai dalam satu tahun (ton)	ton	1.305					
34	Produktivitas Padi sawah (ton/ha/tahun)		3,53					
35	Produktivitas Padi ladang (ton/ha/tahun)		1,94					
36	Produktivitas Jagung (ton/ha/tahun)		4,65					
37	Produktivitas Kedelai (ton/ha/tahun)		2,12					
38	Indeks Pertanaman (IP) tanaman padi sawah (%)	%	1,10	1,26	0,99	79	1,88	72
39	Luas lahan sawah irigasi (ha)	ha	4.950	5.400	3500	65	7200	61
40	Luas lahan sawah tadah hujan (ha)	ha	10.309	10.000	7.500	75	13.157,19	70
41	Jumlah produksi tanaman hortikultura kurun waktu satu tahun (ton)		842,33	846,33	656,73	78	862,33	72
42	luas lahan areal tanaman hortikultura (ha)		802,31					
43	Produktivitas per hektar tanaman hortikultura (ton/ha/tahun)		1,05	846,33	636,73	75	862,33	70
44	Populasi Sapi (ekor)		18.122					
45	Populasi Kerbau (ekor)		373	802,21	535,76	67	862,33	63
46	Populasi Kambing (ekor)		107.684	1,05	0,96	83	1,07	79
47	Populasi Ayam ras (ekor)		748.529					
48	Populasi Ayam buras (ekor)		1.032.250	1.317	850	65	2.072,51	65
49	Populasi Itik (ekor)		14.580	124,32	75	60	195,62	57
50	Jumlah kelahiran ternak sapi (ekor)		1.176					
51	Angka kematian ternak besar (ekor)		111					
52	Jumlah kasus penyakit zoognosis (kasus)		102	114,24	55	48	179,76	42
53	Persentase jumlah ternak diobati (%)		40	44,80	28	63	70,49	47
54	Jumlah produksi Kelapa sawit dalam satu tahun		66.630	55.435	47.283	85	93.236,01	82

No	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian s.d 2015	Tahun 2016			Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Capaian s.d 2016 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	(ton)							
55	Jumlah produksi Karet dalam satu tahun (ton)		2.516	5,0	3	60	6,35	57,5
56	Jumlah produksi kopi dalam satu tahun (ton)		4.908	68.023	43	63	68.890	60
57	Produktivitas perhektar Kelapa sawit (ton/ha/tahun)		3,14	0,0061	0,0023	38	0,0074	35
58	Produktivitas perhektar Karet (ton/ha/tahun)		1,25	0,0112	0,0002	17	0,0136	12
59	Produktivitas perhektar kopi (ton/ha/tahun)		0,72	0,0052	0,001	19	0,0082	14
60	Luas lahan tanaman perkebunan (ha)		68.840	0,0003	0,00008	27	0,0003	16
61	Rasio alat dan mesin tanam tanaman pangan (unit/ha)		0,0107	0,0112	0,0102	0,0102	0,0136	0,0101
62	Rasio alat dan mesin panen tanaman pangan (unit/ha)		0,0064	0,0067	0,0065	0,0065	0,0082	0,0065
63	Rasio alat dan mesin pengolahan hasil tanaman pangan (unit/ton)		0,0003	0,0003	0,0002	0,0002	0,0003	0,0002
64	Rasio jalan usaha tani (meter/ha)		1.280	1,300	850	65	1,630	60
65	Rasio jalan sentra produksi (meter/ha)		1,920	2,000	1,000	50	2,450	45
66	Ratio bangunan sumber-sumber air pada lahan sawah tadah hujan (unit/ha)		0,020	0,018	0,007	39	0,02	33
67	Jumlah pelaku usaha agrobisnis		2	10	5	50	90	48
68	Peningkatan kualitas Kelompok Tani/Gapoktan		350	400	225	56	2.950	49
69	Peningkatan kualitas Kelompok Tani/Gapoktan (kelompok)		160	5	2	40	25	40
70	Tenaga IB		4					
71	jumlah desa rawan pangan dengan prioritas 1 dan 2		65	55	46	84	35	80
72	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	%	44	46	40	87	76	83
73	Produksi Perikanan (Ton)		1.699,3	1.729,8	1452,6	84	2.451,5	84
74	Peningkatan Produksi Produk Olah Perikanan (Ton)	ton	200	207,3	165,53	80	262,53	80
75	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (%)	%	9,95	10,21	8	8	11,28	8
76	Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (%)		10,24	10,50	8	8	11,50	8
77	Tingkat Perkembangan Sentra-Sentra Perikanan (Unit)	unit	14	15	10	67	26	67
78	Jumlah Armada Tangkap Berukuran 5 GT Ke bawah (Unit)	unit	165	174	90	52	253	52
79	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya (%)	%	23	35	24	24	55	24
80	Persentase Masyarakat Nelayan Yang Memahami Sistem Antisipasi Mitigasi	%	5	5	25	63	50	60

No	Indikator Kinerja Utama	Sat	Capaian s.d 2015	Tahun 2016			Kondisi Akhir RPJMD (2021)	Capaian s.d 2016 Terhadap Kondisi Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
	Bencana (%)							
81	Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan (orang)	orang	3.840	3.898	10%	10%	100 %	10 %
82	jumlah verifikasi dan validasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun		1	2	1	50	9	50
83	persentase perempuan dan anak KDRT yang tertangani (%)		85	90	72	72	100	72
84	Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPDP (%)		50 %	55 %	20 %	20 %	100 %	20 %
85	prosentase kesesuaian ASN berdasarkan pendidikan (%)		30 %	30 %	15 %	15 %	100 %	15 %
86	Prosentase kasus yang terselesaikan (%)		20	25	40	35	31	35
87	Prosentase tindak lanjut temuan BPK (%)		10 %	20%	25 %	30 %	50 %	30 %

Sumber : RPJMD Kabupaten Seluma 2016 – 2021

Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni berkisar 5,49 % sedangkan di tahun sebelumnya sebesar 5,81 %. Demikian juga ditahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma semakin menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya angka pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti juga oleh penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Seluma tidak berbeda jauh dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kinerja perekonomian Kabupaten Seluma mengalami perlambatan.

Tabel 2.41.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seluma dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu dan Nasional

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi		
	2013	2014	2015
Kabupaten Seluma (%)	5,74	5,30	4,34

Sumber BPS

Perlambatan kinerja perekonomian tersebut terindikasi bahwa ada beberapa sektor yang pertumbuhannya mengalami penurunan, sehingga akibat dari penurunan sektor

tersebut mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seluma. Sektor – sektor tersebut diantaranya: sektor pengadaan listrik dan gas yang tumbuh -0,89 % angka pertumbuhan tersebut turun drastis bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,67 %, hal ini kemungkinan diakibatkan berkurangnya atau terhentinya distribusi gas yang masuk ke Kabupaten Seluma sehingga mengakibatkan kelangkaan gas. Penurunan secara drastis diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor yang mengalami penurunan berikutnya adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang tumbuh sebesar 0,27 % diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,56 % hal ini mengindikasikan bahwa berkurangnya hasil produksi dari sektor tersebut.

Sedangkan sektor yang menunjukkan kenaikan pertumbuhan di tahun 2015 yakni sektor informasi dan komunikasi mengalami kenaikan dari 2,82 % ditahun 2014 menjadi 9,82 % di tahun 2015 atau meningkat sebesar 6,97 %. Kenaikan tersebut diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang meningkat dari 5,61 % di tahun 2014 menjadi 11,17 % atau meningkat sebesar 5,56 %. Dan sektor lain yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah sektor jasa lainnya yakni ditahun 2014 memberikan kontribusi 5,22 % atau meningkat menjadi 10,13 % atau bertambah sebesar 4,91 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.42.
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral menurut Lapangan Usaha

No	Uraian	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,62	4,54	0,92
2	Pertambangan dan Penggalian	4,68	9,43	-1,88
3	Industri Pengolahan	7,22	4,71	7,29
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,37	9,09	-0,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,89	0,65	0,27
6	Konstruksi	5,25	5,79	7,74
7	Perdagangan Besar dan Eceran ; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,65	5,79	8,34
8	Transportasi dan Pergudangan	1,74	7,98	8,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,02	9,97	9,2
10	Informasi dan Komunikasi	8,67	2,85	9,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65	4,73	6,46
12	Real Estate	8,07	8,78	7,69
13	Jasa Perusahaan	0,95	6,28	8,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,50	5,61	11,17
15	Jasa Pendidikan	5,76	9,62	8,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,22	8,16	9,62
17	Jasa Lainnya	5,11	5,22	10,13

Sumber: BPS Kabupaten Seluma

Tabel 2.43.
Perkembangan PDRB Tahun Dasar 2010
Periode 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
PDRB ADHK (Juta)	2,161,165	2,279,804,8	2,372,868*
PDRB ADHB (Juta)	2,588,876,8	2,896,472,9	3,198,200*
PDRB/Kapita ADHK (rupiah)	2.304.932	2.307.865*	2.312.756*
PDRB/Kapita ADHB (rupiah)	6.061.305	6.102.103*	6.073.004*

*(angka sementara

Sumber : BPS Kabupaten Seluma

Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp.27,46 milyar pada tahun 2015, menjadi Rp.63,36 milyar pada tahun 2016. Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seluma mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 61,77 persen. Melihat pertumbuhan PAD yang cukup menggembirakan ini tentunya menjadi angin segar tersendiri bagi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Seluma. Hal ini sekaligus memberi bukti bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menggalang PAD mulai menunjukkan hasil sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.2.5.

Tabel 2.44.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 – 2015

URAIAN	TAHUN (REALISASI Rp. MILYAR)					Rata - rata Pertumbuhan
	2012	2013	2014	2015	2016	
PENDAPATAN	486,4	558,01	637,04	761,3	891,8	3,67
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10,72	16,75	25,61	27,46	63,36	61,77
a Pajak Daerah	3,39	6,27	6,43	5,87	6,79	26,7
b Retribusi Daerah	0,85	0,81	2,05	1,5	1,23	25,89
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,67	1,34	1,91	2,37	3,26	
d Lain-Lain PAD yang Sah	5,79	8,32	15,2	12,5	52,07	

Sumber : BPKAD Kabupaten Seluma, 2016

Angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten Seluma untuk kelompok umur 7 – 12 tahun pada periode 2013 sebesar 99,63 % meningkat menjadi 100 % di tahun 2014. Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk 100 anak usia sekolah dasar, 100 anak diusia ini

bersekolah. Selanjutnya APS untuk usia SMP (13 – 15) tahun di tahun 2013 sebesar 97,65 % meningkat menjadi 97,95 ditahun 2014. Dan APS usia SMA (16 – 18) tahun sebesar 69,87 % ditahun 2013 dan meningkat menjadi 72,56 % ditahun 2014. Apabila diperhatikan semua usia sekolah, semakin tinggi usia sekolah Angka Partisipasi Sekolahnya semakin kecil. Meningkatnya nilai APS di Kota Batu merupakan salah satu pengaruh digulirkannya program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Tabel 2.45.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2012-2014

URAIAN	Kondisi Tahun								
	2012			2013			2014		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
APK	114,56	87,88	64,11	112,02*	86,56*	70,68*	110,35*	90,49*	73,86*
APM	95,46	56,28	52,89	93,25	72,15*	65,87*	91,73*	79,41*	60,33*
APS	97,78	97,65	69,87*	100	99,63	72,56	100	97,95	72,56

*) angka sementara

Sumber: Susenas, 2012-2014

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Seluma selama 2012–2015 cenderung mengalami penurunan. Prosentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebesar 20,08 % persen turun dari tahun 2014 sebesar 21,17 persen. Hal ini belum begitu baik bila dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu yang mencapai 16,95 persen maupun tingkat nasional yang mencapai 10,12 persen pada tahun 2015.

Tabel 2.46.

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2012 – 2015

Uraian	Tahun (%)			
	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Seluma	21,21	21,84	21,17	20,08*
Provinsi Bengkulu	17,51	17,75	17,09	16,95*
Nasional	11,66	11,47	10,96	10,12*

*)angka sementara

Sumber :Basis Data Terpadu (TNP2K, 2016)

2.2.3 Capaian Indikator Misi RPJMD Kabupaten Seluma Selama 2016-2021 Tahun Pelaksanaan Ke – 1 (Tahun 2017) Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Yang Diselenggarakan

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2016 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Seluma yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2016 – 2021. Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Seluma yang telah tersusun diterjemahkan dalam bentuk program unggulan dan prioritas daerah yang menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2016.

Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2016-2021.

Untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 pada pelaksanaan tahun ke - 1, Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma telah menetapkan program pembangunan menurut urusan, sebagai berikut:

Tabel 2.47.
Pelaksanaan Misi RPJMD 2016-2021 Tahun ke-1
Berdasarkan Program Pembangunan Menurut Urusan

MISI	SKPD Pelaksana			S*	I*	PROGRAM
Misi 01 : Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan umat beragama	1.	1.	Dinas PU dan Penataan Ruang	1	2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Keagamaan
		2.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat			
		3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Program Organisasi Keagamaan
						Program pengembangan wawasan kebangsaan
						Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
					Program Pengawasan Aliran Kepercayaan (PAKEM)	
Misi 02 Menciptakan budaya yang menerapkan nilai-nilai agama sebagai	1.	1.	Dinas Pendidikan	2	3	program Pengembangan Nilai Budaya
		2.	Dinas Lingkungan Hidup			
		2.				Program Penataan Lingkungan
						program Pengembangan Nilai Budaya

MISI		SKPD Pelaksana	S*	I*	PROGRAM		
landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan daerah serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan agama	3.						
Misi III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, efisien, efektif, professional, transparan, dan akuntabel yang di dukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi dan kolusi	1.	1.	Bagian Hukum	3	23	Program penataan peraturan perundang-undangan	
		2.	Bagian Ortala				
		3.	Dinas Kesehatan				
		2.	4.	Dinas Dukcapil			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		3.	5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
			6.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			Program penataan administrasi kependudukan
			7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			8.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
			9.	Dinas Sosial			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
			10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
			11.	Inspektorat			
			12.	BAPPEDA			
			13.	Dishubkominfo			
			14.	Sekretariat DPRD			
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Program Kerjasama Informasi dengan Mass media	
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	
						Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
						Program Pembinaan dan Pengembangan	

MISI	SKPD Pelaksana		S*	I*	PROGRAM	
					Aparatur	
					Program peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	
					Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	
Misi 04 : Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan penduduk miskin, berkualitas dan terjangkau	1.	1.	Dinas Pendidikan	3	41	
	2.	2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			Program Pendidikan Anak Usia Dini
		3.	Dinas Kesehatan			
		4.	RSUD			program Pengembangan Nilai Budaya
		5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB			
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
						Program Pendidikan Menengah
						Program Pendidikan Non Formal
						Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
						Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
						Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
						Program obat dan perbekalan kesehatan
					program upaya kesehatan masyarakat	
					Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
					Program perbaikan Gizi masyarakat	
					Program pengembangan Lingkungan Sehat	
					Program perencanaan pembangunan daerah	
					Program pencegahan dan	

MISI		SKPD Pelaksana		S*	I*	PROGRAM
						penanggulangan penyakit menular
						Program pengendalian penyakit menular
						Pengendalian Penyakit Dengan Gangguan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA
						Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
						Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang
						Kemitraan Peningkatan pelayanan kesehatan
						Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Penetapan angka Kredit (PAK) Tenaga Fungsional
						program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
						Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
						Program Keluarga Berencana
Misi V : Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua aspek kehidupan dengan memberikan perhatian utama	1.	1.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	10	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	2.					
		2.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		3.	Dinas Sosial			Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial

MISI	SKPD Pelaksana	S*	I*	PROGRAM		
kepada pembangunan perekonomian daerah yang memacu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja						
Misi VI : Mengembangkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumbu pada pengembangan potensi local unggulan melalui sinergi sektor-sektor industri, pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan	1.					
	2.	1.	Dinas pertanian	7	41	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
	3.	2.	Dinas Ketahanan Pangan			
	4.	3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	5.	4.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			
		5.				
						Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
						program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan
						Program Peningkatan Ketahanan Pangan
						program pengembangan budidaya perikanan
						program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
						Program peningkatan produksi hasil peternakan
						Program pemberdayaan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
						Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
						Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan
						Program Peningkatan kualitas bahan baku
						Program ketahanan pangan
						Program Peningkatan kesejahteraan petani
						Program peningkatan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan
						Program penataan peraturan perundang-undangan
						Program pengembangan pemasaran pariwisata
						Program Pengembangan Destinasi

MISI	SKPD Pelaksana		S*	I*	PROGRAM		
					Pariwisata		
					Program Pengembangan Pelabuhan Perikanan		
					Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan SDKP dan Bina Produk Pengolahan		
					Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		
					Program pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
					Program Peningkatan, Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran		
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja		
Misi VII : Percepatan pembangunan dengan melakukan pemberdayaan desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif dan demokratis sesuai kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia	1.	1.	Dinasa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3		
		2.	Dinas Sosial				Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
							Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
	Misi VIII : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan	1.	1.	Dinas Sosial	6	19	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
			2.	BPBD			
							Program Pengembangan wawasan Kebangsaan
							Program Pembinaan dan rehabilitas sosial

MISI	SKPD Pelaksana			S*	I*	PROGRAM
untuk mengurangi kesenjangan ekonomi						penyanggah disabilitas
						program Pembinaan dan rehabilitasi sosial penyandang penyakit kejiwaan
						Rehabilitasi Sosial dan perlindungan anak
						program Pelayanan sosial lanjut usia
						Rehabilitasi sosial korban peyalahgunaan napza
						Program pemberdayaan Kelembagaan Sosial
						Program Pembinaan Anak terlantar
						Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
						Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
						Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
						Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
						Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
						Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Talud/Bronjong Pelayanan dan Rehabilitasi sosial eks napi
	Misi IX : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana terutama infrastruktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	1.	1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	17
		2.	Dinas Lingkungan Hidup			Program Pengembangan Perumahan
		3.	Dinas Pertanian			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
		4.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga			
		5.	Dinas Komunikasi dan Informatika			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
		6.	BAPPEDA			
		7.	Dinas Perindagkop, Usaha Kecil dan Menengah			
						Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	

MISI		SKPD Pelaksana		S*	I*	PROGRAM
						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
						Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
						Program Perencanaan Tata Ruang
						program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
						Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
						Program pengembangan industri kecil dan menengah

Sumber : RPJMD Kabupaten Seluma 2016-2021

Keterangan :

S = Sasaran

I = Indikator Kinerja

Dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Seluma tahun anggaran 2016 ini, juga disajikan capaian urusan pemerintahan yang diselenggarakan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Seluma yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

1. Misi Pertama Meningkatkan Keimanan Dan Ketaqwaan Serta Kerukunan Umat Beragama

Misi pertama dijabarkan dalam 1 tujuan, 1 sasaran, dan 2 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Administrasi Kesejahteraan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah S.W.T serta menjaga kerukunan hidup antar umat beragama yang ditandai dengan keharmonisan kehidupan antar umat beragama dan tidak ada kasus konflik antar

umat beragama. Sedangkan tantangannya adalah berkembangnya aliran atau paham yang menyimpang dari ajaran agama serta cenderung mengarah kekerasan (radikalisme).

2. Misi Kedua Menciptakan budaya yang menerapkan nilai-nilai agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan dalam pembangunan daerah serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama

Misi ke-2 dijabarkan dalam 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Hasil yang di capai meningkatnya nilai agama dan budaya serta pengetahuan, pemahaman dalam kehidupan masyarakat serta dapat menerapkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan dari ajaran agama yang didapat.

3. Misi III : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, system kelembagaan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, efisien, efektif, professional, transparan, dan akuntabel yang di dukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi dan kolusi

Misi ke-3 dijabarkan dalam 3 tujuan, 3 sasaran dan 23 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan fungsi penunjang. Diselenggarakan oleh Bagian Hukum Setda, Bagian Ortala Setda, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Satu Pintu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Inspektorat, BAPPEDA, Dishubkominfo, serta Sekretariat DPRD.

Hasil yang di capai meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah atau kategori baik. Kinerja laporan keuangan daerah yang semakin membaik meskipun masih katagori WDP. Meningkatnya tertib adminsitrasi pemerintahan dan tercapainya kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah. Serta meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif untuk menekan prilaku korupsi dan kolusi. Sedangkan tantangannya belum tuntasnya penataan pegawai, dan kinerja pegawai yang masih belum optimal serta belum optimalnya penerapan teknologi informasi (e-Gov) dalam mendukung manajemen kinerja birokrasi.

4. Misi 04 : Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan penduduk miskin, berkualitas dan terjangkau

Misi ke-4 dijabarkan dalam 2 tujuan, 2 sasaran dan 41 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan fungsi penunjang. Diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hasil yang di capai meningkatnya akses, kualitas pemerataan layanan pendidikan. Dengan terwujudnya misi ke-4 ini dapat menurunkan angka putus sekolah pada usia 13 -15 tahun dan 16 – 18 tahun. dan tidak hanya itu dengan misi ini, kualitas pendidikan diharapkan dapat ditingkatkan. Serta pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin terus ditingkatkan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat miskin.

5. Misi 05 : Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua aspek kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memacu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja

Misi ke-5 dijabarkan dalam 3 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar serta urusan pilihan. Diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Sosial.

Hasil yang di capai dalam misi ini yakni pengembangan lembaga ekonomi (Usaha Kecil dan Menengah), pengoptimalan fungsi lembaga pemberdayaan UKM juga perlu ditingkatkan. Sehingga diharapkan penguatan peran lembaga industri kecil dan menengah dan pelaku usaha lainnya. Untuk mencapai misi ini perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif , serta meminimalisir potensi pungutan liar yang memberatkan para pelaku usaha yang dilakukan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab, mendorong pelaku usaha agar tidak bergantung pada komponen pembiayaan dari anggaran pemerintah (APBN/APBD), meningkatkan

kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal dan penyediaan energi dan infrastruktur adalah hal – hal yang menjadi tantangan dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Seluma kedepan.

6. Misi 06 : Mengembangkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi sektor-sektor industri, pertanian, pariwisata, dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan

Misi ke-6 dijabarkan dalam 7 tujuan, 7 sasaran dan 45 indikator. Dilaksanakan melalui urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang, urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan dasar. Diselenggarakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Dinas Sosial.

Hasil yang di capai dalam misi ini yakni memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Upaya diversifikasi pangan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis sumber daya lokal. Kedepan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan sarana dan prasarana produksi; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian' mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat petani, meningkatkan pemanfaatan teknologi; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil. Di sektor pariwisata perlu dibangun sarana dan prasarana sebagai akses menuju ketempat pariwisata, sehingga meningkatkan pendapatan daerah serta menciptakan lapangan usaha baru dalam hal menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Seluma.

7. Misi 07 : Percepatan pembangunan dengan melakukan pemberdayaan desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif dan demokratis sesuai kebutuhan yang didasarkan pada

karakteristik dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia

Misi ke-7 dijabarkan dalam 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib bukan pelayanan dasar Diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hasil yang di capai dalam misi ini yakni melaksanakan proses pembangunan dengan pemberdayaan desa. Proses percepatan pembangunan desa dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Dengan melaksanakan misi ini, untuk mewujudkan program pemerintah pusat yakni “**Membangun Indonesia dari Pinggiran**”. Pembangunan daerah sangat tepat diimplementasikan dalam perekonomian yang mengandalkan pengelolaan sumber sumber daya publik, khususnya pemberdayaan sumberdaya yang ada di pedesaan. Percepatan pembangunan mulai dari desa ini bertujuan pertama, untuk mengurangi angka kesenjangan dan kemiskinan, menciptakan kerangka pembangunan sosial yang tangguh dalam memecahkan permasalahan lingkungan aktual dimasa yang akan datang. Kedua, perlindungan dan kelestarian lingkungan. Ketiga, peningkatan produktivitas, perhatian yang spesifik terhadap daerah – daerah yang relatif terbelakang dan mengusahakan peningkatan peranya didalam pembangunan secara keseluruhan merupakan upaya yang terencana, terkoordinasi dan terorganisasi dalam rangka peningkatan produktivitas nasional dan keberlanjutannya

8. Misi 08 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi

Misi ke-8 dijabarkan dalam 6 tujuan, 6 sasaran dan 19 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar Diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hasil yang di capai dalam misi ini yakni meningkatkan tingkat kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan yang bertujuan mengurangi kesenjangan

ekonomi. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi diperlukan kebijakan berupa pemberian bantuan modal usaha bersama (bantuan ekonomi produktif) untuk keluarga miskin yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendapatannya. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dalam mengelola suatu usaha terhadap masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

9. Misi 09 : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana terutama infrastruktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat

Misi ke-9 dijabarkan dalam 3 tujuan, 3 sasaran dan 17 indikator. Dilaksanakan melalui urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta urusan pemerintahan fungsi penunjang. Diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan Informatika, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Hasil yang di capai dalam misi ini yakni meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai sarana dan prasarana penunjang berkembangnya perekonomian daerah di pedesaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

- a) Capaian APS pada usia 13-15 dan 16-18 tahun belum optimal
- b) Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajatn belum optimal
- c) Desa tertinggal masih ada yang belum memiliki SD
- d) Belum optimalnya Capaian APM pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat
- e) Masih tingginya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat
- f) Belum meratanya PAUD di tiap desa
- g) Belum meratanya Perpustakaan Sekolah dasar dan kualifikasi pendidikan guru
- h) Kurangnya minat pemuda terhadap budaya lokal

b. Kesehatan

- a) Masih terdapatnya kasus kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan kematian balita yang tidak dilaporkan
- b) Belum optimalnya cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih
- c) Belum optimalnya penanganan penyakit menular
- d) Kurang meratanya tenaga kesehatan dan sarana serta prasarana kesehatan
- e) Terbatasnya tenaga medis
- f) Terbatasnya jumlah dan kualitas puskesmas di setiap desa
- g) Daerah endemik penyakit rabies, malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD)
- h) Masih rendahnya prosentase program promotif terhadap total anggaran kesehatan
- i) Belum optimalnya pelayanan RSUD Tais, sehingga menyebabkan masyarakat merujuk ke RSUD M. Yunus

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- a) Infrastruktur Dasar yang kurang memadai
- b) Masih banyaknya jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi rusak
- c) Masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih

- d) Kecamatan Ulu Talo, Ilir Talo dan Seluma Utara merupakan tiga kecamatan dengan persentase desa (sangat) tertinggal tertinggi yaitu masing-masing mencapai 100%; 85,71% dan 66,67%.
- d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
 - a) Masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi
 - b) Belum tersedianya TPS dan TPA
- e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - a) Masih perlunya rehab dan peningkatan sarana peribadatan
 - b) Masih rendahnya kesejahteraan penyuluh keagamaan
 - c) Belum optimalnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya keagamaan
- f. Sosial
 - a) Tingkat kemiskinan yang masih tinggi
 - b) Belum optimalnya kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan di Kabupaten Seluma yang termasuk daerah rawan bencana tsunami, gempa bumi, banjir dan tanah longsor

2.3.2 Urusan Bukan Wajib Pelayanan Dasar

- a. Tenaga Kerja
 - a) penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Seluma. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Seluma menurun dari 75,53% pada tahun 2010 menjadi 70,31% pada tahun 2014
 - b) Penurunan Jumlah Tenaga Kerja Sub-Sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a) Proporsi penyuluh KB terhadap jumlah penduduk masih kurang dan belum tersedianya dana operasional bagi para penyuluh
 - b) Belum optimalnya penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c) Belum optimalnya penurunan jumlah Perilaku KDRT di masyarakat
- c. Pangan
 - a) Masih Terdapatnya 65 desa rawan pangan
 - b) Perlu peningkatan kapasitas penyuluh pertanian
- e. Lingkungan Hidup
 - a) Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya kebersihan
 - b) Belum adanya TPA/TPS

- c) Belum optimalnya pengawasan lingkungan
- f. Administrasi Kependudukan dan Capil
 - a) Belum optimalnya pelayanan publik bidang kependudukan
 - b) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pelayanan kependudukan
 - c) Penduduk belum seluruhnya memiliki KTP berbasis NIK
 - d) Belum optimalnya pelayanan KTP keliling
- g. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a) Belum optimalnya kelompok binaan desa dalam mendukung pembangunan desa
 - b) Belum optimalnya pembentukan BUMDES
 - c) Belum tersedianya pemetaan potensi unggulan di tingkat desa
 - d) Masih rendahnya kapasitas aparatur desa
- i. Komunikasi dan Informasi
 - a) Belum optimalnya pelaksanaan PPID
 - b) Belum tersedianya rencana induk penerapan e-government
 - c) Belum terlaksananya pengembangan aplikasi untuk mempercepat reformasi birokrasi
- j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - a) Masih rendahnya kapasitas KUD Mandiri
- k. Penanaman Modal
 - a) Belum optimalnya pelayanan perizinan
 - b) Belum diserahkannya seluruh perizinan ke PPTSP
- l. Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Kurangnya pemberdayaan karang taruna sebagai wadah pemuda
 - b) Belum tersedianya sarana olahraga terpadu berupa sport centre, GOR dan stadion
 - c) Belum optimalnya peran kelompok pemuda olahraga

2.3.3 Urusan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan
 - a) Rendah dan belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan tangkap serta potensi ruang buat wilayah budidaya
 - b) Belum optimalnya penggunaan TPI
 - c) belum tersedianya PPI

- a. Pariwisata
 - a) Belum adanya sarana dan prasarana di Obyek Wisata
 - b) Belum tersedianya Rencana Induk Pariwisata Daerah
 - c) Belum optimalnya pemasaran terhadap obyek wisata
- a. Pertanian
 - a) Semakin menurunnya produktivitas padi
 - b) Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi perkebunan
 - c) Perubahan Iklim yang menyebabkan penurunan produksi
 - d) Masih belum optimalnya budidaya ternak sapi dan unggas

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Setiap kenaikan atau penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah akan berpengaruh terhadap besaran pendapatan daerah, dan selanjutnya akan mempengaruhi besaran belanja daerah serta besaran pembiayaan daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah yang cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Dalam perekonomian terbuka, kondisi perekonomian daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Seluma, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Seluma namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi perekonomian regional Provinsi Bengkulu, perekonomian Nasional dan bahkan ekonomi global

3.1 Kondisi Perekonomian

3.1.1 Kondisi Perekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 diperkirakan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Perkiraan ini mempertimbangkan potensi dan berbagai risiko ekonomi baik yang berasal dari eksternal maupun domestik. Perekonomian global yang diperkirakan membaik di tahun 2017 diharapkan mampu mendukung kinerja perekonomian nasional. Meskipun demikian, perbaikan tersebut menghadapi sejumlah risiko seperti perkiraan penurunan kinerja ekonomi Tiongkok, adanya ketidakpastian ekonomi Eropa yang sedang melakukan penyesuaian terhadap Brexit, dan risiko stabilitas akibat perubahan arah kebijakan ekonomi AS setelah pemilihan umum Presiden. Dari sisi domestik, perkiraan perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam tahun 2017 didukung oleh membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan inflasi yang relatif stabil terutama harga barang kebutuhan pokok. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga diperkirakan tetap memiliki kinerja cukup baik yang didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Selain itu, kebijakan amnesti pajak diharapkan juga mampu mendorong investasi di sektor riil melalui penguatan likuiditas dari hasil repatriasi dana yang ada di luar negeri. Seiring membaiknya perekonomian global, kinerja perdagangan internasional juga diharapkan mengalami perbaikan. Dari sisi sektoral, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian juga diperkirakan menunjukkan penguatan yang salah satunya dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan arah kebijakan ekspor terhadap produk bernilai tambah tinggi. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan juga tetap mendorong kinerja pertumbuhan sektor konstruksi, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, sektor keuangan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini perekonomian global dan domestik, kebijakan yang diambil pemerintah, serta potensi dan risiko ke depan, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Perkiraan ini lebih baik dibanding proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,2 persen..

3.1.2 Kondisi Perekonomi Provinsi Bengkulu

Kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu triwulan IV 2016 tumbuh 5,56%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,18%. Di sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan didorong oleh meningkatnya kinerja Investasi dan Ekspor. Peningkatan kinerja investasi baik didorong oleh meningkatnya investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu, meningkatnya kinerja ekspor didorong oleh perbaikan harga komoditas sawit dan karet sehingga mendorong ekspektasi pelaku usaha untuk meningkatkan produksinya. Di sisi penawaran, peningkatan terutama didorong oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan

ekonomi Bengkulu pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,30%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,14%.

Realisasi pendapatan terhadap pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun 2015. Peningkatan terutama bersumber dari Pendapatan Perimbangan.

Di sisi belanja, realisasi belanja terhadap pagu APBD pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya realisasi belanja APBD terutama bersumber dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Transfer. Sementara realisasi belanja terhadap pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) juga mengalami penurunan. Menurunnya realisasi bersumber dari Belanja Negara maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2016 meningkat. Tekanan inflasi tahunan Provinsi Bengkulu pada triwulan IV tahun 2016 sebesar 5,00%, lebih tinggi dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,62% . Meningkatnya tekanan inflasi bersumber dari seluruh kelompok yaitu administered prices, volatile foods, dan inflasi inti. Meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok administered prices terutama didorong oleh meningkatnya Tarif Angkutan Udara pada libur Natal dan akhir tahun. Selanjutnya, meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok volatile foods dan inflasi inti didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumsi masyarakat menjelang Hari Natal dan libur akhir tahun. Dengan perkembangan tersebut, inflasi Bengkulu pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,00% berada di atas laju inflasi Sumatera (4,53%), laju inflasi nasional (3,02% yoy) maupun laju inflasi Bengkulu sendiri tahun 2015 (3,25% yoy). Namun demikian kondisi inflasi Bengkulu tahun 2016 masih berada dalam sasaran inflasi nasional ($4\% \pm 1\%$).

Ketahanan sektor korporasi pada triwulan IV 2016 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, di mana penurunan kinerja korporasi terutama terjadi pada sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; dan Konstruksi. Sejalan dengan kinerja korporasi,

eksposur perbankan di sektor korporasi menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit cenderung melambat dengan tingkat risiko (NPL) yang relatif stabil.

Sementara itu, ketahanan sektor rumah tangga pada triwulan IV 2016 cukup terjaga, yang tercermin dari meningkatnya kinerja pembiayaan, yang diikuti dengan menurunnya tingkat risiko (NPL) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2016, posisi pengedaran uang kartal di Bank Indonesia Bengkulu mengalami net cash outflow. Net cash outflow mencapai Rp 922 Miliar, lebih tinggi dibandingkan net cash outflow pada triwulan sebelumnya sebesar Rp 302 Miliar. Meskipun pola net cash outflow akhir tahun merupakan siklus tahunan, namun terlambatnya pengesahan APBD Perubahan Tahun 2016 yang terjadi di beberapa Pemda mendorong ekspansi fiskal yang berlebihan pada triwulan IV 2016.

Selain menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia juga berupaya menjaga kualitas uang yang beredar di masyarakat (clean money policy and fresh for circulation). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara berkala dengan menggunakan Mesin Racik Uang Kertas (MRUK) dan Mesin Sortasi Uang Kertas Racik (MSUK-R). Rasio jumlah pemusnahan uang kartal terhadap inflow triwulan IV 2016 sebesar 106%. (Pemusnahan melibatkan sisa inflow pada triwulan sebelumnya).

Perkembangan ketenagakerjaan sampai dengan periode Agustus 2016 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun masih terbatas, tren perbaikan harga komoditas pada triwulan laporan mampu mendorong kesejahteraan petani, yang tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, perkembangan kondisi ketenagakerjaan pada triwulan laporan kembali mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari hasil Liaison dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang menunjukkan adanya penurunan penggunaan tenaga kerja pada triwulan IV 2016 dibandingkan triwulan sebelumnya. Hasil Liaison pada triwulan laporan mengkonfirmasi bahwa kontak cenderung melakukan pengurangan tenaga kerja untuk efisiensi biaya. Demikian pula dengan hasil SKDU pada triwulan laporan di

mana realisasi penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Konsumsi Pemerintah diperkirakan mengalami kenaikan pada triwulan II 2017 khususnya terkait pembayaran gaji ke-13 PNS menjelang hari raya Idul Fitri. Sementara kegiatan investasi pemerintah diperkirakan masih tumbuh pada level yang tinggi, salah satunya didukung kebijakan belanja modal Pemerintah Provinsi yang mencapai Rp 600 Miliar dalam bentuk 25 paket proyek infrastruktur fisik di 10 kab/kota dengan target pengerjaan fisik dimulai pada bulan Maret 2017. Di sisi sektoral, pertumbuhan sektor utama triwulan II 2017 akan bersumber dari Sektor Perdagangan, dan Sektor Transportasi. Perkembangan sektor perdagangan dan sektor transportasi diperkirakan tumbuh seiring dengan kenaikan permintaan konsumsi pada Ramadhan dan Idul Fitri.

Perekonomian Bengkulu secara keseluruhan tahun 2017 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016. Perekonomian diperkirakan meningkat pada kisaran 5,3-5,5%, lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2016 sebesar 5,3%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perkiraan tren membaiknya permintaan dan harga komoditas global (CPO, Karet dan Batubara) serta peningkatan belanja pemerintah.

Perkiraan laju inflasi Bengkulu pada triwulan II 2017 berada pada kisaran 5,9-6,2% dengan tekanan inflasi yang bersumber dari kenaikan ekspektasi konsumsi pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Sumber tekanan inflasi triwulan II 2017 diperkirakan bersumber dari komponen Volatile Foods (VF), Administered Prices (AP), dan kelompok inti. Meningkatnya tekanan inflasi kelompok volatile foods dan inti diperkirakan didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumsi masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri. Selanjutnya, tarif angkutan udara diperkirakan menjadi komoditas administered prices yang mendorong tekanan inflasi Juni 2017.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Kabupaten Seluma

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi

diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Seluma, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Seluma namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Seluma merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, serta (4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Di samping 4 indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kabupaten Seluma, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang

ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sebagai subsistem yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini secara rinci dan teknis telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalan sumber-sumber potensi baru untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD. Untuk itu, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah diharapkan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat, membuka kesempatan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, utamanya UMKM serta diberbagai bidang.

Desentralisasi tidak hanya terkait dengan model pemerintahan, namun juga menyangkut paradigma ekonomi yang disebut desentralisasi ekonomi. Desentralisasi

ekonomi mencakup aktivitas dan tanggung jawab ekonomi yang diimplementasikan pada level daerah. Desentralisasi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah. Dalam beberapa kasus, desentralisasi daerah juga berpotensi menimbulkan risiko fiskal bagi pemerintah pusat. Oleh karena itu, ada beberapa isu atau Kriteria yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan patut mendapatkan perhatian serius pemerintah daerah, di antaranya adalah peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka pemerintah kota perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Di lain pihak, ruang gerak anggaran daerah perlu lebih dioptimalkan. Hal ini bisa ditempuh tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan yang ada, tetapi juga melalui upaya lainnya seperti penggalan sumber pembiayaan dari pinjaman dan obligasi daerah, efisiensi belanja daerah, penganggaran partisipatif yang melibatkan peran masyarakat, serta pengupayaan *public-private partnership* di dalam pembangunan infrastruktur di wilayah.

Arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan di dalam RKPD ini dimaksudkan untuk memberikan arahan-arahan sekaligus rambu-rambu, sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dapat menopang, bukan menghambat, proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi Kabupaten Seluma.
2. Keuangan daerah dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Keuangan daerah dapat meminimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Untuk memenuhi rambu-rambu arahan di atas, maka ditetapkan kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi yang konstruktif dari pemerintah daerah, pendapatan asli daerah diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Seluma yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Seluma diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Seluma selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan

pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Seluma.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 dilakukan melalui kajian hasil perkiraan minimal yang diperinci oleh Dinas terkait di Kabupaten Seluma. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu adalah menyusun proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Seluma dengan menggunakan data empiris. Selanjutnya hasil proyeksi tersebut dievaluasi sebagai bahan menentukan perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai komponen pendapatan daerah yang relatif lebih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, bila dibandingkan dengan dua komponen lainnya

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2018, sekaligus meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut:

- 1) Peningkatan target pendapatan daerah baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada.
- 2) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
- 3) Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga.

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin kemampuan dan potensi daerah, sehingga semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan (dependensi) dengan pemerintah pusat akan semakin berkurang. Sedangkan Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk

mendukung pelaksanaan kewenangan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah utamanya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang proporsional dan lebih baik.

Memperhatikan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berjalan dapat terjadi adanya perubahan proyeksi pendapatan daerah yang antara lain disebabkan karena perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang akan berakibat pada kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.

Sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah. Agar perekonomian daerah tidak sekedar tumbuh, tetapi dapat mengakomodasi masa depan sesuai dengan perubahan yang terjadi pada aspek lingkungan, maka strategi Pemerintah Kabupaten Selama Koordinasi lintas sektoral instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aspek pendapatan ;

1. Monitoring pelaksanaan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Evaluasi secara rutin dan berkesinambungan;
3. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan program Intensifikasi melalui :
 - a. Monitoring realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) *dan*
 - b. Evaluasi untuk memecahkan permasalahan yang ada dilapangan melalui rapat koordinasi secara berkala;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis; *serta*
5. Menggali sumber-sumber PAD yang baru dan mendatangkan investor.

Dengan strategi ini, kemampuan daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum dan infrastruktur lainnya diharapkan akan meningkat. Hasil akhirnya, pemerintah daerah akan dapat menarik investasi dalam maupun luar negeri, yang

berdampak terhadap peningkatan kemakmuran masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan *investatif* berdimensi dalam waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Dikarenakan masih belum begitu tingginya kemampuan fiskal kabupaten Seluma di dalam membiayai pembangunan daerah, maka perlu diambil kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pendapatan daerah seperti :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru.
2. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
3. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
4. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur.
5. Meningkatkan dana dari Pusat diluar DAU dan DAK ke Daerah

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan prestasi kerja (*performance-based budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian dari *output* dan *outcome* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan atau urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh

setiap SKPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara spesifik, kebijakan belanja Kabupaten Seluma dirumuskan sebagai berikut:

- a) Pengalokasian Belanja Daerah diarahkan pada program dan kegiatan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 dan penjabaran visi serta misi RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021.
- b) Belanja Daerah sebagai stimulus pembangunan bidang ekonomi sektor produktif dalam rangka pengembangan perekonomian daerah yang berbasis potensi lokal serta pengembangan konektivitas antar daerah sebagai jejaring pemasaran dan peningkatan daya saing.
- c) Belanja Daerah dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana wilayah dengan mempertimbangkan daya ungkit terhadap perekonomian setempat.
- d) Kegiatan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Seluma dan masyarakat serta mengacu pada prioritas pembangunan Kabupaten Seluma yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018 dan penjabaran visi serta misi RPJMD tahun 2016-2021.
- e) Pendanaan kegiatan darurat yang penganggarnya belum tersedia atau belum mencukupi pada tahun berjalan.
- f) Mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkembang dan tidak terkonsentrasi pada program dan/atau kegiatan serta lokasi tertentu.
- g) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran yang berjalan yang diperkirakan tidak dapat terealisasi secara optimal.

Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2018 difokuskan pada:

- a) Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja daerah melalui pemanfaatan belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengoptimalkan target kinerja sektor untuk mendukung target kinerja tahun 2018.

- b) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang menunjang sektor unggulan dalam rangka mendukung percepatan target-target kinerja ekonomi tahun 2017.
- c) Pembangunan pada infrastruktur desa/ daerah tertinggal.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pembangunan daerah khususnya sektor publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya diharapkan mampu menjadi pendorong dan pengungkit bagi sektor *private* untuk tetap tumbuh dan terus berkembang melalui kebijakan *government expenditure*. Kebijakan ini juga diarahkan untuk dapat memberikan efek simultan pada roda perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, kebijakan pengeluaran pemerintah daerah juga ditujukan untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat yang dari waktu ke waktu terus menuntut peningkatan kualitas layanannya. Isu-isu tentang penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial, perekonomian sektor produktif serta aspek kehidupan masyarakat yang lain harus menjadi prioritas.

Selain dari sisi pengeluaran pemerintah daerah melalui belanja daerah, pembiayaan pembangunan daerah juga harus didukung oleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang mampu menjamin ketersediaan dan ketepatan waktu untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap diarahkan mampu menjadi *back bone* Pendapatan Daerah. Potensi-potensi sumber pembiayaan pembangunan harus terus dikembangkan disamping memperkuat sumber-sumber yang telah ada. Dalam pengembangan potensi pendapatan daerah ini juga perlu mempertimbangkan dampak dan resiko yang mungkin timbul atas hal tersebut. Kebijakan yang dirumuskan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah diharapkan tetap mampu menjaga iklim usaha yang prospektif di Kabupaten Seluma.

Dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pembiayaan Daerah menempati posisi yang sangat strategis sebagai transaksi untuk mencapai keseimbangan anggaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai keseimbangan anggaran tetap memperhatikan misi untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Potensi-potensi penerimaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA), perincian dan cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman hendaknya dicermati dari sisi positif maupun negatifnya. Pada saat anggaran ditetapkan menggunakan sistem defisit maka penerimaan daerah merupakan mekanisme untuk menyeimbangkan anggaran yang penggunaannya tetap memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat.

Demikian pula pada saat APBD menggunakan sistem surplus maka pengeluaran-pengeluaran pemerintah untuk pembentukan dana cadangan, Pemberian pinjaman, Pembayaran pokok hutang, dan Investasi (Modal bergulir, Modal dasar dan Penyertaan Modal BUMD) didasarkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, efektifitasnya serta sebagai bentuk kesiapsediaan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pembiayaan pembangunan daerah termasuk dalam ruang lingkup hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu *scarcity* sumber daya dalam rangka melaksanakan kewajiban pemerintah daerah menjadi isu di semua daerah sehingga diperlukan penerapan kebijakan skala prioritas dalam penyelenggaraannya.

Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas. Sedangkan strategi yang diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila APBD surplus maka harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sedangkan pinjaman kepada Pemerintah Pusat /Daerah lain dan / atau pendanaan belanja diutamakan untuk membayar pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian peningkatan jaminan sosial;

- 2) Apabila APBD Defisit, maka dapat dipenuhi melalui Apabila APBD defisit, maka ditutupi dari penerimaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah;
- 3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD, maka ditutup dengan dana pinjaman.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, *trend* ke depan, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Seluma adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggaran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah.
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, akan dilakukan dengan opsi-opsi berikut:
 - a) Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b) Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan; serta
 - c) Menyesuaikan kebutuhan *input* (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan.

Adapun strategi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seluma tahun 2018 diarahkan:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Seluma yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kabupaten Seluma untuk kurun waktu 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
 - b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
 - c. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan visi Misi Pemerintah Kabupaten Seluma yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2016-2021. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2018 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum;
2. Arah kebijakan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2018;
3. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RKPD tahun 2018.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Seluma pada penyusunan RKPD 2018.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Seluma yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Seluma tahun 2018 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II), dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seluma serta realita tuntutan perkembangan maka isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Seluma tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani pada tahun 2018, antara lain:

1. Perlambatan pertumbuhan PDRB.

Perlambatan pertumbuhan PDRB berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan PDRB Sub-Sektor Pertanian, semakin menurunnya produktivitas padi, perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi perkebunan, perubahan iklim yang menyebabkan penurunan produksi, masih terdapatnya 65 desa rawan pangan, produktivitas perikanan tangkap dan budidaya yang belum optimal, belum optimalnya penggunaan TPI dan belum tersedianya PPI, produksi perkebunan yang belum optimal, masih belum optimalnya budidaya ternak sapi dan unggas.

2. Tingkat Kemiskinan yang masih tinggi.

Dari segi kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Seluma masih tergolong tinggi. Selain itu, masih tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Seluma menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Seluma masih jauh di bawah garis kemiskinan.

3. Infrastruktur Dasar yang kurang memadai.

Di bidang infrastruktur dasar, permasalahan daerah berhubungan dengan infrastruktur dasar yang kurang memadai, masih banyaknya jalan kabupaten dan jembatan dalam kondisi rusak, masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses air bersih, masih rendahnya persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi, belum tersedianya TPS dan TPA.

4. Kabupaten Seluma masing tergolong Kabupaten Tertinggal.

Terkait dengan Kabupaten Seluma masing tergolong Kabupaten Tertinggal, permasalahannya berhubungan dengan pembangunan ekonomi, membuka keterisolasian dengan membangun dan/atau meningkatkan kualitas jalan/jembatan, penyediaan sarana kesehatan, jaringan listrik PLN, pembangunan sekolah dasar dan pembangunan pasar desa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian desa.

5. Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Rendahnya nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkaitan erat dengan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup Kabupaten Seluma yang masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Bengkulu. Kedua dimensi tersebut ditambah dengan dimensi standar hidup layak saling berkaitan dalam menentukan IPM.

6. Kesehatan.

Dari segi kesehatan, permasalahan daerah berkaitan dengan masih terdapatnya kasus kematian bayi, kematian ibu melahirkan dan kematian balita yang tidak dilaporkan, proses persalinan masih ditangani oleh tenaga non kesehatan yang tidak terlatih, kurang meratanya tenaga kesehatan dan sarana serta prasarana kesehatan, masih rendahnya prosentase program promotif terhadap total anggaran kesehatan,

masih ditemukan kasus gizi buruk dan belum optimalnya penanganan gizi buruk, Endemik penyakit menular malaria, DBD dan Rabies, belum optimalnya pelayanan RSUD Tais, sehingga menyebabkan masyarakat merujuk ke RSUD M. Yunus.

7. Pendidikan.

Di bidang pendidikan, akar permasalahan berhubungan Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Capaian APS pada usia 13-15 dan 16-18 tahun belum optimal, Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat belum optimal, belum optimalnya Capaian APM pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat, masih tingginya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat, masih adanya desa tertinggal yang belum memiliki SD sederajat, belum meratanya PAUD di tiap desa dan belum meratanya Perpustakaan Sekolah dasar dan kualifikasi pendidikan guru.

8. Belum optimalnya pelayanan publik.

Disisi lain, belum optimalnya pelayanan publik berhubungan erat dengan masih kurangnya SPM dan SOP bagi SKPD, sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum representatif antara lain loket pelayanan dan ruang tunggu, penduduk belum seluruhnya memiliki KTP berbasis NIK, belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP, belum optimalnya penilaian LAKIP SKPD, opini BPK yang belum optimal, terkait dengan pengelolaan aset daerah dan tindak lanjut temuan BPK, belum optimalnya konsisten dokumen perencanaan pembangunan, minimnya kelembagaan inovasi daerah belum meratanya penempatan ASN terutama di daerah terpencil dan belum optimalnya perda yang ditetapkan berdasarkan prolegda.

4.1 Tema Pembangunan

4.1.1 Dasar penentuan Tema RKPD Tahun 2018

Berdasarkan isu –isu strategis dan permasalahan pembangunan Kabupaten Seluma pada tahun 2018, dan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025, pada tahap ke III (RPJMD Tahun 2016-2021) yaitu Mewujudkan masyarakat yang beriman dan sejahtera, maka perumusan tema pembangunan yang tepat menjadi penting dalam rangka mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke 5 melalui Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2016-2021 yang *inline* dengan tahapan pembangunan ke-3 yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

Secara substansial maka rumusan terhadap tema pembangunan tahun 2018 adalah :

“Mewujudkan masyarakat Kabupaten Seluma yang unggul dan sejahtera melalui pengembangan sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perikanan, peningkatan infrastruktur desa/daerah tertinggal dan infrastruktur dasar yang

didukung **peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan** dengan mengoptimalkan **percepatan pembangunan desa** “

Dengan unsur utama dalam tersebut adalah (1) **pengembangan sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perikanan**, (2) **peningkatan infrastruktur desa/daerah tertinggal dan infrastruktur dasar**, (3) **peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan**, (4) **percepatan pembangunan desa** .

4.1.2 RKPDP Tahun 2018 sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 adalah : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan nasional disusun pula misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021, adapun visi yang ingin dicapai adalah “ **TERWUJUDNYA BENGKULU YANG MAJU, SEJAHTERA, BERMARTABAT, DAN BERDAYA SAING TINGGI** “ .

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan, dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada, dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan.

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta

mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat istiadat dan kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan.

Bengkulu yang bermartabat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang memiliki kompetensi, bertakwa serta memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa. Visi ini dapat tercapai apabila masyarakat Bengkulu sudah maju dalam segenap aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.

Bengkulu yang berdaya saing tinggi mengandung makna bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, komoditas unggulan, kemaritiman serta kepemudaan dan keolahragaan

Untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu yang maju, sejahtera dan bermartabat, maka misi yang diemban lima tahun ke depan antara lain:

1. Misi I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)
2. Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan local
3. Misi III : Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis
4. Misi IV : Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
5. Misi V : Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
6. Misi VI : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Misi VII : Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
8. Misi VIII : Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis

Strategi yang dipakai oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah daerah dalam menjalankan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik.

2. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur.
3. Meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government.
5. Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas.
7. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan.
8. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
9. Meningkatkan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan.
10. Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja.
11. Mengembangkan kawasan ekonomi terpadu.
12. Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM serta Mengembangkan sarana Perdagangan rakyat.
13. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan sarana prasarana pelatihan kerja.
14. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal.
15. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah.
16. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis.
17. Optimalisasi pengelolaan investasi.
18. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam.
19. Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata.
20. Pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi.
21. Menurunkan beban pencemaran lingkungan.
22. Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan perkotaan.
23. Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana.
24. Mempertahankan fungsi hutan.
25. Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritiman.
26. Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan.
27. Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
28. Meningkatkan peran, potensi, prestasi pemuda dan olahraga.
29. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga.
30. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, budaya dan demokrasi dalam masyarakat.

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan

dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan baik di Kabupaten Seluma maupun Provinsi Bengkulu.

Hubungan tema tahunan di dalam RKPD tahun 2018 dengan misi jangka menengah nasional dan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) peningkatan infrastruktur desa/daerah tertinggal dan infrastruktur dasar sejalan dengan sasaran provinsi Bengkulu yaitu meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal dan sejalan juga misi nasional dalam upaya Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- (2) peningkatan infrastruktur penunjang sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perikanan sejalan dengan sasaran provinsi Bengkulu dalam pengembangan objek wisata dan produk unggulan daerah yang terintegrasi dan mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata hal tersebut sejalan dengan misi nasional dalam upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- (3) peningkatan pelayanan publik sejalan dengan sasaran provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan dan memperluas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur, meningkatkan kinerja pengawasan Pemerintahan Daerah, Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government, hal tersebut sejalan dalam upaya Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- (4) pemerataan layanan pendidikan sejalan dengan sasaran provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan hal tersebut sejalan juga dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- (5) peningkatan layanan kesehatan sejalan dengan sasaran provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatkan ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan hal tersebut sejalan juga dengan dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- (6) percepatan pembangunan desa.sejalan dengan sasaran provinsi Bengkulu dalam upaya meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa dan pemberdayaan ekonomi di desa tertinggal hal tersebut sejalan juga dengan dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

Tabel 4.1.
Hubungan RKPD Tahun 2018 sebagai bagian Integral RPJMD Kab. Seluma,
RPJMD Prov Bengkulu dan RPJMN

MISI	RPJMD KABUPATEN	MISI	RPJMP PROVINSI	MISI	RPJMN NASIONAL
	MISI KABUPATEN		MISI PROVINSI		MISI PUSAT
3	Misi 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, system kelembagaan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel yang di dukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi dan kolusi	1	Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance and clean government)	3	Misi 3. mewujudkan masyarakat demokratis belandasan hukum
4	Misi 4. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan penduduk miskin, berkualitas dan terjangkau	2	Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal	1	1. Mewujudkan Masyarakat berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradap Berdasarkan Falsafah Pancasila
9	Misi 9. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana terutama infrastruktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	3	Misi 3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	2	Misi 2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing
5	Misi 5. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat pada semua aspek kehidupan dengan memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memacu pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja	2	Misi 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal	5	Misi 5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

MISI	RPJMD KABUPATEN	MISI	RPJMP PROVINSI	MISI	RPJMN NASIONAL
	MISI KABUPATEN		MISI PROVINSI		MISI PUSAT
7	Misi 7. Percepatan pembangunan dengan melakukan pemberdayaan desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan yang partisipatif dan demokratis sesuai kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia	4	Misi 4. Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan	6	Misi 6. mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari

4.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:



Selanjutnya sembilan-cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni: (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program quick wins. Tiga

dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.



Slide - 5

4.2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 adalah :
 “Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi “

Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa, efektif, transparan, dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumberdaya yang ada, dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan. Untuk mewujudkan visi Provinsi Bengkulu didukung misi :

1) Misi I: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance and clean government).

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah; peningkatan daya saing daerah dan investasi; mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa; peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan melalui model e-government.

- 2) Misi II : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan local.**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu yang sejahtera melalui peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan bidang pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal.

- 3) Misi III : Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Bengkulu maju, sehat, dan cerdas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis:

- 4) Misi IV: Mewujudkan pola pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Bengkulu yang sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing melalui program-program antara lain: mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya laut; memanfaatkan sumberdaya panas bumi (geothermal) untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan; pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat; pengolahan produksi hasil ikutan hutan untuk menciptakan nilai tambah; pemanfaatan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan optimalisasi produksi ikan tangkap dan ikan budidaya.

- 5) Misi V: Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing.**

Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan antara lain (1) sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; (2) Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya maupun wisata olah raga, (3) Sektor transportasi Laut, yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Bengkulu; (4) industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan Industri Pariwisata Bahari; pengembangan Industri Kreatif Kebaharian; pembangunan Infrastruktur Kelautan, seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; (5) Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral), yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut

Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; (6) sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualitas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan. (7) Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.

6) Misi VI: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dan atau program antara lain: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar bagi perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi); (2) Memperkuat kapasitas kelembagaan pengarusutamaan (mainstreaming) gender dalam setiap tahapan pembangunan; (3) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik dengan tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan; (4) menghapus berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; (6). Meningkatkan akses pelayanan KB dan peningkatan peran kaum laki-laki ber KB; (7) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis gender; (8) perlindungan anak dari tindakan kekerasan; dan (9) Menyediakan data dan informasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

7) Misi VII: Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan.

Peningkatan daya saing kepemudaan dilakukan : (1) peningkatan kompetensi pemuda melalui pola pengkaderan secara terencana sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan metode pendidikan, pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, serta pemanfaatan kajian, kemitraan; (2) pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri; (3) peningkatan pengetahuan pemuda dini terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya sejak dini; (4) pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok kepemudaan sebagai media penyaluran minat dan bakat; (4) Peningkatan profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara, dan pengelola kegiatan kepemudaan;

8) Misi VIII: Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Bengkulu yang Sejahtera dan bermartabat. Sebagai provinsi yang merefleksikan miniatur Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku, agama, dan golongan dengan beragam kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk menjaga dan menjamin rasa aman bagi umat beragama dalam menjalankan aktivitas-aktivitas keagamaannya.

4.2.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2018

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kabupaten Seluma tahun 2018 yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Keterkaitan Sasaran RPJMD Kabupaten, RPJMD Prov Bengkulu, dan RJMN Nasional

NO.	RPJMD KABUPATEN	RPJMP PROVINSI	RPJMN NASIONAL
	SASARAN KABUPATEN	SASARAN PROVINSI	SASARAN NASIONAL
1	Meningkatnya kualitas layanan dan sistem kelembagaan dalam pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance	Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme Aparatur dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
3	Meningkatnya sistem pengawasan internal terhadap kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme Aparatur dan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
4	Meningkatnya akses, kualitas dan pemerataan layanan pendidikan	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
5	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas adil dan merata	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
6	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan
7	Meningkatnya kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal	Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal	Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan
8	Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana Perdagangan rakyat	Meningkatnya Peranan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK)	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang eksklusif dan Berkelanjutan
9	Terwujudnya percepatan pembangunan desa	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang eksklusif dan Berkelanjutan

NO.	RPJMD KABUPATEN	RPJMP PROVINSI	RPJMN NASIONAL
	SASARAN KABUPATEN	SASARAN PROVINSI	SASARAN NASIONAL
10	Terwujudnya pemberdayaan desa melalui kelompok binaan desa yang partisipatif	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan dan Kapasitas Aparatur Desa	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang eksklusif dan Berkelanjutan
11	Meningkatnya dan memantapkan infrastruktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat infrastruktur dasar	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang eksklusif dan Berkelanjutan
12	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dan cepat tumbuh	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kapasitas infrastruktur strategis dan berdaya saing	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

4.2.4 Tujuan dan Sasaran rancangan awal RKPD Kab Seluma Tahun 2018

Visi dan misi, tujuan, dan sasaran merupakan rangkaian upaya dalam merealisasikan visi dan misi menjadi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, merealisasikan hal yang abstrak menjadi konkret. Visi dan misi bermaksud untuk memberi gambaran besar mengenai keadaan yang ingin diwujudkan dari/melalui pembangunan daerah. Gambaran besar ini harus diperjelas dalam penetapan tujuan. Tujuan bermaksud untuk memberi uraian tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan tersebut haruslah mengarah secara jelas terhadap sasaran yang hendak dicapai. Penetapan sasaran bermaksud untuk memberikan pedoman target hasil yang hendak dicapai.

Visi, misi, tujuan, dan sasaran memiliki kriteria pelaksanaan. Kriteria pelaksanaan merupakan tolok ukur ketuntasan dalam melaksanakan setiap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ketuntasan dalam mengidentifikasi dasar penetapan, penetapan rumusan, hingga mengevaluasi hasil capaian kinerja.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sasaran dan strategi pembangunan dalam RKPD Kabupaten Seluma tahun 2018 yang berpedoman pada sasaran strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Keterkaitan Sasaran dan Strategi RKPD 2018 terhadap Sasaran dan Strategi RPJMD 2016-2021

No	RPJMD 2016-2021		RKPD 2018	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
1	1 Terwujudnya kerukunan umat beragama dan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan	1 Peningkatan kualitas sarana pendukung peribadatan dalam rangka kerukunan umat beragama 2 Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan umat beragama	Terwujudnya kerukunan umat beragama dan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan	1 Peningkatan kualitas sarana pendukung peribadatan dalam rangka kerukunan umat beragama 2 Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan umat beragama
2	1 Terwujudnya budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui penyelenggaraan seni dan budaya keagamaan	1 Peningkatan penyelenggaraan kelompok seni dan budaya keagamaan 2 Peningkatan	Terwujudnya budaya yang memiliki nilai-nilai agama melalui penyelenggaraan seni dan budaya keagamaan	1 Peningkatan penyelenggaraan kelompok seni dan budaya keagamaan 2 Peningkatan

No	RPJMD 2016-2021		RKPD 2018	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
	2 Terwujudnya kelestarian budaya lokal yang memiliki nilai-nilai agama	3 kesadaran kebersihan dalam menciptakan budaya bersih 3 Penguatan budaya yang bersumber dari kearifan lokal	Terwujudnya kelestarian budaya lokal yang memiliki nilai-nilai agama	3 kesadaran kebersihan dalam menciptakan budaya bersih 3 Penguatan budaya yang bersumber dari kearifan lokal
3	1 Meningkatnya kualitas layanan dan sistem kelembagaan dalam pelayanan publik 2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance	1 Pemberian pelayanan publik berdasarkan SPM dan SOP 2 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public 3 Mewujudkan masyarakat seluma yang memiliki KTP berbasis NIK, memiliki akte kelahiran, dan berakte nikah serta akte kematian 1 Peningkatan pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 2 Peningkatan pelaporan LAKIP SKPD 3 Peningkatan pengelolaan aset daerah dan percepatan tindaklanjut temuan BPK 4 Peningkatan tata kelola perencanaan dan penganggaran 5 Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat 6 Peningkatan kelembagaan inovasi Daerah 7 Pemerataan	Meningkatnya kualitas layanan dan sistem kelembagaan dalam pelayanan publik Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance	1 Pemberian pelayanan publik berdasarkan SPM dan SOP 2 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 3 Mewujudkan masyarakat seluma yang memiliki KTP berbasis NIK, memiliki akte kelahiran, dan berakte nikah serta akte kematian 1 Peningkatan pelaporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah 2 Peningkatan pelaporan LAKIP SKPD 3 Peningkatan pengelolaan aset daerah dan percepatan tindaklanjut temuan BPK 4 Peningkatan tata kelola perencanaan dan penganggaran 5 Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat 6 Peningkatan kelembagaan inovasi Daerah 7 Pemerataan

No	RPJMD 2016-2021		RKPD 2018	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
	3 Meningkatkan sistem pengawasan internal terhadap kinerja SKPD	<p>penempatan ASN yang proporsional sesuai pendidikan dan kebutuhan</p> <p>8 Peningkatan penetapan perda yang merupakan inisiatif DPRD</p> <p>1 Peningkatan kinerja pengawasan Pemerintah Daerah</p>	<p>Meningkatnya sistem pengawasan internal terhadap kinerja SKPD</p>	<p>penempatan ASN yang proporsional sesuai pendidikan dan kebutuhan</p> <p>8 Peningkatan penetapan perda yang merupakan inisiatif DPRD</p> <p>1 Peningkatan kinerja pengawasan Pemerintah Daerah</p>
4	1 Meningkatkan akses, kualitas dan pemerataan layanan pendidikan	<p>1 Peningkatan capaian APS pada usia 13-15 dan 16-18 tahun</p> <p>2 Peningkatan capaian APK pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat</p> <p>3 Peningkatan capaian APM pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat</p> <p>4 Pemerataan distribusi guru perkecamatan</p> <p>5 Penurunan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat</p> <p>6 Pengentasan desa tertinggal yang belum memiliki SD sederajat</p> <p>7 Peningkatan sarana dan prasarana PAUD</p> <p>8 Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan SD, dan Peningkatan mutu tenaga pendidik</p> <p>9 Peningkatan minat baca masyarakat melalui PKBM</p>	<p>Meningkatnya akses, kualitas dan pemerataan layanan pendidikan</p>	<p>1 Peningkatan capaian APS pada usia 13-15 dan 16-18 tahun</p> <p>2 Peningkatan capaian APK pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat</p> <p>3 Peningkatan capaian APM pada tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat</p> <p>4 Pemerataan distribusi guru perkecamatan</p> <p>5 Penurunan angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat</p> <p>6 Pengentasan desa tertinggal yang belum memiliki SD sederajat</p> <p>7 Peningkatan sarana dan prasarana PAUD</p> <p>8 Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan SD, dan Peningkatan mutu tenaga pendidik</p> <p>9 Peningkatan minat baca masyarakat melalui PKBM</p>

No	RPJMD 2016-2021		RKPD 2018	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
	<p>2 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau</p> <p>3 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja</p>	<p>1 Pengurangan kasus kematian bayi, kematian ibu melahirkan, dan kematian balita yang tidak dilaporkan</p> <p>2 peningkatan penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih</p> <p>3 Pemerataan tenaga kesehatan dan sarana serta prasarana kesehatan</p> <p>4 Peningkatan program promotif yang proporsional terhadap anggaran kesehatan</p> <p>5 Peningkatan penanganan gizi buruk</p> <p>6 Peningkatan penanganan penyakit menular</p> <p>7 Peningkatan pelayanan RSUD</p> <p>1 Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja</p> <p>2 Peningkatan kapasitas penyuluh KB</p>	<p>Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas terjangkau</p> <p>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi remaja</p> <p>Meningkatnya kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal</p> <p>Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah</p> <p>Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana</p>	<p>1 Pengurangan kasus kematian bayi, kematian ibu melahirkan, dan kematian balita yang tidak dilaporkan</p> <p>2 peningkatan penanganan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih</p> <p>3 Pemerataan tenaga kesehatan dan sarana serta prasarana kesehatan</p> <p>4 Peningkatan program promotif yang proporsional terhadap anggaran kesehatan</p> <p>5 Peningkatan penanganan gizi buruk</p> <p>6 Peningkatan penanganan penyakit menular</p> <p>7 Peningkatan pelayanan RSUD</p> <p>1 Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja</p> <p>2 Peningkatan kapasitas penyuluh KB</p> <p>1 Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal</p> <p>2 Peningkatan pemberdayaan kelompok generasi muda</p> <p>3 Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi, serta pengembangan sarana</p>
5	<p>1 Meningkatnya kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan local</p> <p>2 Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah</p> <p>3 Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana</p>	<p>1 Peningkatan kualitas kelembagaan berbasis keunggulan lokal</p> <p>2 Peningkatan pemberdayaan kelompok generasi muda</p> <p>3 Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi, serta pengembangan sarana</p>	<p>Meningkatnya kelembagaan masyarakat berbasis keunggulan lokal</p> <p>Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah</p> <p>Meningkatnya kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana</p>	<p>1 Peningkatan kualitas kelembagaan berbasis keunggulan lokal</p> <p>2 Peningkatan pemberdayaan kelompok generasi muda</p> <p>3 Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi, serta pengembangan sarana</p>

No	RPJMD 2016-2021		RKPD 2018	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
	Perdagangan rakyat	perdagangan rakyat	Perdagangan rakyat	perdagangan rakyat
6	<p>1 Meningkatkan produksi dan produktivitas padi dan bahan pangan utama</p> <p>2 Meningkatkan potensi pariwisata dengan pengembangan destinasi wisata</p> <p>3 Meningkatkan potensi Perikanan budidaya dan tangkap</p> <p>4 Meningkatkan pembangunan industri maritim dan agroindustri yang terpadu dan berdaya saing</p> <p>5 Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan</p> <p>6 Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan</p> <p>7 Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja</p>	<p>1 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian atau bahan pangan utama</p> <p>2 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian</p> <p>3 Peningkatan koperasi poktan dan pemasaran produk unggulan</p> <p>4 Penanganan Desa rawan pangan</p> <p>5 Penetapan peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan</p> <p>1 Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai daerah destinasi wisata</p> <p>1 Peningkatan produktivitas potensi perikanan tangkap dan budidaya</p> <p>1 Pengembangan industri kemaritiman dan agroindustri laut yang terpadu dan berdaya saing</p> <p>1 Peningkatan produk dan produktivitas perkebunan</p> <p>1 Peningkatan produk dan produktivitas peternakan</p> <p>2 Peningkatan penanganan pada kasus peternakan</p> <p>1 Peningkatan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja</p>	<p>Meningkatnya produksi dan produktivitas padi dan bahan pangan utama</p> <p>Meningkatnya potensi pariwisata dengan pengembangan destinasi wisata</p> <p>Meningkatkan potensi Perikanan budidaya dan tangkap</p> <p>Meningkatnya pembangunan industri maritim dan agroindustri yang terpadu dan berdaya saing</p> <p>Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan</p> <p>Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan</p> <p>Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja</p>	<p>1 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian atau bahan pangan utama</p> <p>2 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian</p> <p>3 Peningkatan koperasi poktan dan pemasaran produk unggulan</p> <p>4 Penanganan Desa rawan pangan</p> <p>5 Penetapan peraturan daerah tentang pengendalian alih fungsi lahan</p> <p>1 Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai daerah destinasi wisata</p> <p>1 Peningkatan produktivitas potensi perikanan tangkap dan budidaya</p> <p>1 Pengembangan industri kemaritiman dan agroindustri laut yang terpadu dan berdaya saing</p> <p>1 Peningkatan produk dan produktivitas perkebunan</p> <p>1 Peningkatan produk dan produktivitas peternakan</p> <p>2 Peningkatan penanganan pada kasus peternakan</p> <p>1 Peningkatan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja</p>
7	1 Terwujudnya percepatan pembangunan desa	1 Peningkatan kemampuan SDM penyelenggara percepatan	Terwujudnya percepatan pembangunan desa	1 Peningkatan kemampuan SDM penyelenggara percepatan

No	RPJMD 2016-2021		RKPD 2018	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
	2 Terwujudnya pemberdayaan desa melalui kelompok binaan desa yang partisipatif	<p>pembangunan desa</p> <p>2 Pemberdayaan kelompok desa untuk peningkatan ekonomi desa</p>	Terwujudnya pemberdayaan desa melalui kelompok binaan desa yang partisipatif	<p>pembangunan desa</p> <p>2 Pemberdayaan kelompok desa untuk peningkatan ekonomi desa</p>
8	<p>1 Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi PMKS</p> <p>3 Perlindungan masyarakat dari dampak pembangunan</p> <p>4 Meningkatnya Penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat</p> <p>5 Terlaksananya pemberdayaan</p>	<p>1 Peningkatan akses keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>2 Peningkatan kemampuan usaha bagi keluarga miskin</p> <p>3 Peningkatan validitas penerima bantuan</p> <p>1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</p> <p>2 Peningkatan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3 Peningkatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kejiwaan</p> <p>4 Peningkatan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar</p> <p>5 Perlindungan sosial bagi PMKS lainnya</p> <p>1 Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang direlokasi akibat pelaksanaan pembangunan</p> <p>1 Penyediaan wadah penanaman nilai-nilai kepahlawanan</p> <p>1 Pemberdayaan keluarga dan</p>	<p>Penanggulangan Kemiskinan</p> <p>Meningkatnya perlindungan sosial bagi PMKS</p> <p>Perlindungan masyarakat dari dampak pembangunan</p> <p>Meningkatnya Penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat</p> <p>Terlaksananya pemberdayaan</p>	<p>1 Peningkatan akses keluarga miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>2 Peningkatan kemampuan usaha bagi keluarga miskin</p> <p>3 Peningkatan validitas penerima bantuan</p> <p>1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial</p> <p>2 Peningkatan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>3 Peningkatan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kejiwaan</p> <p>4 Peningkatan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar</p> <p>5 Perlindungan sosial bagi PMKS lainnya</p> <p>1 Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang direlokasi akibat pelaksanaan pembangunan</p> <p>1 Penyediaan wadah penanaman nilai-nilai kepahlawanan</p> <p>1 Pemberdayaan keluarga dan</p>

No	RPJMD 2016-2021		RKPD 2018	
	Sasaran	Strategi	Sasaran	Strategi
1	2	3	4	5
	keluarga dan Masyarakat Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	keluarga dan Masyarakat Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
6	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	1 Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan Pemulihan akibat bencana
9	1 Meningkatkan dan memantapkan infrastruktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi	1 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur dasar 1 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian	Meningkatnya dan memantapkan infrastruktur dasar dalam upaya menunjang pertumbuhan ekonomi	1 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan infrastruktur dasar 1 Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian
2	2 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah strategis dan cepat tumbuh 2 Penyediaan dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen pendukung lainnya	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah strategis dan cepat tumbuh 2 Penyediaan dokumen perencanaan tata ruang dan dokumen pendukung lainnya
3	3 Mengurangi jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal	1 Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan infrastruktur dasar di desa sangat tertinggal dan desa tertinggal 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3 Penyediaan Pasar Desa	Mengurangi jumlah desa sangat tertinggal dan desa tertinggal	1 Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan infrastruktur dasar di desa sangat tertinggal dan desa tertinggal 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3 Penyediaan Pasar Desa

4.3 Prioritas Pembangunan

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan empat hal sebagai berikut:

- 1) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Seluma yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2018;
- 2) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sembilan (9) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah; 2016-2021 guna tercapainya visi dan misi Gubernur sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2018.
- 3) Arah pembangunan tahap ke 3 RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2006-2025, yaitu dengan agenda “mewujudkan masyarakat yang beriman dan sejahtera”;
- 4) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 pada tahun ke dua;
- 5) Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma :
 - a. Pada sektor infrastruktur dasar dan pemukiman terutama pada peningkatan kualitas jalan, jembatan dan saluran drainase agar mendapatkan prioritas terutama pada akses jalan yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah yang relatif tertinggal dan peningkatan akses jalan menuju sekolah. Dari sektor pemukiman perlu peningkatan air bersih, pembangunan bedah rumah tangga miskin dan pembangunan sanitasi.
 - b. Pada sektor pendidikan terutama kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang perlu perbaikan seperti distribusi kartu Indonesia pintar, rehab kelas, pendirian SMP, pembangunan ruang kepala sekolah, pembangunan pagar, pemerataan pendidik, pengadaan meubeler sekolah, bantuan seragam sekolah, pembangunan gedung paud, dan pembangunan gedung TK.
 - c. Pada sektor kesehatan beberapa puskesmas perlu diperbaiki, distribusi kartu KIS, jamkesda dan pemerataan tenaga kesehatan didesa.
 - d. Pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan terutama pembangunan jalan sentra produksi, pembangunan saluran irigasi, dan bantuan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.
 - e. Pada sektor pariwisata terutama pembangunan sarana dan prasarana kawasan pariwisata.
 - f. Pada sektor energi beberapa desa memerlukan pembangunan listrik masuk desa dan penerangan jalan.
 - g. Bantuan sosial untuk kelompok-kelompok masyarakat.

Tabel 4.4.
Usulan DPRD Hasil Reses Untuk Pembangunan Tahun 2018

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
1	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jembatan gantung		Desa Lubuk Ngantungan	Dinas PU dan Tata Ruang
2	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Sumur Bor		Desa Lubuk Ngantungan	Dinas PU dan Tata Ruang
3	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jalan Sentral Produksi		Desa Napal Melintang	Dinas Pertanian
4	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Gorong-gorong	3 buah	Desa Napal Melintang	Dinas PU dan Tata Ruang
5	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	WC		Desa Napal Melintang	Dinas perumahan & Kawasan Perumahan
6	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jalan Sentral Produksi		Desa pagar	Dinas PU dan Tata Ruang
7		Lahan HGU & HGU PT.MMS		Desa pagar	Dinas Lingkungan Hidup
8	Program Pendidikan Anak Usia Dini	PAUD an TK		Desa Duria Bubur	Dinas Pendidikan
9	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jalan Sentral Produksi	800 m	Desa Duria Bubur	Dinas PU dan Tata Ruang
10	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Badan Jalan	200 m	Desa Duria Bubur	Dinas PU dan Tata Ruang
11		Tempat Pemakaman Umum(TPU)		Desa Simpang Tiga pagar Gasing	Dinas Lingkungan Hidup
12		Pagar dan Paping Blok Masjid		Desa Simpang Tiga pagar Gasing	Dinas PU dan Tata Ruang
13	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	MCK		Desa Simpang Tiga pagar Gasing	Dinas Perumahan &

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
					kawasan Pemukiman
14	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jalan Sentral Produksi	2.200 m	Desa Simpang Tiga pagar Gasing	Dinas PU dan Tata Ruang
15	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Siring Pasang	500 m	Desa muara Danau	Dinas PU dan Tata Ruang
16	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jalan Sentral Produksi	200 m	Desa muara Danau	Dinas PU dan Tata Ruang
17	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jalan Desa		Desa Talang Alai	Dinas PU dan Tata Ruang
18	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Siring Cacing Irigasi		Desa Talang Alai	Dinas PU dan Tata Ruang
19	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jamkesda		Desa Talang Alai	Dinas Kesehatan
20	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Infrastruktur		Desa Talang Beringin	Dinas PU dan Tata Ruang
21	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pendidikan & jalan		Desa Rimbo Besar	Dinas Pu & DISPENDIK
22	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rehab Jalan		Desa Rimbo Besar	Dinas pu
23	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	KIS & BPJS		Desa Rimbo Besar	Dinas Kesehatan
24	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pagar SD		Desa Air Latak	Dinas Pendidikan
25		Bedah Rumah		Desa Air Latak	Dinas Perumahan & kawasan Pemukiman
26	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Baju Seragam Dzikir		Kel. Talang Dantuk	Dinas Pendidikan
27	Program Pengembangan Nilai Budaya	Melestarikan Kesenian Adat		Kel. Talang Dantuk	Dinas Pendidikan
28		Rehab Puskesmas Pembantu		Kel. Talang Dantuk	Dinas

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
					Kesehatan
29		Bidan Desa		Kel. Talang Dantuk	Dinas Kesehatan
30	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jalan SD		kel. Desa Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
31		Masjid Baru		kel. Desa Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
32	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Air Bersih & Sumur Bor		kel. Desa Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
33	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	pembangunan jalan Bungamas ke PS Sembayat	500 m	Kel. Bunga Mas	Dinas PU dan Tata Ruang
34	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Lantai Jembatan		Desa Tanjung Agung	Dinas PU dan Tata Ruang
35		Gedung Kantor Desa		Desa Talang Tinggi	Dinas PU dan Tata Ruang
36	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jalan Sentral Produksi	700 m	Desa Talang Tinggi	Dinas PU dan Tata Ruang
37		Honor Ketua RT		Kel. Rimbo Kedui	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
38	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	KIP & KIS			Dinas Kesehatan
39	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	<i>Rehab jalan Tais ke Pasar Seluma</i>		Desa pasar Seluma	Dinas PU dan Tata Ruang
40	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan Irigasi		Desa Sekuang	Dinas PU dan Tata Ruang
41	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jembatan Penghubung Rimbo Kedui ke Padang Rambun	1,5 km	Kel. Rimbo Kedui	Dinas PU dan Tata Ruang
42	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembuatan Loning & Dinding Jembatan Dijalan Poros		Kel. Padang Rambun	Dinas PU dan Tata Ruang

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
43	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Perbaikan Jalan Padang Rambun Menuju Kantor DPMD	2 km	Kel. Padang Rambun	Dinas PU dan Tata Ruang
44	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehab Gedung SD		Desa tanjung Seluai	Dinas Pendidikan
45	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Hotmik Kel. Puguk ke desa Lubuk Resam		Kel. Puguk	Dinas Pu
46	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Perbaikan Jalan Kel. Puguk Menuju Desa talang Rami		Kel.puguk	Dinas Pu
47	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Membuka Keterisoliran desa sinar pagi, Batu Ampar, sekalak		Desa sinar Pagi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
48	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Bantuan Mesin Perontok Padi		Kel. Puguk	Dinas Pertanian
49	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan poros Purbo Sari & jalan usaha Tani		Desa Purbo Sari	Dinas PU dan Tata Ruang
50	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rehab Jembatan Desa Sekuang Jaya Ke Desa Lunjuk	15 m	Desa Sekuang Jaya	Dinas PU dan Tata Ruang
51	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Hotmik KEL. Puguk Ke Desa Talang Empat		Kel. Puguk-Desa Talang Empat	Dinas PU dan Tata Ruang
52	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Hotmik Lubuk Resan Ke Kel. Puguk		Desa lubuk Resam-Kel.Puguk	Dinas PU dan Tata Ruang
53	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	jembatan Gantung Menjadi Jembatan Permanen		Kel. Puguk	Dinas PU dan Tata Ruang
54	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jalan hotmik Dari Desa Pandan Ke Kel. Puguk		Desa Pandan-Kel.Puguk	Dinas PU dan Tata Ruang
55	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Lapen Desa	2 km	Desa Talang Rami	Dinas PU dan Tata Ruang
56	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengerasan Jalan Tanjung Agung-Talang Rami	2 km	Desa Talang Rami	Dinas PU dan Tata Ruang
57	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jembatan penghubung Dusun I Ke Dusun II	9 m	Desa Talang Rami	Dinas PU dan Tata Ruang

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
58	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Tembusan Talang rami Ke Kel Dusun baru	8 Km	Desa Talang Beringin	Dinas PU dan Tata Ruang
59	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Talang Beringin Menuju Ke Kel. Puguk		Desa talang Beringin	Dinas PU dan Tata Ruang
60	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendirian SLTP satu atap Desa Talang Rami & Talang Beringin		Desa Talang Beringin	Dinas Pendidikan
61	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	pembangunan Jalan sentral pertanian	2 km	Desa Riak Siabun 1	Dinas PU dan Tata Ruang
62		Isentif Majelis Taklik & Kader Posyandu		Desa Riak Siabun	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
63	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan TALUT & TPU		Desa Jengalu	Dnas lingkungan Hidup
64	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Mohon bantuan pengerasan Regis di hutan buruh	5 km	Hutan Buruh	Dinas Lingkungan Hidup
65	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	penambahan Jalan Desa Cawang menuju Arang sapat		Desa Cawang	Dinas PU dan Tata Ruang
66	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	pelapis Tebing		Desa Cawang	Dinas PU dan Tata Ruang
67	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembatas Badan jalan		Desa Cawang	Dinas PU dan Tata Ruang
68	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	pembangunan Jalan Sentral Produksi Cawang Ke Lbk sandi		Desa Cawang	Dinas PU dan Tata Ruang
69	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Usulan Pembuatan gantung Menjadi Jembatan Permanen			Dinas PU dan Tata Ruang
70		Permohonan Pembuatan Masjid		Desa Cawang	Dinas PU dan Tata Ruang
71		Permohonan peresmian Objek Wisat Air Terjun Curup Tiga		Desa Cawang	Dinas Pariwisata

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
					pemuda & Olaraga
72	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Permohonan Jembatan Beton Dusun Tenga ke Arang sapat	4 buah	Desa arang Sapat	Dinas PU dan Tata Ruang
73		Pembangunan Pagar Masjid & Pagar Kantor Desa		Desa Tabah Lubuk Puding	Dinas PU dan Tata Ruang
74		Honor Linmas & Pemegang Adat Desa		Desa Tabah Lubuk Puding	Dinas Pemberdayan Masyarat & Desa
75	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pembangunan Lampu Jalan		Desa Tabah Lubuk Puding	Dinas Perumahan & kawasan Pemukiman
76	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Mohon untuk Direalisasikan aliran Listrik Bukti Gadis Dusun IV		Desa Tabah Lubuk Puding	Dinas Perumahan & kawasan Pemukiman
77	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalann Hotmik	5 km	Desa Talang Benuang	Dinas PU dan Tata Ruang
78	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pembangunan Lampu Jalan		Desa Talang Benuang	Dinas Perumaha & Kawasan Pemukiman
79	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan Siring Pasang	4 km	Desa Talang Benuang	Dinas PU dan Tata Ruang
80	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Gang Talang Benuang-Lokasi Baru		Desa Talang Benuang	Dinas PU dan Tata Ruang
81	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jalan Pehhubung desa Lokasi Baru-talang benuan	500 m	Desa Talang Benuang	Dinas PU dan Tata Ruang
82	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan SMP 23 Menuju SD IT		Kel. Sukaraja	Dinas PU dan Tata Ruang

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
83	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Lubuk Sahung Ke PTPN VII		Kel. Sukaraja	Dinas PU dan Tata Ruang
84	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan Jalan Hotmik Lingkungan Perluasan Sukaraja		Kel. Sukaraja	Dinas PU dan Tata Ruang
85	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di RT. V, VI, dan VII		Kel. Dermayu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
86	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) 0 - 16 Tahun RT. V, VI, dan VII		Kel. Dermayu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
87	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Bantuan Alat Kesenian Kasida dan Rabana di RT. 05	1 Set	Kel. Dermayu	Dinas Pendidikan
88	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Bantuan Penerangan lampu jalan di RT. 06	43 KK	Kel. Dermayu	Dinas Pendidikan
89	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Ruang Kelas SMPN 38 Seluma	2 Lokal	Desa Riak Siabun	Dinas Pendidikan
90	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Bangunan Pagar, Paping Blok dan Ruangan Guru SDN 105 Seluma		Desa Riak Siabun	Dinas Pendidikan
91	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Hotmix jalan baru Kadun I - Kadun II	100 m	Desa Lokasi Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
92	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembuatan Siring Pasang		Desa Lokasi Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
93	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Tenaga Guru, Ruang Kepsek dan Ruang Kelas beserta Meubeler		Desa Lokasi Baru	Dinas Pendidikan
94	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembuatan jalan desa dari Air Kemuning - Padang Ulak Tanding	4 Km	Desa Air Kemuning	Dinas PU dan Tata Ruang
95	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Jembatan Penghubung dari Desa Air		Desa Air Kemuning	Dinas PU dan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
		Kemuning - Bukit Betung			Tata Ruang
96	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Hotmix	1200 m	Desa BP II	Dinas PU dan Tata Ruang
97	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan saluran Irigasi untuk sawah		Desa BP II	Dinas PU dan Tata Ruang
98	Program Pengembangan Perumahan	Bedah Rumah		Desa Sidosari	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
99	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kartu Jamkesmas		Desa Sidosari	Dinas Kesehatan
100	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan desa Sidoluhur - desa Sidosari		Desa Sidosari	Dinas PU dan Tata Ruang
101	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengaspalan Jalan	3,5 km	Desa Sumber Arum	Dinas PU dan Tata Ruang
102	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jembatan penghubung desa Sumber Arum - Riak Siabun		Desa Riak Siabun	Dinas PU dan Tata Ruang
103	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan Gorong-Gorong dekat jembatan		Desa Riak Siabun	Dinas PU dan Tata Ruang
104	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Perbaikan kerusakan jalan hotmix		BP I	Dinas PU dan Tata Ruang
105	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Kabupaten	1,5 Km	Desa Kungkai Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
106	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan wisata alam	500 m	Desa Kungkai Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
107	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengeringan lokasi rawah-rawah yang tidak produktif		Desa Kungkai Baru	Dinas Pertanian
108	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan Evakuasi dari desa Tawang Rejo - Sumber Makmur	2 Km	Desa Tawang Rejo	BPBD
109	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan Tawang Rejo - Kungkai Baru	1,5 Km	Desa Tawang Rejo	Dinas PU dan Tata Ruang

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
110	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengaspalan jalan poros (jalan Kabupaten) dari Talang Alai - Padang Pelasan	500 m	Desa Talang Alai	Dinas PU dan Tata Ruang
111	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan poros dari Desa Talang Alai - Talang Giring	7 Km	Desa Talang Alai	Dinas PU dan Tata Ruang
112	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan lapen di desa Sumber Makmur - Tawang Rejo	2 km	Desa Sumber Makmur	Dinas PU dan Tata Ruang
113	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan lapen di Desa Sumber Makmur - Sari Mulyo	3 Km	Desa Sumber Makmur	Dinas PU dan Tata Ruang
114	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan kabupaten	1,5 Km	Desa Kungkai Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
115	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan wisata alam	500 m	Desa Kungkai Baru	Dinas PU dan Tata Ruang
116	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pengeringan lokasi rawah-rawah yang tidak produktif		Desa Kungkai Baru	Dinas Pertanian
117	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengaspalan jalan poros (SK PU) dari Desa Talang Giring - Talang Alai	2 Km	Desa Talang Giring	Dinas PU dan Tata Ruang
118	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengaspalan jalan poros (SK PU) dari Desa Talang Giring - Talang Sebaris	2 Km	Desa Talang Giring	Dinas PU dan Tata Ruang
119	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jembatan permanen	100 m	Desa Talang Giring	Dinas PU dan Tata Ruang
120	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan beronjong Air Sindur	500 m	Desa Pasar Ngalam	Dinas PU dan Tata Ruang
121		Pembangunan Pagar Makam Desa	250 m	Desa Pasar Ngalam	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
122		Pembangunan Masjid Al Mutaqim	1 set	Desa Pasar Ngalam	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
123	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rehab gedung TK Cempaka	1 Unit	Desa Pasar Ngalam	Dinas

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
					Pendidikan
124	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan beronjong Air Sindur		Desa Keban Agung	Dinas PU dan Tata Ruang
125		Rehab Gedung Posyandu	1 Unit	Desa Keban Agung	Dinas Kesehatan
126	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rehab Gedung SDN 126 Seluma		Desa Keban Agung	Dinas Pendidikan
127	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengaspalan jalan desa Lawang Agung	1,5 Km	Desa Lawang Agung	Dinas PU dan Tata Ruang
128	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jembatan gantung menuju lokasi pertanian dan perkebunan		Desa Lawang Agung	Dinas PU dan Tata Ruang
129		Rehab Pustu	1 Unit	Desa Lawang Agung	Dinas Kesehatan
130	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengorolan jalan dari Agri - Desa Minggir Sari	1 Km	Desa Tumbu'an	Dinas PU dan Tata Ruang
131	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Pembuatan rambu-rambu penyebrangan depan SD		Desa Tumbu'an	Dinas PU dan Tata Ruang
132		Pembuatan Pelapis tebing dan pagar pemakaman Umum		Desa Taba	Dinas Lingkungan Hidup
133	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan gedung TK	1 Unit	Desa Napalan	Dinas Pendidikan
134	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Permohonan bantuan perluasan lokasi pemakaman		Desa Simpang Tiga pagar Gasing	Dinas Lingkungan Hidup
135	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pembuatan jalan sentral produksi (Jalan Usaha Tani)	2,8 Km	Desa Kampai	Dinas Pertanian
136	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Mohon pendataan ulang penerimaan Kartu Indonesia Sehat (KIS)		Desa Lubuk Gadis	Dinas Kesehatan
137		Meminta kejelasan masalah HGU PT. Manna Raya Putra		Daerah Tebing Penago	Dinas Lingkungan Hidup

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
138	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan dan beronjong		Desa Muara Simpur	Dinas PU dan Tata Ruang
139	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan Desa Giri Mulyo - Giri Nanto		Simpang 3 Giri Nanto	Dinas PU dan Tata Ruang
140	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jembatan penghubung desa Giri Nanto - Giri Mulya		Simpang 3 Giri Nanto	Dinas PU dan Tata Ruang
141	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan Marga Mulya - Banyu Kencana dan Rehab lantai jembatan		Desa Banyu Kencana	Dinas PU dan Tata Ruang
142	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rehab jembatan Dijalan Poros	5 Unit	Desa Giri Mulya	Dinas PU dan Tata Ruang
143	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan poros		Desa Giri Mulya	Dinas PU dan Tata Ruang
144	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Drainase		Desa Giri Mulya	Dinas PU dan Tata Ruang
145	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan pelapis Tebing		Desa Giri Mulya	Dinas PU dan Tata Ruang
146	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jembatan Dijalan yos Sudarso		Desa Mekar Jaya	Dinas PU dan Tata Ruang
147	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengaspalan Desa Simpur Ijang-Mekar Sari		Desa Mekar Jaya	Dinas PU dan Tata Ruang
148	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jembatan Dijalan yos Sudarso		Desa Mekar Jaya	Dinas PU dan Tata Ruang
149	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pembukaan Jalan Sentral Produksi Dusun IV		Desa Mekar Jaya	Dinas PU dan Tata Ruang
150	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan poros di Desa Air Keruh - Simpur Ijang		Desa Hargo Binangun	Dinas PU dan Tata Ruang
151	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan jalan sentral produksi		Desa Hargo Binangun	Dinas PU dan Tata Ruang
152	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Stadion Mini	1 Unit	Desa Hargo Binangun	Dinas Pariwisata, Pemuda &

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
					Olahraga
153	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan Irigasi		Desa Hargo Binangun	Dinas PU dan Tata Ruang
154		Pembangunan Tower Telkomsel atau Lainnya		Desa Hargo Binangun	Dinas Komunikasi dan Informatika
155	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Bantuan peningkatan taraf hidup masyarakat		Desa Air Keruh	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
156	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Pagar Sekolah		Desa Pagar Banyu	Dinas Pendidikan
157	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan lingkaran desa		Desa Pagar Banyu	Dinas PU dan Tata Ruang
158	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Penempatan Guru PNS untuk TK (Kekurangan PTK)		Desa Pagar Banyu	Dinas Pendidikan
159	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Penyaluran air bersih		Desa Pagar Agung	Dinas PU dan Tata Ruang
160	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembuatan jembatan gantung		Desa Pagar Agung	Dinas PU dan Tata Ruang
161	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Perbaikan jalan lingkaran desa		Desa Pagar Agung	Dinas PU dan Tata Ruang
162	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembuatan tempat wudhu dan WC Masjid	1 Set	Desa Jambat Akar	Dinas PU dan Tata Ruang
163	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan siring Irigasi Cacing dari Tebat Ulu - Persawahan Jambat Akar		Desa Jambat Akar	Dinas PU dan Tata Ruang
164	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Bantuan Saluran air bersih	500 m	Desa Maras Bantan	Dinas PU dan Tata Ruang
165	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan dan jembatan ke SMA Jambat Akar (Rusak Berat)		Desa Maras Bantan	Dinas PU dan Tata Ruang

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
166	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Rehab jalan dari Simpang Muara Maras - Maras Bantan	4 Km	Desa Maras Bantan	Dinas PU dan Tata Ruang
167	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengaspalan jalan lingkaran desa	1,5 Km	Desa Petai Kayu	Dinas PU dan Tata Ruang
168	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan pagar sekolah SLTPN 04 Seluma			Dinas Pendidikan
169	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Bantuan alat-alat pertanian		Desa Padang Serunaian	Dinas Pertanian
170	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pembangunan WC di SD		Desa Padang Serunaian	Dinas Pendidikan
171	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan Beronjong	500 m	Desa Talang Kemang	Dinas PU dan Tata Ruang
172	Program Pengembangan Perumahan	Bedah Rumah yang tidak layak huni	20 Unit	Desa Talang Kemang	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
173	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan saluran irigasi/siring cacing untuk persawahan masyarakat		Desa Talang Kemang	Dinas Pertanian
174	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pemasangan siring pasang	2 Km	Desa Talang Alai	Dinas PU dan Tata Ruang
175	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Pembangunan beronjong	160 m	Desa Talang Alai	Dinas PU dan Tata Ruang
176	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pembangunan jalan lapen desa Sendawar - Air Melancar		Desa Sendawar	Dinas PU dan Tata Ruang
177	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan jaringan irigasi		Desa Air Melancar	Dinas PU dan Tata Ruang
178	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Penambahan Ruang Kelas SD		Desa Air Melancar	Dinas Pendidikan
179	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Peningkatan jalan lingkungan desa Muara Timput - Talang Beringin	1 Km	Desa Muara Timput	Dinas PU dan Tata Ruang
180		Pembangunan pemecah ombak dan		Desa Muara Timput	Dinas PU dan

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD terkait
		drainase Peramba Bungo Kuning			Tata Ruang
181	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Permohonan bantuan koperasi untuk kegiatan masyarakat		Desa Muara Timput	Dinas Perindagkop
182	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Permohonan bantuan karang taruna untuk kegiatan masyarakat		Desa Muara Timput	Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga
183	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Pembangunan jalan sentral produksi		Desa Serian Bandung	Dinas PU dan Tata Ruang

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ada sembilan agenda prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

4.3.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, ada 15 prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu antara lain :

1. Bengkulu Bersih dan Profesional
2. Bengkulu Maju
3. Bengkulu Cerdas
4. Bengkulu Sehat
5. Bengkulu Mapan
6. Bengkulu Maju
7. Bengkulu Cerdas
8. Bengkulu Sehat
9. Bengkulu Mapan
10. Bengkulu Maju
11. Bengkulu Maju
12. Bengkulu Mapan
13. Bengkulu Maju
14. Bengkulu Berbudaya
15. Bengkulu Beriman

Tabel 4.5.
Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu

NO	MISI RPJMD	PRIORITAS
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (good governance and clean government)	- Bengkulu Bersih dan Profesional - Bengkulu Maju
2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal	- Bengkulu Cerdas - Bengkulu Sehat - Bengkulu Mapan
3.	Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis	- Bengkulu Maju - Bengkulu Cerdas - Bengkulu Sehat
4.	Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan	- Bengkulu Mapan - Bengkulu Maju
5.	Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang	- Bengkulu Maju

NO	MISI RPJMD	PRIORITAS
	integratif dan berdaya saing	
6.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Bengkulu Mapan
7.	Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	- Bengkulu Maju
8.	Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, dan demokratis	- Bengkulu Berbudaya - Bengkulu Beriman

4.3.3 Prioritas RPJMD Kabupaten Seluma

Tema kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2018 yakni **“Peningkatan infrastruktur penunjang sektor unggulan”**. Adapun fokus pembangunan pada tahun 2018 yakni :

1. Pembangunan pada infrastruktur penunjang sektor unggulan
2. Pembangunan pada infrastruktur dasar
3. Pembangunan pada infrastruktur desa/daerah tertinggal

Indikator sasaran prioritas pembangunan pada tahun 2018 dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Indikator sasaran prioritas pembangunan pada tahun 2018

NO	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2018	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
	Peningkatan Infrastruktur penataan kabupaten dan sektor unggulan		
1	Program Pembangunan jalan dan jembatan ke sektor unggulan	85%	Dinas PU dan PR
	Sektor pertanian dan perkebunan		
	Sektor perikanan dan kelautan		
	Sektor peternakan		
	Sektor pariwisata		
2	Bundaran Jalan yang terbangun (unit)	4	Dinas PU dan PR
3	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (buah)	1	Dinas Lingkungan Hidup
4	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (buah)	4	Dinas Lingkungan Hidup
5	Jumlah Gedung Olahraga (GOR) yang dibangun (buah)	1	Dinas pemuda, olahraga dan pariwisata
	Peningkatan infrastruktur pendidikan		
1	jumlah perpustakaan yang ada di tingkat SD (unit)	14	Dinas Pendidikan
2	Prosentase tenaga pendidik SD yang sudah tersertifikasi (%)	84,16	Dinas Pendidikan

NO	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2018	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4
3	Jumlah PKBM	57	Dinas Pendidikan
4	Jumlah Desa yang belum memiliki Paud (desa)	57	Dinas Pendidikan
	Peningkatan infrastruktur kesehatan		
1	Jumlah puskesmas rawap inap	11	Dinas Kesehatan
2	jumlah puskesmas yang terakreditasi	17	Dinas Kesehatan
3	Tipe RSUD	B	RSUD
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi		
1	BLK yang direhabilitasi (Unit)	1	Dinas Nakertrans
2	Pengembangan koperasi mandiri	10	Dinas perindagkop

Adapun program prioritas pembangunan pada tahun 2018 pendanaannya dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Program prioritas pembangunan pada tahun 2018

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	Program Pembangunan jalan dan jembatan	Program Pembangunan jalan dan jembatan	85%
		Bundaran Jalan yang terbangun (unit)	4
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	jumlah perpustakaan yang ada di tingkat SD (unit)	14
3	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM	57
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Desa yang belum memiliki Paud (desa)	57
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah puskesmas rawap inap	11
6	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Tipe RSUD	B

4.3.4 Prioritas RKPD Tahun 2018

Prioritas pembangunan Kabupaten Seluma tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional, yakni:

1. Komitmen-komitmen nasional, seperti program pembangunan yang berkeadilan (penanggulangan kemiskinan dan *Sustainable Development Goals/SDG's*) sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;

2. Sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum RPJMN Tahun 2015-2019.
3. Sasaran Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021;
4. Arah pembangunan tahap ke - 3 RPJPD Kabupaten Seluma Tahun 2006-2025, yaitu agenda ke tiga : “mewujudkan masyarakat yang beriman dan sejahtera”.
5. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Seluma pada penyusunan RKPD 2018.
6. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016 dan Tahun 2017 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Seluma yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2018.

Penyusunan prioritas program/kegiatan SKPD disusun dengan menggunakan beberapa kriteria, antara lain:

- 1) Kegiatan Unggulan dan Prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD Tahun 2018;
- 2) Program/Kegiatan yang mengarah pada pemecahan isu strategis Kabupaten Seluma Tahun 2018.
- 3) Program/ Kegiatan yang mengarah pada sasaran pada RPJMD kabupaten Seluma Tahun 2016-2021.
- 4) Program/ Kegiatan yang mengacu pada tema dan focus pembangunan tahun 2018.
- 5) Program/ Kegiatan yang mendesak untuk segera ditangani pada tahun 2018.
- 6) Program/Kegiatan yang mengarah pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
- 7) Program/Kegiatan yang sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's), meliputi 17 tujuan yaitu:
 - a. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun.
 - b. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan.
 - c. Memastikan hidup sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia.
 - d. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
 - e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
 - f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua.
 - g. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.

- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua.
- i. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi.
- j. Mengurangi ketimpangan di dalam dan diantara negara-negara.
- k. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- l. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumberdaya untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
- p. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4.8.
Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dan Focus Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Focus Pembangunan
1	2	3
1	Pengembangan sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perikanan	Focus pembangunan Bidang Pertanian diarah kepada <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pertanian 2. Peningkatan produksi tanaman pangan. 3. Peningkatan produksi tanaman perkebunan, 4. Peningkatan produksi perternakan. 5. Pembangunan desa mandiri pangan. 6. Peningkatan sumber daya penyuluh. Focus pembangunan bidang pariwisata : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana bidang pariwisata. 2. Pengembangan kawasan wisata. FOCUS bidang perikanan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan.

No	Prioritas Pembangunan	Focus Pembangunan
1	2	3
		2. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya. 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perikanan. 4. Pengembangan kawasan nelayan terpadu.
2	Peningkatan infrastruktur desa/daerah tertinggal dan infrastruktur dasar	Focus pembangunan bidang infrastruktur : 1. Peningkatan jalan dan jembatan desa/daerah tertinggal 2. Peningkatan jalan dan jembatan kawasan nelayan terpadu. 3. Peningkatan saluran irigasi. 4. Penyediaan air bersih. 5. Peningkatan sanitasi permukiman.
3	Peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan	Fokus pembangunan Bidang Pendidikan diarah kepada : 1. Pembangunan sarana dan prasarana bidang pendidikan 2. Peningkatan mutu tenaga pendidik Wajar Sembilan Tahun 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan non formal 4. Peningkatan kesesuaian guru berdasarkan pendidikan dan distribusi yang merata di kecamatan Fokus pembangunan Bidang kesehatan diarah kepada : 1. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita 2. Peningkatan Akreditasi bagi puskesmas 3. Peningkatan Tipe RSUD Tais menjadi B 4. pengendalian dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari binatang Fokus pembangunan Bidang kesehatan diarah kepada : 1. Penataan administrasi kependudukan 2. Optimalisasi peran PPID 3. Peningkatan pelayanan perizinan satu atap 4. Pembangunan loket pelayanan bagi OPD 5. Percepatan tindak lanjut temuan BPK dan Penguatan kapasitas APIP dan SPIP 6. Optimalisasi pencapaian opinin atas laporan keuangan menjadi WDP
4	Percepatan Pembangunan Desa	Fokus pembangunan Percepatan pembangunan desa diarahkan kepada : 1. Pembentukan dan optimalisasi peran BUMDES dalam meningkatkan ekonomi desa 2. Peningkatan kapasitas aparatur desa 3. Peningkatan kapasitas tenaga kerja di desa dalam mengembangkan kewirausahaan

No	Prioritas Pembangunan	Focus Pembangunan
1	2	3
		4. Percepatan pembangunan desa di kawasan pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan 5. Pembentukan desa mandiri pangan 6. Peningkatan sarana dan prasarana pasar desa

4.4 Sasaran Pembangunan Daerah

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Perumusan program prioritas tahun 2018 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Kabupaten Seluma guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2018 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Seluma Tahun 2018, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui Program Prioritas Daerah Tahun 2018 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang jelas, sederhana, terukur dan dapat tercapai dalam kurun waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Indikator dan target capaian sasaran pembangunan di Kabupaten Seluma disusun sebagai bagian dari capaian terhadap kinerja sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Organisasi Perangkat Daerah (RKPD). Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran daerah atau IKU Kota didalam Organisasi Perangkat Daerah (RKPD). menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RKPD). yang didalam perhitungan indikator Renstra OPD memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator kinerja utama RPJMD.

Pencapaian sasaran pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahun 2018 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Seluma bergeser dari **money follow function** menuju **money follow priority program**, yaitu alokasi anggaran

diarahkan pada Program Prioritas Pembangunan Daerah guna memenuhi target sasaran RPJMD dan SPM yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran program prioritas daerah disusun berdasarkan aspek *holistik, tematik, integratif* dan *spasial*.

Tabel 4.9.
Indikator sasaran RKPD Tahun 2018 berdasarkan focus pembangunan

No	Focus Pembangunan	Kinerja	
		Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Pengembangan sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perikanan	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan	5 kelompok
		Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten	70 orang
		Persentase Jumlah Balai Benih Ikan, Pokdakan yang bersertifikat CBIB	20%
		Jumlah Armada Tangkap Berukuran 5 GT Ke bawah	237 unit
		Produksi Perikanan Tangkap	1,771 ton
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan: Penyuluh, Pembudidaya, Nelayan, Pengolah	200 orang
		Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu	2 kawasan
		Produksi Perikanan Budidaya	236 ton
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan: Penyuluh, Pembudidaya, Nelayan, Pengolah	200 orang
		Rata-rata lama tinggal	1 hari
		Jumlah Wisatawan Mancanegara	25 orang
		Jumlah Wisatawan Nusantara	75 orang
		Persentasi Tingkat hunian hotel	5%

No	Focus Pembangunan	Kinerja	
		Sasaran	Target
1	2	3	4
		Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan	6 desa
		Jumlah Penyuluh jumlah desa rawan pangan dengan prioritas 1 dan 2	64 penyuluh 40 desa
		Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina	6 desa
		Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan	1 kawasan
		Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan	1 kawasan
		jumlah desa rawan pangan dengan prioritas 1 dan 2	40 Desa
		Jumlah gapoktan untuk pengembangan packaging beras	10 Gapoktan
		Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun	6 desa
		Jumlah puskesmas yang terbangun	5 unit
		Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan	6 Desa
		Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan	1 Kawasan
		Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina	6 Desa
		Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun	6 Desa
		Produksi Kelapa Sawit	66,807 ton
		Produksi Kelapa	1,311 ton
		Rasio jalan sentra produksi	2,220 Meter / Ha
		Produksi Kedelai	1,271 ton
		Produksi Jagung	1,746 ton
		Produksi Karet	26,136 ton
		Produksi Jagung	1,746 Ton
		Jumlah cetak sawah yang akan di perluas	100 hektar
		Produksi Tanaman Padi	59,461 ton
		Jumlah cetak sawah yang akan di perluas	100 Hektar

No	Focus Pembangunan	Kinerja	
		Sasaran	Target
1	2	3	4
		Produksi Tanaman Padi Produksi Kedelai Tenaga IB Jumlah Sentra Pernakan Rakyat (SPR) Persentase jumlah ternak diobati	59,461 Ton 1,271 Ton 10 orang 3 unit 56%
2	Peningkatan infrastruktur desa/daerah tertinggal dan infrastruktur dasar	Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu Panjang saluran Irigasi dalam Kondisi Baik/Sedang Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak Jumlah RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban dampak pembangunan dan terkena relokasi Jumlah terminal yang dibangun	2 kawasan 126 Meter 24% 36% 1 Dokumen 100% 1 Buah
3	Peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan	Jumlah Desa yang belum memiliki Paud Jumlah perpustakaan yang ada di tingkat SD Jumlah desa tertinggal yang belum memiliki SD APM usia 13-15 tahun Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP (Kecamatan) Persentase SLTP yang ter-akreditasi APS usia 13-15 tahun Jumlah angkutan sekolah APK usia 13-15 tahun	57 Desa 149 Unit 9 Desa 80% 4 Unit 55 Sekolah 98% 3 Unit 91%

No	Focus Pembangunan	Kinerja	
		Sasaran	Target
1	2	3	4
		Jumlah PKBM	57 Unit
		Prosentase tenaga pendidik SMP yang sudah tersertifikasi	69%
		Persentase guru SD yang berpendidikan minimal S1	50%
		Loket pelayanan dan ruang tunggu	1 OPD
		Angka Kematian Ibu 100.000 kelahiran hidup	103 Jiwa / 100.000 Kelahiran
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran	3 Jiwa / 1.000 Kelahiran
		Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	13 Jiwa / Kelahiran
		Rasio anggaran program promotif terhadap total anggaran kesehatan	1%
		Prosentase gizi buruk	0%
		Pengawasan mutu air minum depot air minum	10 unit
		Pengembangan lingkungan sehat	14 Kecamatan
		Jumlah puskesmas rawat inap	11 Unit
		Rasio dokter per 1.000 penduduk	0 Jiwa / 1.000 Penduduk
		Prosentase desa yang memiliki bidan desa	94%
		Prosentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%
		Jumlah puskesmas yang terakreditasi	17 Unit
		Rasio posyandu per 1.000 balita	22 Jiwa / 1.000 Balita
		Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk	11 Jiwa / 100.000 Penduduk
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	1 Jiwa / 1.000 Penduduk

No	Focus Pembangunan	Kinerja	
		Sasaran	Target
1	2	3	4
		Prosentase kasus rabies yang sudah ditangani	100%
		RSUD Tipe B	1 OPD
		RSUD Tipe B	1 OPD
		Jumlah Dokter RSUD Tipe B	22 Orang
		RSUD Tipe B	1 OPD
		RSUD Tipe B	1 OPD
		Prosentase penduduk yang memiliki akte kematian	60%
		Prosentase Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK	70%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	70%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Nikah	85%
		Prosentase PPID Pembantu	80%
		Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis)	52 Dokumen
		Rata-rata lama penerbitan surat perizinan / non perizinan administrasi	2 Hari
		Jumlah kecamatan yang telah menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Kecamatan
		Nilai IKM bidang pelayanan perizinan terpadu	50%
		Prosentase tindaklanjut temuan BPK	80%
		Prosentase kasus yang terselesaikan	75%
		Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 Poin
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2 Poin

No	Focus Pembangunan	Kinerja	
		Sasaran	Target
1	2	3	4
		Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD Locket pelayanan dan ruang tunggu Opini atas laporan keuangan WDP Locket pelayanan dan ruang tunggu Prosentase Guru SLTP berpendidikan minimal S1 Prosentase kesesuaian ASN berdasarkan pendidikan Prosentase Pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM Prosentase distribusi guru per kecamatan Prosentase pembentukan kelembagaan inovasi daerah	80% 1 OPD 60 OPD 1 OPD 50% 50% 50% 50% 60%
4	Focus percepatan Pembangunan Desa	Jumlah BUMDES yang dibentuk di desa Persentase Aparat desa yang di tingkatkan kapasitasnya Jumlah BUMDES yang dibina dan dikembangkan di desa	15 Unit 60% 15 Unit

BAB V

RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Seluma. Program prioritas yang direncanakan dibiayai Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif, topdown dan bottom-up. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 409 UU No. 23 Tahun 2014) hal ini berdampak

pada pembagian pengurusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bidang kehutanan.

Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kota/kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan *Pelayanan Dasar* meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan *Pelayanan Dasar* meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;

10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Sehubungan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai konsekwensi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan urusan penunjang dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

3. Dinas Kesehatan
4. Rumah Sakit Umum Daerah
5. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11. Dinas Sosial
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Dinas Ketahanan Pangan
5. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
6. Dinas Lingkungan Hidup
7. Administrasi Kependudukan dan Capil
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
11. Dinas Komunikasi dan Informatika
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Pilihan

1. Dinas Perikanan
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3. Dinas Ketahanan Pangan

4. Dinas Pertanian
5. Dinas Ketahanan Pangan
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Sekretariat Daerah

- a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- b) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- c) Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan
- d) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- e) Bagian Hukum
- f) Bagian Organisasi dan Kepegawaian
- g) Bagian Humas dan Protokol
- h) Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA
- i) Bagian Administrasi Pembangunan
- j) Bagian Administrasi Layanan Pengadaan

2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Badan Penelitian dan Pengembangan

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

7. PPKD

8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

9. Badan Penelitian dan Pengembangan

10. Kecamatan Sukaraja

11. Kecamatan Air Periukan

12. Kecamatan Lubuk Sandi

13. Kecamatan Seluma

14. Kecamatan Seluma Barat

15. Kecamatan Seluma Utara

16. Kecamatan Seluma Selatan

17. Kecamatan Seluma Timur
18. Kecamatan Talo
19. Kecamatan Ulu Talo
20. Kecamatan Ilir Talo
21. Kecamatan Talo Kecil
22. Kecamatan Semidang Alas
23. Kecamatan Semidang Alas Maras

5.1 Rincian Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018

5.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. pendidikan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Rincian Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRsAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1,01	Pendidikan		
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 01	Dinas Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Desa yang belum memiliki Paud	57 Desa
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah desa tertinggal yang belum memiliki SD	9 desa
		Jumlah perpustakaan yang ada di tingkat SD	149 Unit
		Jumlah desa tertinggal yang belum memiliki SD	9 Desa
		APM usia 13-15 tahun	80%

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRsAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP (Kecamatan)	4 Unit
		Persentase SLTP yang terakreditasi	55 Sekolah
		APS usia 13-15 tahun	98%
		Jumlah angkutan sekolah	3 Unit
		APK usia 13-15 tahun	91%
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah PKBM	57 Unit
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase tenaga pendidik SMP yang sudah tersertifikasi	69%
		Persentase Guru SLTP berpendidikan minimal S1	50%
		Persentase guru SD yang berpendidikan minimal S1	50%
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pelayanan manajemen informasi pendidikan	1 OPD
1.01 . 1.01.01 . 01 . 24	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pengembangan nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan beragama	14 Kecamatan
1.01 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
1.01 . 2.18.01 . 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
1.01 . 2.18.01 . 01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	14 Kecamatan
1.01 . 2.18.01 . 01 . 23	program pelayanan perpustakaan	Pelayanan perpustakaan Kabupaten dan Kecamatan	14 Kecamatan

Pada tahun 2018 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki target indikator sasaran selama 12 bulan untuk indikator sasaran penyediaan administrasi kantor, program peningkatan sumber daya aparatur memiliki indikator sasaran di targetkan sebanyak 30 ASN sebagai peningkatan kapasitas bagi ASN, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 2 indikator sasaran yaitu indikator sasaran yang pertama pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai indikator pertama dengan target selama 12 bulan, indikator sasaran yang ke dua Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan dengan target indikator sasaran selama 12 bulan sebagai peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan. Program pendidikan anak usia dini memiliki target indicator sasaran sebanyak 57 Desa yang belum memiliki

Paud, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun memiliki 9 indikator sasaran diantaranya pada indikator sasaran APM usia 13-15 tahun dengan target sasaran 80%, dan target indikator sasaran sebanyak 149 untuk Jumlah perpustakaan yang ada di tingkat SD, Program Pendidikan Non Formal memiliki target indikator sasaran sebanyak 57 unit untuk jumlah PKBM. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki 3 indikator sasaran diantaranya yaitu Prosentase tenaga pendidik SMP yang sudah tersertifikasi dengan jumlah target indikator sasaran sebanyak 69%, Program manajemen pelayanan pendidikan memiliki target indikator sasaran hanya 1 OPD sebagai Pelayanan manajemen informasi pendidikan, Program Pengembangan Nilai Budaya target indikator sasaran sebanyak 14 kecamatan sebagai pengembangan nilai-nilai kebudayaan dan kehidupan beragama.

Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan memiliki target indikator sasaran sebanyak 14 kecamatan sebagai pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, pada program pelayanan perpustakaan target memiliki indikator sasaran sebanyak 14 kecamatan sebagai Pelayanan perpustakaan Kabupaten dan Kecamatan.

b. kesehatan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 5.2.
Rincian Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1,02	Kesehatan		
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan		
1.02 . 1.02.01 . 01	Dinas Kesehatan		
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Loket pelayanan dan ruang tunggu	1 OPD

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pengadaan obat	22 Puskesmas
		Perbekalan kesehatan Gudang Obat Kabupaten	1 unit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu 100.000 kelahiran hidup	103 Jiwa / 100.000 Kelahiran
		Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran	3 Jiwa / 1.000 Kelahiran
		Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	13 Jiwa / Kelahiran
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio anggaran program promotif terhadap total anggaran kesehatan	1%
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase gizi buruk	0%
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Pengawasan mutu air minum depot air minum	10 unit
		Pengembangan lingkungan sehat	14 Kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas rawat inap	11 Unit
		Rasio dokter per 1.000 penduduk	0 Jiwa / 1.000 Penduduk
		Prosentase desa yang memiliki bidan desa	94%
		Prosentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih	93%
		Jumlah puskesmas yang terakreditasi	17 Unit
		Rasio posyandu per 1.000 balita	22 Jiwa / 1.000 Balita
1.02 . 1.02.01 . 01 . 34	Program Pencegahan Dan Pengamatan Penyakit	Prosentase pelaksanaan imunisasi	90%
		Prosentase optimalisasi surveilan	80%
		Prosentase pelaksanaan matra dan karantina penyakit	80%
1.02 . 1.02.01 . 01 . 35	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prosentase Pengendalian Kanker	60%
		Prosentase pengendalian	60%

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		penyakit kelainan darah	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 36	Program Pengendalian Penyakit Dengan Gangguan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA	Prosentase Pengendalian gangguan jiwa pada anak dan remaja	90%
		Prosentase pengendalian penyakit penyalahgunaan NAPZA	70%
1.02 . 1.02.01 . 01 . 37	Program Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	Prosentase pengendalian TBC	70%
		Prosentase pengendalian HIV/AIDS atau IMS	90%
		Prosentase pengendalian penyakit hepatitis	80%
		Prosentase pengendalian ISPA	80%
		Prosentase pengendalian penyakit kusta dan frambusia	90%
1.02 . 1.02.01 . 01 . 38	Program Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	Angka kejadian DBD per 100.000 penduduk	11 Jiwa / 100.000 Penduduk
		Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk	1 Jiwa / 1.000 Penduduk
		Prosentase kasus rabies yang sudah ditangani	100%
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah		
1.02 . 1.02.02 . 01	Rumah Sakit Umum Daerah		
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		bulan	12 Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Tipe B	1 OPD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD Tipe B	1 OPD
		Jumlah Dokter	22 Orang
1.02 . 1.02.02 . 01 . 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	RSUD Tipe B	1 OPD
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase sarana/prasarana yang terpelihara	80%
1.02 . 1.02.02 . 01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	RSUD Tipe B	1 OPD

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1.02 . 4.01.01	Sekretariat Daerah		
1.02 . 4.01.01 . 03	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
1.02 . 4.01.01 . 03 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan di lingkungan sekretariat daerah	11 OPD
		Pelayanan kesehatan lingkungan sekolah (UKS)	10 nit

Pada tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran memiliki target indikator sasaran 12 bulan sebagai penyediaan administrasi kantor, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki target indikator sasaran hanya 1 OPD sebagai Loker pelayanan dan ruang tunggu, indikator sasaran penyediaan sarana dan prasarana ASN target sasaran selama 12 bulan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur indikator sasaran sebagai peningkatan kapasitas bagi ASN terget indikator sasaran selama 30 bulan. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 2 indikator sasaran diantaranya target indikator sasaran selama 12 bulan sebagai Pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indikator sasaran pada Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan memiliki target sasaran 12 bulan. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan memiliki beberapa indicator sasaran sebagai berikut target indikator sasaran yang pertama sebanyak 22 puskesmas untuk pengadaan obat dan indikator sasaran pada perbekalan kesehatan gudang obat kabupaten target indikator sasaran sebanyak 1 unit. program upaya kesehatan memilki target indicator sasaran sebanyak 3 indikator pada Angka Kematian Ibu 100.000 kelahiran hidup dengan terget sebanyak 103 Jiwa / 100.000 kelahiran, indikator sasaran pada angka kematian bayi per 1.000 kelahiran sebanyak 3 Jiwa / 1.000 kelahiran, dan pada indikator sasaran angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup sebanyak 13 Jiwa / kelahiran, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat memiliki target indikator sasaran hanya 1% dengan rasio anggaran program promotif terhadap total anggaran kesehatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat hanya memiliki satu indicator sasaran Prosentase gizi buruk sebesar 0%, Program Pengembangan Lingkungan Sehat memiliki 2 indikator

sasaran, target indikator sasaran Pengawasan mutu air minum depot air minum sebanyak 10 unit dan indikator sasaran pada pengembangan lingkungan sehat target indikator sasaran sebanyak 14 kecamatan. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan memiliki 6 indikator sasaran diantaranya Prosentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih dengan jumlah target indikator sasaran 93% dan Pada jumlah indikator sasaran Rasio posyandu per 1.000 balita berjumlah 22 Jiwa / 1.000 Balita, pada Program Pencegahan Dan Pengamatan Penyakit memiliki 3 indikator sasaran diantaranya Prosentase pelaksanaan imunisasi sasaran target 90%.

Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu jumlah target sasaran 60% untuk Prosentase Pengendalian Kanker dan indikator sasaran Prosentase pengendalian penyakit kelainan daerah jumlah 60%. Program Pengendalian Penyakit Dengan Gangguan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu indikator sasaran Prosentase Pengendalian gangguan jiwa pada anak dan remaja dengan target sasaran 90% dan target indikator sasaran 70% untuk indikator sasaran Prosentase pengendalian penyakit penyalahgunaan NAPZA. Program Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung memiliki 5 indikator sasaran diantaranya indikator sasaran Prosentase pengendalian HIV/AIDS atau IMS dengan jumlah target sasaran 90%, dan jumlah target sasaran 90% untuk indikator sasaran Prosentase pengendalian penyakit kusta dan frambusia. Pada program pengendalian dan pemberantasan penyakit bersumber binatang memiliki beberapa indikator sasaran yaitu angka kejadian DBD per 100.000 penduduk dengan jumlah target sasaran 11 Jiwa / 100.000 Penduduk, pada indikator sasaran Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk berjumlah 1 Jiwa / 1.000 Penduduk untuk target sasaran dan target indikator sasaran hingga 100% pada Prosentase kasus rabies yang sudah ditangani.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki target sasaran 12 bulan untuk indikator sasaran Penyediaan administrasi kantor. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki indikator sasaran Peningkatan kapasitas bagi ASN dengan target sasaran 30 ASN dan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 2 indikator sasaran

diantaranya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan jumlah target sasaran 12 bulan.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah target sasaran 1 OPD dengan indikator sasaran RSUD tipe B. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan memiliki dua indikator sasaran dengan terget sasaran 1 OPD dan indikator sasaran RSUD B, selanjutnya indikator sasaran jumlah dokter dengan jumlah target sasaran 22 orang, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata memiliki indikator sasaran dengan target 1 OPD untuk RSUD tipe B. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata memiliki indikator sasaran dengan terget 80% dengan prosentase sasaran/prasaana yang terpelihara. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran 1 OPD untuk indikator sasaran RSUD Tipe B.

Program Upaya Kesehatan masyarakat memiliki dua indikator sasaran meliputi pelayanan kesehatan di lingkungan sekretariat daerah berjumlah 11 OPD dan indikator sasaran memiliki target 10 unit untuk indikator sasaran pelayanan kesehatan lingkungan sekolah (UKS).

c. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Rincian Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1,03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03 . 1.03.01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03 . 1.03.01 . 01 .	Program Pelayanan	Penyediaan administrasi	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
01	Administrasi Perkantoran	kantor	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
1.03 . 1.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu	2 kawasan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	prosentase tingkat pengawasan jalan	90%
		prosentase pelaksanaan inspeksi jembatan	90%
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Penyediaan sarana dan prasarana bina marga	2 unit
		pemeliharaan sarana dan prasarana bina marga	3 unit
1.03 . 1.03.01 . 01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Panjang saluran Irigasi dalam Kondisi Baik/Sedang	126 Meter
		Peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi di DAS Kabupaten Seluma	8 DAS
1.03 . 1.03.01 . 01 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	24%
		Penyediaan dan pengelolaan SPAM, PANSIMAS	3 Kegiatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	36%
		Penyediaan IPAL Komunal di Kecamatan	14 Kecamatan
1.03 . 1.03.01 . 01 . 31	Program Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan rencana tata ruang (RTRW, RDTRK, Rencana Kawasan Strategis, RTBL)	6 kegiatan
		Jumlah RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	1 Dokumen
1.03 . 1.03.01 . 01 . 39	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	2 Kegiatan
1.03 . 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.03 . 1.06.02 . 01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.03 . 1.06.02 . 01 .	Program pembangunan	Persentase fasilitas umum	76%

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
17	turap/talud/bronjong	yang terkena dampak bencana dan direhabilitasi	

Pada tahun 2018 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indikator sasaran penyediaan administrasi kantor dengan target indikator sasaran selama 12 bulan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki target indikator sasaran 30 ASN dengan indikator sasaran peningkatan kapasitas bagi ASN.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 2 indikator sasaran diantaranya Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan dengan target indikator sasaran 12 bulan dan indikator sasaran Pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki target indikator sasaran selama 12 bulan.

Program Peningkatan Jalan & Jembatan memiliki indikator sasaran Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu dengan target indikator sasaran 2 kawasan. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan memiliki 2 indikator sasaran pada indikator sasaran prosentase tingkat pengawasan jalan memiliki target indikator sasaran 90% dan pada indikator sasaran prosentase pelaksanaan inspeksi jembatan memiliki target indikator sasaran sebesar 90%.

Pada Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan memiliki 2 indikator sasaran pada indikator sasaran Panjang saluran Irigasi dalam Kondisi Baik/Sedang memiliki target 2 unit dan target indikator sasaran 3 unit untuk indikator sasaran pemeliharaan sarana dan prasarana binawarga . pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya memiliki 2 indikator sasaran pada indikator sasaran Panjang saluran Irigasi dalam Kondisi Baik/Sedang dengan target indikator sasaran sepanjang 126 meter, dan target indikator sasaran 8 DAS sebagai peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi di DAS Kabupaten Seluma. Pada Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku memiliki 2 indikator sasaran, target indikator sasaran sebanyak 24% sebagai indikator sasaran Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih dan

indikator sasaran Penyediaan dan pengelolaan SPAM, PANSIMAS memiliki target sasaran sebanyak 3 kegiatan. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah memiliki 2 indikator sasaran, pada indikator sasaran Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi memiliki target indikator sasaran sebanyak 36% dan indikator sasaran penyediaan IPAL komunal di kecamatan memiliki target indikator sasaran pada 14 kecamatan.

Program Perencanaan Tata Ruang memiliki 2 indikator sasaran, target indikator sasaran memiliki 6 kegiatan untuk Perencanaan rencana tata ruang (RTRW, RDTRK, Rencana Kawasan Strategis, RTBL) dan indikator sasaran Jumlah RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah memiliki target indikator sasaran untuk 2 kegiatan. Program Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki indikator sasaran perencanaan pembangunan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pada Program pembangunan turap/talud/bronjong memiliki indikator sasaran Persentase fasilitas umum yang terkena dampak bencana dan direhabilitasi dengan target indikator sasaran 76%.

d. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Rincian Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1,04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman		
1.04 . 1.04.01 . 01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman		
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	Penyusunan kebijakan, NSPK, SPM Bidang Perumahan	3 kegiatan
		Prosentase Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat Kabupaten Seluma	50%
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Program Pengembangan Permukiman	Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban dampak pembangunan dan terkena relokasi	100%
		Pengembangan perencanaan perumahan dan permukiman	3 Dokumen

Pada tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran memiliki indikator sasaran penyediaan administrasi kantor dengan target indikator sasaran selama 12 bulan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan target indikator sasaran 30 ASN dan memiliki indikator sasaran pada peningkatan kapasitas bagi ASN. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki indikator sasaran diantaranya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target indikator selama 12 bulan dan indikator sasaran di peningkatan dan pengembangan kinerja keuangan dengan target indikator selama 12 bulan. Program Pengembangan Perumahan memiliki target indikator diantaranya 3 kegiatan dengan indikator sasaran pada penyusunan kebijakan, NSPK, SPM Bidang Perumahan, dan 50% pada target indikator di prosentase rumah layak huni bagi masyarakat kabupaten seluma. Program pengembangan permukiman memiliki indikator sasaran diantaranya Prosentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban dampak pembangunan dan terkena relokasi dengan target indikator sebanyak 100%, dan indikator sasaran pada Pengembangan perencanaan perumahan dan permukiman memiliki target indikator sebanyak 3 dokumen.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 5.5.
Rincian Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1,05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.05 . 1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.05 . 1.05.01 . 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM ASN	30 ASN
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Pencapaian Kominda dalam penyelesaian permasalahan ketertiban masyarakat	60%
		Prosentase penanganan konflik sosial	60%
		Prosentase pelaksanaan koordinasi FORKOMPIMDA	50%
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pencapaian forum pembauran kebangsaan	70%
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase pemberdayaan masyarakat bela negara	30%
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Prosentase pelaksanaan FKUB	70%
1.05 . 1.05.01 . 01 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	Prosentase pencapaian pendidikan politik masyarakat	40%

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1.05 . 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1.05 . 1.05.02 . 01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase pencapaian keamanan dan kenyamanan lingkungan	70%
1.05 . 1.05.02 . 01 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Pencapaian keamanan, ketertiban masyarakat	80%
		Prosentase pencegahan tindak kriminal di lingkungan perkantoran	80%
1.05 . 1.05.02 . 01 . 24	Program Perlindungan Dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan	Prosentasei Perlindungan bagi tenaga PBK	90%
		Prosentase Pecapaian Pengembangan Kapasitas tenaga PBK	60%
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Prosentase pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	90%
1.05 . 1.05.02 . 01 . 26	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran	peningkatan kapasitas tenaga PBK dalam kesiagaan dan pecegahan bahaya kebakaran	50 orang

Pada tahun 2018 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indikator sasaran pada penyediaan administrasi kantor dengan target indikator selama 12 bulan. Sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki indikator sasaran kepada Peningkatan kapasitas SDM ASN dengan target indikator berjumlah 30 ASN. Pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki dua

indikator sasaran diantaranya Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan dengan target indikator selama 12 bulan, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan memiliki target indikator selama 12 bulan. Pada program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal memiliki indikator sasaran diantaranya yaitu Prosentase Pencapaian Kominda dalam penyelesaian permasalahan ketertiban masyarakat dengan target indikator sebanyak 60%, sedangkan indikator sasaran Prosentase penanganan konflik sosial memiliki target indikator sebanyak 60%, dan indikator sasaran pada Prosentase pelaksanaan koordinasi FORKOMPIMDA memiliki target indikator sebanyak 50%. Program pengembangan wawasan kebangsaan memiliki indikator sasaran pada Prosentase pencapaian forum pembauran kebangsaan dengan target indikator sebesar 70%. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan memiliki indikator sasaran pada Prosentase pemberdayaan masyarakat bela negara dengan target indikator sebanyak 30%. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) memiliki indikator sasaran pada Prosentase pelaksanaan FKUB dengan target indikator sebanyak 70%. Program pendidikan politik masyarakat memiliki indikator sasaran Prosentase pencapaian pendidikan politik masyarakat dengan target indikator sebanyak 40%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indikator sasaran pada Penyediaan administrasi kantor dengan target indikator selama 12 bulan. Program peningkatan disiplin aparatur memiliki indikator sasaran pada Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN dengan target indikator selama 12 bulan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki indikator sasaran pada Peningkatan kapasitas bagi ASN dengan target indikator sebanyak 30 ASN. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki indikator sasaran diantaranya Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan target indikator selama 12 bulan, dan indikator sasaran pada Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan mempunyai target indikator selama 12 bulan. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan memiliki indikator sasaran Prosentase pencapaian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan target indikator sebanyak 70%. Program pemeliharaan kantrantibmas dan

pengecahan tindak kriminal memiliki indikator sasaran diantaranya yaitu Prosentase Pencapaian keamanan, ketertiban masyarakat memiliki target indikator sebanyak 80%, dan indikator sasaran Prosentase pencegahan tindak kriminal di lingkungan perkantoran memiliki target indikator sebanyak 80%. Program Perlindungan Dan pengembangan lembaga Ketenagakerjaan diantaranya yaitu memiliki target indikator sebanyak 90% di Prosentasei Perlindungan bagi tenaga PBK, sedangkan target indikator sebanyak 60% di Prosentase Pecapaian Pengembangan Kapasitas tenaga PBK. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah memiliki sasaran indikator di Prosentase pelayanan kedinasan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan target indikator sebesar 90%. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahaan Bahaya Kebakaran memiliki indikator sasaran peningkatan kapasitas tenaga PBK dalam kesiagaaan dan pecegahan bahaya kebakaran dengan target indikator sebanyak 50 orang.

f. Sosial

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar bidang **Sosial** sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Rincian Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1,06	Sosial		
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial		
1.06 . 1.06.01 . 01	Dinas Sosial		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Loket pelayanan dan ruang tunggu	1 OPD
		Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
	dan keuangan	pengembangan kinerja dan keuangan	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah verifikasi dan validasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	7 Dokumen
		Prosentase PMKS yang tertangani	50%
		Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	300 Orang
		Jumlah kelompok usaha bersama dari keluarga miskin yang mendapat bantuan ekonomi produktif	15 Kelompok
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan	5 Kelompok
		Jumlah KUMKM yang difasilitasi pemasaran dan permodalannya	15 Unit
		Jumlah KUMKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	15 Unit
		Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten	70 Orang
		Jumlah Koperasi yang direvitalisasi	15 Unit
		Jumlah kecamatan yang dikembangkan sentra industrinya	1 Kecamatan
		Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	5 Unit
		Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan	5 kelompok
		Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten	70 orang
		1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Prosentase penyandang disabilitas yg menerima bantuan alat bantu penyandang disabilitas	50%		
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	Program Pemberdayaan	Jumlah kelompok usaha	5 kelompok

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
	Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	
		Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten	70 orang
1.06 . 1.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.06 . 1.06.02 . 01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.06 . 1.06.02 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
1.06 . 1.06.02 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
1.06 . 1.06.02 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
		Jumlah TRC yang terlatih	85 Orang
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
1.06 . 1.06.02 . 01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase sekolah aman bencana di kawasan rawan bencana	23%
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Cakupan korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	100%
1.06 . 4.01.01	Sekretariat Daerah		
1.06 . 4.01.01 . 03	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
1.06 . 4.01.01 . 03 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten	70 orang
		Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan	5 kelompok
1.06 . 4.01.01 . 03 . 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan	50%

Pada tahun 2018 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki target indikator sasaran selama 12 bulan sebagai Penyediaan administrasi kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki 2 indikator sasaran,

untuk indikator sasaran Loker pelayanan dan ruang tunggu memiliki hanya memiliki target 1OPD dan untuk target indikator sasaran Penyediaan sarana dan prasarana ASN memiliki target 12 bulan, Program peningkatan disiplin aparatur memiliki indikator sasaran sebagai Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN ditargetkan selama 12 bulan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki indikator sasaran sebagai Peningkatan kapasitas bagi ASN dengan target sasaran untuk 30 ASN. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 2 indikator sasaran yaitu pada Pelaporan capaian kinerja dan keuangan di targetkan selama 12 bulan, dan untuk Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan memiliki target indikator sasaran selama 12 bulan. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya memiliki 4 indikator sasaran di antaranya Prosentase PMKS yang tertangani dengan target indikator sasaran 50%. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial memiliki 9 indikator sasaran, diantaranya pada indikator sasaran Jumlah KUMKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis ditargetkan 15 unit dan indikator sasaran Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten di targetkan sebanyak 70 orang. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma memiliki 2 indikator sasaran yaitu Prosentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar yang memiliki target indikator sasaran sebanyak 50% dan indikator sasaran Prosentase penyandang disabilitas yg menerima bantuan alat bantu penyandang disabilitas di targetkan sebanyak 50% . Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki 2 indikator sasaran, yang pertama Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok) memiliki terget indikator sasaran sebanyak 5 kelompok dan indikator sasaran yang kedua Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten memiliki target indikator sasaran sebanyak 70 orang.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indikator sasaran administrasi kantor yang ditarget selama 12 bulan, Program peningkatan disiplin aparatur dengan indikator sasaran Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN

dengan target indikator sasaran selama 12 bulan. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki 2 indikator sasaran, indikator sasaran yang pertama Peningkatan kapasitas bagi ASN memiliki target indikator sasaran sebanyak 30 ASN dan Jumlah TRC yang terlatih ditargetkan dalam indikator sasaran sebanyak 85 orang. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki 2 indikator sasaran, indikator sasaran yang pertama Pelaporan capaian kinerja dan keuangan di targetkan selama 12 bulan dan sasaran indikator yang kedua Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan di targetkan dalam indikator sasaran selama 12 bulan. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial memiliki indikator sasaran Persentase sekolah aman bencana di kawasan rawan bencana dengan target indikator sasaran 23%. Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana memiliki indikator sasaran Cakupan korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar ditargetkan dalam indikator sasaran mencapai 100%.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial memiliki 2 indikator sasaran, indikator sasaran yang pertama Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten ditargetkan pada indikator sasaran mencapai 70 orang dan indikator sasaran Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan memiliki target indikator sasaran sebanyak 5 kelompok. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) memiliki indikator sasaran Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan dengan target indikator sasaran 50%.

5.1.2. Urusan Bukan Wajib Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang tenaga kerja, sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Rincian Program Urusan Bukan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,01	Tenaga Kerja		
2.01 . 2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
2.01 . 2.01.01 . 01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapat sertifikat kompetensi	50 orang
		Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha	30 orang
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase capaian terhadap perlindungan tenaga kerja	80%
		Pencapaian terhadap pengembangan SPM ketenagakerjaan	80%
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19	Program Pengembangan Sistem Informasi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan sistem informasi HI dan kesejahteraan pekerja	3 Kegiatan

Pada tahun 2018 program pelayanan administrasi perkantoran, indikator sasarnya berupa penyediaan administrasi kantor yang akan dilakukan selama 12

bulan. Pada Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki indikator sasaran sebanyak 30 ASN yang akan dilakukan peningkatan kapasitas bagi ASN tersebut. Selain itu, pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mempunyai dua indikator berupa pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan yang akan dilaksanakan dalam waktu 12 bulan. Program peningkatan kesempatan kerja memiliki dua indikator sasaran salah satunya tenaga kerja yang mendapat sertifikasi kompetensi sebanyak 50 orang. Sedangkan pada program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan juga mempunyai dua indikator sasaran yang masing-masing memiliki persentase target pencapaian 80 %. Terakhir, program pengembangan sistem informasi hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja memiliki indikator sasaran sebanyak 3 kegiatan pengembangan sistem informasi HI dan kesejahteraan pekerja.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai berikut :

Tabel 5.8.
Rincian Program Urusan Bukan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.02 . 2.02.01 . 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.02 . 2.02.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
2.02 . 2.02.01 . 01 . 15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	persentase perempuan dan anak KDRT yang tertangani	100%
2.02 . 2.02.01 . 01 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan dan anak KDRT yang tertangani	100%
2.02 . 2.02.01 . 01 . 21	Program Keluarga Berencana	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	43%
		Rasio Akseptor KB	90%
		Prosentase terdannya operasional penyuluh KB	60%

Program pelayanan administrasi perkantoran memiliki indikator sasaran berupa penyediaan administrasi kantor selama 12 bulan, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mempunyai indikator sasaran sebanyak 30 ASN untuk peningkatan kapasitasnya. Selain itu, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mempunyai dua indikator sasaran salah satunya peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan yang ditarget selama 12 bulan. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan memiliki indikator sasaran yang sama dengan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, yaitu berupa persentase perempuan dan anak KDRT yang tertangani sebanyak 100 %. Sedangkan program keluarga berencana mempunyai tiga indikator, salah satunya persentase remaja perempuan 15 – 19 tahun yang melahirkan sebanyak 43 %.

c. Pangan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Pangan, sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,03	Pangan		
2.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan		
2.03 . 2.03.01 . 01	Dinas Ketahanan Pangan		
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan

Pada tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran mempunyai indikator sasaran selama 12 bulan untuk penyediaan administrasi kantor. Untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki indikator sasaran sebanyak 30 ASN akan diberikan peningkatan kapasitasnya. Sedangkan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan mempunyai dua indikator sasaran, salah satunya peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan selama 12 bulan.

d. Pertanahan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Pertanahan, sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,04	Pertanahan		
2.04 . 4.01.01	Sekretariat Daerah		
2.04 . 4.01.01 . 02	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
2.04 . 4.01.01 . 02 . 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase pencapaian penataan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pemerintah Kabupaten Seluma	60%

Pada tahun 2018 di bidang pertanahan hanya memiliki sebuah program dan kegiatan yaitu program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan mempunyai indikator sasaran sebesar 60 % untuk prosentase pencapaian penataan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah pemerintah Kabupaten Seluma.

e. Lingkungan Hidup

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

Tabel 5.11.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,05	Lingkungan Hidup		
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup		
2.05 . 2.05.01 . 01	Dinas Lingkungan Hidup		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2.05 . 2.05.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir	1 Buah
		Jumlah Tempat Pembuangan Sementara	4 Buah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian pencemaran lingkungan bagi pemrakarsa	70%
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pencapaian perlindungan dan konservasi SDA	3 Kegiatan
2.05 . 2.05.01 . 01 . 24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase lampu jalan yang menyala	40%
		Prosentase pencapaian pengelolaan Taman dan RTH	60%

Pada tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran memiliki indikator sasaran selama 12 bulan dalam penyediaan administrasi kantor. Untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mempunyai indikator sasaran sebanyak 30 ASN yang akan mengikuti peningkatan kapasitas ASN. Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indikator sasarannya mempunyai dua macam dalam waktu yang sama yaitu 12 bulan salah satunya pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dan begitu juga dengan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan memiliki dua indikator sasaran salah satunya jumlah tempat pembuangan sementara sebanyak 4 buah. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup indikator sasarannya ditargetkan 70 % dalam pengendalian pencemaran lingkungan bagi pemrakarsa. Untuk program perlindungan dan konservasi sumber daya alam memiliki 3 kegiatan dalam hal pencapaian perlindungan dan konservasi SDA, sedangkan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) indikator sasarannya ditargetkan sebanyak 40 % untuk lampu jalan yang menyala.

f. Administrasi Kependudukan dan Capil

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Administrasi Kependudukan dan Capil, sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,06	Administrasi Kependudukan dan Capil		
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.06 . 2.06.01 . 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Program Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase yang tersampaikan data dan informasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil	70%
2.06 . 2.06.01 . 01 . 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki akte kematian	60%
		Prosentase Penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK	70%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	70%
		Prosentase Penduduk yang memiliki Akte Nikah	85%

Pada tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran memiliki indikator sasaran ditargetkan selama 12 bulan dalam penyediaan administrasi kantor. Pada program peningkatan disiplin aparatur indikator sasarnya berupa penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN dalam waktu 12 bulan. Untuk program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur mempunyai indikator sasaran

sebanyak 30 ASN yang akan mengikuti peningkatan kapasitas ASN. Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indikator sasarannya mempunyai dua macam dalam waktu yang sama yaitu 12 bulan salah satunya pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pada program pengembangan data dan informasi memiliki indikator sasaran berupa prosentase yang tersampaikan data dan informasi bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan target 70 %. Sedangkan untuk program penataan administrasi kependudukan mempunyai empat indikator sasarannya antara lain : prosentase penduduk yang memiliki KTP berbasis NIK dan prosentase penduduk yang memiliki akte kelahiran yang targetnya sama besar yaitu 70 %.

g. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagai berikut :

Tabel 5.13.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,07	Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.07 . 2.07.01 . 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase keberdayaan masyarakat desa terhadap teknologi tepat guna	50%

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		Prosentase pemberdayaan masyarakat bergotong royong	50%
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah BUMDES yang dibentuk di desa	15 Unit
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Aparat desa yang di tingkatkan kapasitasnya	60%
		Jumlah BUMDES yang dibina dan dikembangkan di desa	15 Unit
2.07 . 2.07.01 . 01 . 20	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase pencapaian pembentukan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	50%
2.07 . 4.01.03	Kecamatan Sukaraja		
2.07 . 4.01.03 . 01	Kecamatan Sukaraja		
2.07 . 4.01.03 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	21 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.03 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa	19 desa
2.07 . 4.01.04	Kecamatan Air Periukan		
2.07 . 4.01.04 . 01	Kecamatan Air Periukan		
2.07 . 4.01.04 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	16 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Lubuk Sandi		
2.07 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Lubuk Sandi		
2.07 . 4.01.06 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	14 desa
2.07 . 4.01.06 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa	14 desa
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Seluma		
2.07 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Seluma		
2.07 . 4.01.07 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	7 kelurahan
2.07 . 4.01.08	Kecamatan Seluma Barat		
2.07 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Seluma Barat		
2.07 . 4.01.08 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	9 desa
2.07 . 4.01.08 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah	9 desa

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		desa	
2.07 . 4.01.09	Kecamatan Seluma Utara		
2.07 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Seluma Utara		
2.07 . 4.01.09 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	11 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.10	Kecamatan Seluma Selatan		
2.07 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Seluma Selatan		
2.07 . 4.01.10 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	12 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.11	Kecamatan Seluma Timur		
2.07 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Seluma Timur		
2.07 . 4.01.11 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	8 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.11 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa	5 desa
2.07 . 4.01.12	Kecamatan Talo		
2.07 . 4.01.12 . 01	Kecamatan Talo		
2.07 . 4.01.12 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	16 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.13	Kecamatan Ulu Talo		
2.07 . 4.01.13 . 01	Kecamatan Ulu Talo		
2.07 . 4.01.13 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	13 desa
2.07 . 4.01.13 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa	13 desa
2.07 . 4.01.14	Kecamatan Ilir Talo		
2.07 . 4.01.14 . 01	Kecamatan Ilir Talo		
2.07 . 4.01.14 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	15 desa
2.07 . 4.01.15	Kecamatan Talo Kecil		
2.07 . 4.01.15 . 01	Kecamatan Talo Kecil		
2.07 . 4.01.15 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	11 desa
2.07 . 4.01.15 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa	11 desa
2.07 . 4.01.16	Kecamatan Semidang Alas		
2.07 . 4.01.16 . 01	Kecamatan Semidang Alas		
2.07 . 4.01.16 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	24 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.16 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas	Peningkatan kapasitas	23 desa

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
	aparatur pemerintah desa	Aparatur pemerintah desa	
2.07 . 4.01.17	Kecamatan Semidang Alas Maras		
2.07 . 4.01.17 . 01	Kecamatan Semidang Alas Maras		
2.07 . 4.01.17 . 01 . 17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan	26 desa/kelurahan
2.07 . 4.01.17 . 01 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintah desa	25 desa

Pada tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran mempunyai indikator sasaran dalam waktu 12 bulan untuk penyediaan administrasi kantor. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur indikator sasarannya berupa peningkatan kapasitas bagi ASN sebanyak 30 ASN yang akan mengikuti peningkatan kapasitas ASN. Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indikator sasarannya mempunyai dua macam dalam waktu yang sama yaitu 12 bulan salah satunya pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Pada program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan juga memiliki dua macam indikator sasarannya salah satunya prosentase keberdayaan masyarakat desa terhadap teknologi tepat guna yaitu sebesar 50 %. Sedangkan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa indikator sasarannya berupa BUMDES yang dibentuk di desa sebanyak 15 unit. Untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai dua indikator sasaran salah satunya persentase aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya sebesar 60 %. Pada program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan memiliki indikator sasaran sebesar 50 % dalam pencapaian pembentukan dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

Selain itu, pada tabel di atas juga memiliki program-program lain sebagai penunjang yang berada pada tingkat kecamatan. Pada kecamatan Sukaraja, untuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang memiliki indikator sasaran sebanyak 21 desa/kelurahan untuk peningkatan partisipasi

masyarakat desa/kelurahan. Untuk program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa memiliki 19 desa yang menjadi indikator sasaran dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Pada kecamatan Air Periukan hanya mempunyai satu program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu sebanyak 16 desa/kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Di kecamatan Lubuk Sandi memiliki dua program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu sebanyak 14 desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Sedangkan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga memiliki 14 desa yang menjadi indikator sasaran dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Untuk program di kecamatan Seluma hanya mempunyai satu program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu sebanyak 7 kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan. Di kecamatan Seluma Barat memiliki dua program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu sebanyak 9 desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Sedangkan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga sama mempunyai 9 desa yang menjadi indikator sasaran dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Di kecamatan Seluma Utara hanya mempunyai satu program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu sebanyak 11 desa/kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Begitu juga dengan kecamatan Seluma Selatan hanya mempunyai satu program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu berupa peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan sebanyak 12 desa/kelurahan. Untuk kecamatan Seluma Timur mempunyai dua program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu sebanyak 8 desa/kelurahan untuk upaya peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan dan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai 5 desa yang menjadi indikator sasaran dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Untuk program di kecamatan Talo memiliki satu program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu indikator sasarnya sebanyak 7 kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Di kecamatan Ulu Talo mempunyai dua program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa memiliki indikator sasaran sebanyak 13 desa untuk peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan dan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai indikator sasaran sebanyak 13 desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Di kecamatan Ilir Talo memiliki satu program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa yaitu indikator sasarnya sebanyak 15 desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan.

Di kecamatan Talo Kecil terdapat dua program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan indikator sasaran sebanyak 11 desa untuk peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Dan pada program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga sama mempunyai 11 desa yang menjadi indikator sasaran dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Kecamatan Semidang Alas juga memiliki dua program yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan indikator sasaran sebanyak 24 desa/kelurahan untuk peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Serta program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai 23 desa yang menjadi indikator sasaran dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Sedangkan di kecamatan Semidang Alas Maras yang jumlah desa/kelurahan lebih banyak juga mempunyai dua program yang serupa yaitu program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan dengan indikator sasaran sebanyak 26 desa/kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Dan program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai indikator sasaran sebanyak 25 desa dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

h. Perhubungan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang perhubungan, sebagai berikut :

Tabel 5.14.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,09	Perhubungan		
2.09 . 1.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman		
2.09 . 1.04.01 . 01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman		
2.09 . 1.04.01 . 01 . 17	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Prosentase pencapaian pelayanan pengamanan pada hari-hari besar agama dan nasional	80%
2.09 . 1.04.01 . 01 . 19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah terminal yang dibangun	1 Buah
		Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	70%
2.09 . 1.04.01 . 01 . 20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	penyediaan operasional balai uji kendaraan	1 UPTD
		Prosentase pencapaian layanan balai uji kendaraan	80%

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa pada tahun 2018 bidang perhubungan hanya memiliki tiga program dan kegiatan, yaitu program peningkatan pelayanan angkutan yang memiliki indikator sasaran sebesar 80 % dalam hal prosentase pencapaian pelayanan pengamanan pada hari-hari besar agama dan nasional. Kemudian memiliki dua buah indikator sasaran pada program pengendalian dan pengamanan lalu lintas yaitu jumlah terminal yang dibangun sebanyak 1 buah dan sasaran prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana pengaman lalu lintas dengan target 70 %. Sedangkan untuk program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor juga memiliki dua macam indikator sasaran, salah satunya penyediaan operasional balai uji kendaraan sebanyak 1 UPTD.

i. Komunikasi dan Informasi

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang komunikasi dan informasi, sebagai berikut :

Tabel 5.15.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informasi

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,1	Komunikasi dan Informatika		
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10 . 2.10.01 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase pelayanan komunikasi di lingkungan perkantoran dan desa	60%
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Prosentase PPID Pembantu	80%

Pada tahun 2018 bidang komunikasi dan informasi hanya memiliki beberapa program dan kegiatan, yaitu untuk program pelayanan administrasi perkantoran mempunyai indikator sasaran yang targetnya selama 12 bulan dalam penyediaan administrasi kantor. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur indikator sasarannya berupa peningkatan kapasitas bagi ASN dengan target sebanyak 30 ASN untuk mengikuti peningkatan kapasitas ASN, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indikator sasarannya mempunyai dua macam kegiatan dalam waktu yang sama yaitu 12 bulan, salah satunya yaitu peningkatan pengembangan kinerja dan keuangan.

Untuk program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa memiliki indikator sasaran sebesar 60 % untuk prosentase pelayanan komunikasi di

lingkungan perkantoran dan desa. Sedangkan program kerjasama informasi dengan mas media mempunyai indikator sasaran berupa prosentase PPID pembantu dengan target pencapaian sebesar 80 %.

j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada urusan bukan wajib pelayanan dasar, untuk bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki beberapa program dan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.16.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2.11 . 3.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2.11 . 3.06.01 . 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
2.11 . 3.06.01 . 01 . 15	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah KUMKM yang difasilitasi pemasaran dan permodalannya	15 unit
2.11 . 3.06.01 . 01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah KUMKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	15 KUMKM
		Jumlah KUMKM yang difasilitasi pemasaran dan permodalannya	15 KUMKM
2.11 . 3.06.01 . 01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi	5 Unit
		Jumlah kecamatan yang dikembangkan sentra industrinya	1 kecamatan
		Jumlah Agroindustri/Kelompok Koperasi Nelayan	1 kelompok
		Jumlah KUMKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis	15 Unit
		Jumlah KUMKM yang difasilitasi pemasaran dan permodalannya	15 Unit
		Jumlah Koperasi yang direvitalisasi	15 Unit
		Jumlah KUD Mandiri	15 Unit
2.11 . 3.06.01 . 01 . 19	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu	2 kawasan

Di tahun 2018 untuk program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif mempunyai indikator sasaran sebanyak 15 unit KUMKM yang difasilitasi pemasaran dan permodalannya, kemudian program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah memiliki dua

indikator sasaran, salah satunya KUMKM yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis yaitu sebanyak 15 KUMKM. Sedangkan pada program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi mempunyai beberapa indikator sasaran, antara lain : jumlah agroindustri/kelompok koperasi nelayan sebanyak 1 kelompok dan jumlah koperasi yang direvitalisasi ditargetkan sebanyak 15 unit. Pada program terakhirnya yaitu pengembangan industri kecil dan menengah mempunyai indikator sasaran berupa pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu dengan jumlah sebanyak 2 kawasan.

k. Penanaman Modal

Dalam urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Penanaman Modal, mempunyai rincian program dan kegiatan yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.17.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,12	Penanaman Modal		
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
2.12 . 2.12.01 . 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani (jenis)	52 Dokumen
		Rata-rata lama penerbitan surat perizinan / non perizinan	2 Hari

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		administrasi	
		Jumlah kecamatan yang telah menerapkan Sistim Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Kecamatan
2.12 . 2.12.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai IKM bidang pelayanan perizinan terpadu	50%
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Penyediaan sarana dan prasarana inventarisasi SDA	4 Kegiatan

Pada Tahun 2018 bidang penanaman modal memiliki beberapa program dan kegiatan, yaitu untuk program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator sasarannya ditargetkan selama 12 bulan dalam penyediaan administrasi perkantoran. Pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki indikator sasaran berupa peningkatan kapasitas bagi ASN sebanyak 30 ASN yang akan mengikuti peningkatan kapasitas bagi ASN tersebut, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indikator sasarannya mempunyai dua macam kegiatan dalam waktu yang sama yaitu 12 bulan, salah satunya pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Untuk program peningkatan promosi dan kerjasama investasi memiliki tiga indikator sasaran, antara lain jenis perizinan/non perizinan yang dilayani yaitu sebanyak 52 dokumen. Selain itu, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi mempunyai indikator sasaran berupa nilai IKM bidang pelayanan perizinan terpadu dengan target sebanyak 50 %, dan untuk program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah sebanyak 4 kegiatan untuk penyediaan sarana dan prasarana inventarisasi SDA.

I. Kepemudaan dan Olahraga

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut :

Tabel 5.18.

Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,13	Kepemudaan dan Olah Raga		
2.13 . 2.13.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
2.13 . 2.13.01 . 01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.13 . 2.13.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan	5 kelompok
2.13 . 2.13.01 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, Pramuka tingkat Kabupaten	70 orang
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Pengembangan kebijakan olahraga	3 dokumen
		Pengembangan manajemen olah raga bertaraf nasional	3 Kegiatan
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	pembinaan olahraga bagi anak anak dan remaja	4 kegiatan
		Pelaksanaan memasyarakatkan olahraga	4 Kegiatan
2.13 . 4.01.03	Kecamatan Sukaraja		
2.13 . 4.01.03 . 01	Kecamatan Sukaraja		
2.13 . 4.01.03 . 01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.04	Kecamatan Air Periukan		
2.13 . 4.01.04 . 01	Kecamatan Air Periukan		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2.13 . 4.01.04 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 kecamatan
2.13 . 4.01.06	Kecamatan Lubuk Sandi		
2.13 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Lubuk Sandi		
2.13 . 4.01.06 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.07	Kecamatan Seluma		
2.13 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Seluma		
2.13 . 4.01.07 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.08	Kecamatan Seluma Barat		
2.13 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Seluma Barat		
2.13 . 4.01.08 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.09	Kecamatan Seluma Utara		
2.13 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Seluma Utara		
2.13 . 4.01.09 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 kecamatan
2.13 . 4.01.10	Kecamatan Seluma Selatan		
2.13 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Seluma Selatan		
2.13 . 4.01.10 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.11	Kecamatan Seluma Timur		
2.13 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Seluma Timur		
2.13 . 4.01.11 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.12	Kecamatan Talo		
2.13 . 4.01.12 . 01	Kecamatan Talo		
2.13 . 4.01.12 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.14	Kecamatan Ilir Talo		
2.13 . 4.01.14 . 01	Kecamatan Ilir Talo		
2.13 . 4.01.14 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan	1 Kecamatan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		paskibraka	
2.13 . 4.01.15	Kecamatan Talo Kecil		
2.13 . 4.01.15 . 01	Kecamatan Talo Kecil		
2.13 . 4.01.15 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	1 Kecamatan
2.13 . 4.01.16	Kecamatan Semidang Alas		
2.13 . 4.01.16 . 01	Kecamatan Semidang Alas		
2.13 . 4.01.16 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	12 bulan
2.13 . 4.01.17	Kecamatan Semidang Alas Maras		
2.13 . 4.01.17 . 01	Kecamatan Semidang Alas Maras		
2.13 . 4.01.17 . 01 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pengembangan pemuda Kecamatan dalam pembentukan paskibraka	26 desa/kelurahan

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa pada Tahun 2018 bidang kepemudaan dan olahraga memiliki beberapa program dan kegiatan, yaitu program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator sasarannya ditargetkan selama 12 bulan dalam penyediaan administrasi kantor. Untuk program peningkatan disiplin aparatur, indikator sasarannya berupa penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN dalam waktu 12 bulan. Kemudian, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur memiliki indikator sasaran berupa peningkatan kapasitas bagi ASN sebanyak 30 ASN untuk mengikuti peningkatan kapasitas bagi ASN tersebut. Pada program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, indikator sasarannya mempunyai dua macam kegiatan yaitu pelaporan capaian kinerja dan keuangan, serta peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan yang ditargetkan dalam waktu sama yaitu 12 bulan.

Selain itu, program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda mempunyai indikator sasaran sebanyak 5 kelompok untuk kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan. Pada program peningkatan peran serta kepemudaan memiliki indikator sasaran sebanyak 70 orang bagi pemuda kader,

pemuda pelopor dan pemuda wirausaha, pramuka tingkat kabupaten. Kemudian, program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga memiliki dua indikator sasaran, salah satunya pengembangan kebijakan olahraga sebanyak 3 dokumen. Untuk program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga juga memiliki dua indikator sasaran, yang salah satunya memiliki 4 kegiatan untuk pelaksanaan memasyarakatkan olahraga.

Selain itu, bidang Kepemudaan dan Olahraga mempunyai program dan kegiatan penunjang lain di tingkat kecamatan, namun dari data di atas menunjukkan bahwa program dan kegiatan di setiap kecamatan sama, baik di kecamatan Sukaraja, Air Periukan, Lubuk Sandi, Seluma, Seluma Barat, Seluma Utara, Seluma Selatan, Seluma Timur, Talo, Ilir Talo, Talo Kecil, Semidang Alas dan Semidang Alas Maras yaitu memiliki program peningkatan peran serta kepemudaan dengan indikator sasarannya ditargetkan untuk seluruh desa/kelurahan yang ada atau sebanyak 1 kecamatan untuk pengembangan pemuda kecamatan dalam pembentukan paskibraka.

m. Kebudayaan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Kebudayaan, sebagai berikut :

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,16	Kebudayaan		
2.16 . 4.01.01	Sekretariat Daerah		
2.16 . 4.01.01 . 03	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
2.16 . 4.01.01 . 03 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pencapaian pelaksanaan keragaman budaya Kabupaten Seluma	10 Kegiatan
2.16 . 4.01.03	Kecamatan Sukaraja		
2.16 . 4.01.03 . 01	Kecamatan Sukaraja		
2.16 . 4.01.03 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	21 desa/kelurahan
2.16 . 4.01.04	Kecamatan Air Periukan		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2.16 . 4.01.04 . 01	Kecamatan Air Periukan		
2.16 . 4.01.04 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	16 desa/kelurahan
2.16 . 4.01.06	Kecamatan Lubuk Sandi		
2.16 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Lubuk Sandi		
2.16 . 4.01.06 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	14 desa
2.16 . 4.01.07	Kecamatan Seluma		
2.16 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Seluma		
2.16 . 4.01.07 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	7 kelurahan
2.16 . 4.01.08	Kecamatan Seluma Barat		
2.16 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Seluma Barat		
2.16 . 4.01.08 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	9 desa
2.16 . 4.01.09	Kecamatan Seluma Utara		
2.16 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Seluma Utara		
2.16 . 4.01.09 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	11 desa/kelurahan
2.16 . 4.01.10	Kecamatan Seluma Selatan		
2.16 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Seluma Selatan		
2.16 . 4.01.10 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	12 desa/kelurahan
2.16 . 4.01.11	Kecamatan Seluma Timur		
2.16 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Seluma Timur		
2.16 . 4.01.11 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	8 desa/kelurahan
2.16 . 4.01.12	Kecamatan Talo		
2.16 . 4.01.12 . 01	Kecamatan Talo		
2.16 . 4.01.12 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman	Pengelolaan	16

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
	Budaya	keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	desa/kelurahan
2.16 . 4.01.13	Kecamatan Ulu Talo		
2.16 . 4.01.13 . 01	Kecamatan Ulu Talo		
2.16 . 4.01.13 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	13 desa
2.16 . 4.01.14	Kecamatan Ilir Talo		
2.16 . 4.01.14 . 01	Kecamatan Ilir Talo		
2.16 . 4.01.14 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	15 desa
2.16 . 4.01.15	Kecamatan Talo Kecil		
2.16 . 4.01.15 . 01	Kecamatan Talo Kecil		
2.16 . 4.01.15 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	16 desa
2.16 . 4.01.16	Kecamatan Semidang Alas		
2.16 . 4.01.16 . 01	Kecamatan Semidang Alas		
2.16 . 4.01.16 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	24 desa/kelurahan
2.16 . 4.01.17	Kecamatan Semidang Alas Maras		
2.16 . 4.01.17 . 01	Kecamatan Semidang Alas Maras		
2.16 . 4.01.17 . 01 . 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga Rencana Kerukunan Umat Beragama	26 desa/kelurahan

Pada tahun 2018 untuk program pengelolaan keragaman budaya memiliki indikator sasaran sebanyak 10 kegiatan untuk pencapaian pelaksanaan keragaman budaya kabupaten Seluma. Selain itu, bidang kebudayaan juga mempunyai program-program dan kegiatan tambahan atau penunjang lainnya yang ada di kecamatan-kecamatan, seperti di Kecamatan Sukaraja memiliki program

pengelolaan keragaman budaya sebanyak 21 desa/kelurahan untuk pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga rencana kerukunan umat beragama. Begitu pula di kecamatan Air Periukan, Lubuk Sandi, Seluma, Seluma Barat, Seluma Utara, Seluma Selatan, Seluma Timur, Talo, Ulu Talo, Ilir Talo, Talo Kecil, Semidang Alas dan Semidang Alas Maras memiliki program yang serupa yaitu program pengelolaan keragaman budaya yang mempunyai indikator sasaran berupa pengelolaan keanekaragaman budaya dalam menjaga rencana kerukunan umat beragama dengan target sasarnya seluruh desa/kelurahan yang ada di kecamatan masing-masing.

n. Kearsipan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan bukan wajib pelayanan dasar bidang Kearsipan, sebagai berikut :

Tabel 5.19.
Rincian Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2,18	Kearsipan		
2.18 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2.18 . 2.18.01 . 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Loket pelayanan dan ruang tunggu	1 OPD
		Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
2.18 . 2.18.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
2.18 . 2.18.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
2.18 . 2.18.01 . 01 . 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Prosentase perbaikan sistem administrasi kearsipan	70%

Pada tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran

mempunyai indikator sasaran dalam waktu 12 bulan untuk penyediaan administrasi kantor. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki dua indikator sasaran yaitu berupa loket pelayanan dan ruang tunggu sebanyak 1 OPD, dan penyediaan sarana dan prasarana ASN dalam waktu 12 bulan. Selain itu, pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur indikator sasarannya berupa peningkatan kapasitas bagi ASN mempunyai indikator sasaran sebanyak 30 ASN yang akan mengikuti peningkatan kapasitas ASN. Untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, terdapat dua macam indikator sasaran yang ditargetkan selama 12 bulan salah satunya peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan. Lalu, untuk program perbaikan sistem administrasi kearsipan, indikator sasarannya berupa prosentase perbaikan sistem administrasi kearsipan dengan target pencapaian sebesar 70 %.

5.1.3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut :

Tabel 5.20.
Rincian Program Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
3	URUSAN PILIHAN		
3,01	Kelautan dan Perikanan		
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan		
3.01 . 3.01.01 . 01	Dinas Perikanan		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
		Persentase Jumlah Balai Benih Ikan, Pokdakan yang bersertifikat CBIB	20%
3.01 . 3.01.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Armada Tangkap Berukuran 5 GT Ke bawah	237 unit
		Produksi Perikanan Tangkap	1,771 ton
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pencapaian pengelolaan produksi perikanan	3 Kegiatan
		Optimalisasi pencapaian pemasaran produksi perikanan	3 Kegiatan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 25	Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengembangan data dan informasi	3 Kegiatan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 29	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan: Penyuluh, Pembudidaya, Nelayan, Pengolah	200 orang
3.01 . 3.01.01 . 01 . 30	pengembangan pelabuhan perikanan	Prosentase pengembangan pelabuhan perikanan	70%
3.01 . 3.01.01 . 01 . 32	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian SDKP dan Bina Produk Pengolahan	Pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu	2 kawasan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 33	Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan SDKP	Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan SDKP	4 Kegiatan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 34	Peningkatan Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan	Peningkatan mutu hasil perikanan	3 Kegiatan
		Peningkatan pemasan dan daya saing hasil perikanan	3 kegiatan
3.01 . 3.01.01 . 01 . 37	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	236 ton
3.01 . 3.01.01 . 01 . 38	Program Pembinaan dan Perlindungan Pembudidaya Ikan	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Perikanan: Penyuluh, Pembudidaya, Nelayan, Pengolah	200 orang

Pada Tahun 2018 untuk program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki sasaran selama 12 bulan untuk penyediaan administrasi kantor. Untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki 2 indikator sasaran, salah satunya penyediaan sarana dan prasarana ASN dengan target selama 12 Bulan. Untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki sasaran sebanyak 30 ASN untuk peningkatan kapasitas bagi ASN. Untuk program

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan memiliki 2 sasaran yaitu pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 12 bulan dan peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan selama 12 Bulan.

Untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap memiliki 2 sasaran yaitu jumlah armada tangkap berukuran 5 GT ke bawah sebanyak 237 unit dan jumlah produksi perikanan tangkap sebanyak 1.771 ton. Untuk program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan memiliki 2 sasaran yaitu pencapaian pengelolaan produksi perikanan sebanyak 1 kegiatan dan optimalisasi pencapaian pemasaran produksi perikanan sebanyak 3 kegiatan. Untuk program pengembangan data dan informasi memiliki sasaran pengembangan data dan informasi sebanyak 3 kegiatan. Untuk program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memiliki sasaran sebanyak 200 orang untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perikanan (penyuluh, pembudidaya, nelayan dan pengolah). Untuk program Pengembangan Pelabuhan Perikanan memiliki sasaran sebanyak 70 % untuk meningkatkan presentase pengembangan pelabuhan perikanan. Untuk program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian SDKP dan Bina Produk Pengelolaan memiliki sasaran sebanyak 2 kawasan untuk pengembangan kawasan kampung nelayan terpadu.

Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP memiliki sasaran sebanyak 4 kegiatan untuk penyediaan sarana dan prasarana pengawasan SDKP. Untuk Peningkatan Mutu dan Daya Saing Hasil Perikanan memiliki sasaran sebanyak 6 kegiatan, 3 kegiatan untuk sasaran peningkatan mutu hasil perikanan dan 3 kegiatan untuk peningkatan pemasan dan daya saing hasil perikanan. Untuk program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya memiliki sasaran sebanyak 236 ton untuk produksi perikanan budidaya. Untuk program Pembinaan dan Perlindungan Budidaya Ikan memiliki sasaran sebanyak 200 orang untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perikanan (penyuluh, pembudidaya, nelayan, dan pengolah).

b. Pariwisata

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pilihan sebagai berikut :

Tabel 5.21.
Rincian Program Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
3	URUSAN PILIHAN		
3,02	Pariwisata		
3.02 . 2.13.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
3.02 . 2.13.01 . 01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
3.02 . 2.13.01 . 01 . 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	10 orang
		Jumlah Wisatawan Nusantara	20 orang
3.02 . 2.13.01 . 01 . 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rata-rata lama tinggal	1 hari
		Jumlah Wisatawan Mancanegara	25 orang
		Jumlah Wisatawan Nusantara	75 orang
		Persentasi Tingkat hunian hotel	5%

Pada Tahun 2018 untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata memiliki 2 indikator sasaran sebanyak 30 orang, 10 orang untuk wisatawan mancanegara dan 20 orang untuk wisatawan nusantara. Untuk program Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki 4 indikator sasaran, 1 hari untuk lama tinggal, sebanyak 25 orang untuk wisatawan mancanegara, 75 orang untuk wisatawan nusantara, dan 5 % untuk persentase tingkat hunian hotel.

c. Pertanian

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pilihan bidang pertanian sebagai berikut :

Tabel 5.22.
Rincian Program Urusan Pilihan Bidang Pertanian

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
3	URUSAN PILIHAN		
3,03	Pertanian		
3.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan		
3.03 . 2.03.01 . 01	Dinas Ketahanan Pangan		
3.03 . 2.03.01 . 01 . 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Jumlah gapoktan untuk pengembangan packaging beras	10 gapoktan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan	6 desa
		Jumlah Penyuluh	64 penyuluh
		jumlah desa rawan pangan dengan prioritas 1 dan 2	40 desa
		Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina	6 desa
		Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan	1 kawasan
		Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan	1 kawasan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan di tingkat provinsi dan nasional	3 kegiatan
3.03 . 2.03.01 . 01 . 18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Penerapan teknologi pertanian kepada kelompok tani	3 jenis
3.03 . 2.03.01 . 01 . 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	jumlah desa rawan pangan dengan prioritas 1 dan 2	40 Desa
3.03 . 2.03.01 . 01 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah gapoktan untuk pengembangan packaging beras	10 Gapoktan
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian		
3.03 . 3.03.01 . 01	Dinas Pertanian		
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun	6 desa
		Jumlah puskesmas yang terbangun	5 unit
		Jumlah Penumbuhan Desa Mandiri Pangan	6 Desa
		Jumlah kawasan mandiri pangan yang dikembangkan	1 Kawasan
		Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina	6 Desa
		Jumlah Desa Mandiri Benih yang dibangun	6 Desa
		Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
3.03 . 3.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Kelapa Sawit	66,807 ton
		Produksi Kelapa	1,311 ton
		Rasio jalan sentra produksi	2,220 Meter

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
			/ Ha
		Produksi Kedelai	1,271 ton
		Produksi Jagung	1,746 ton
		Produksi Karet	26,136 ton
		Produksi Jagung	1,746 Ton
		Jumlah cetak sawah yang akan di perluas	100 hektar
		Produksi Tanaman Padi	59,461 ton
		Jumlah cetak sawah yang akan di perluas	100 Hektar
		Produksi Tanaman Padi	59,461 Ton
		Produksi Kedelai	1,271 Ton
3.03 . 3.03.01 . 01 . 21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Pencapaian penanggulangan penyakit ternak	70%
		Pencapaian pencegahan penyakit ternak	70%
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24	Program peningkatan produksi peternakan	Tenaga IB	10 orang
		Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	3 unit
		Persentase jumlah ternak diobati	56%

Pada Tahun 2018 untuk program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) memiliki 6 indikator sasaran, 10 gapotkan untuk perkembangan packaging beras, 6 desa untuk penumbuhan desa mandiri pangan, 64 penyuluhan, 40 untuk desa rawan pangan dengan prioritas 1 dan 2, 6 desa mandiri pangan yang dibina, dan 1 kawasan mandiri yang dikembangkan. Untuk program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan memiliki sasaran sebanyak 3 kegiatan untuk peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan di tingkat provinsi dan nasional. Untuk program peningkatan penerapan teknologi pertanian memiliki sasaran sebanyak 3 jenis untuk teknologi pertanian kepada kelompok tani. Untuk program pemberdayaan penyuluh pertanian memiliki sasaran 40 desa untuk jumlah desa rawan pangan dengan prioritas 1 dan 2. Untuk program peningkatan produksi hasil peternakan memiliki sasaran sebanyak 10 gapotkan untuk jumlah gapotkan untuk pengembangan packaging beras.

Untuk program pelayanan administrasi perkantoran memiliki sasaran selama 12 bulan untuk penyediaan administrasi kantor. Untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur memiliki 7 indikator sasaran, salah satunya adalah 6 desa

untuk jumlah desa mandiri benih yang dibangun. Untuk program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki sasaran sebanyak 30 ASN untuk peningkatan kapasitas bagi ASN. Untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki sasaran selama 12 Bulan untuk pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan. Untuk program peningkatan produksi pertanian/perkebunan memiliki 12 indikator sasaran, salah satunya 66.807 ton untuk produksi kelapa sawit. Untuk program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak memiliki sasaran sebanyak 70 % untuk pencapaian penanggulangan penyakit ternak dan 70 % untuk pencapaian pencegahan penyakit ternak. Untuk program peningkatan produksi ternak dengan jumlah 3 indikator sasaran, salah satunya 10 orang untuk tenaga IB.

d. Perdagangan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pilihan pada bidang perdagangan sebagai berikut :

Tabel 5.23.
Rincian Program Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
3	URUSAN PILIHAN		
3,06	Perdagangan		
3.06 . 3.06.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3.06 . 3.06.01 . 01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
3.06 . 3.06.01 . 01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pencapaian pengamanan perdagangan tingkat kecamatan	14 Kecamatan
		Pencapaian perlindungan	3 Kegiatan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		konsumen	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal yang belum memiliki Pasar Desa	52 Desa
3,08	Transmigrasi		
3.08 . 2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
3.08 . 2.01.01 . 01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi		
3.08 . 2.01.01 . 01 . 15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Pengembangan wilayah transmigrasi	1 kawasan

Pada Tahun 2018 untuk program pelayanan administrasi perkantoran memiliki sasaran selama 12 bulan untuk penyediaan administrasi kantor. Untuk program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki sasaran selama 12 bulan untuk Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan. Untuk program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan memiliki sasaran sebanyak 14 kecamatan dan 3 kegiatan untuk Pencapaian perlindungan konsumen. Untuk program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri memiliki sasaran sebanyak 52 desa untuk Jumlah Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal yang belum memiliki Pasar Desa. Untuk program pengembangan wilayah transmigrasi memiliki sasaran 1 kawasan untuk Pengembangan wilayah transmigrasi.

5.1.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

a. Administrasi Pemerintahan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 5.24.
Rincian Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4.01	Administrasi Pemerintahan		
4.01 . 4.01.01	Sekretariat Daerah		
4.01 . 4.01.01 . 02	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
4.01 . 4.01.01 . 02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 02 . 11	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Penataan batas daerah	1 batas daerah
		Penataan batas desa/kelurahan	202 desa/kelurahan
		Penataan batas kecamatan	14 kecamatan
4.01 . 4.01.01 . 02 . 17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penataan Perundang-undangan pemerintahan umum	3 Dokumen
4.01 . 4.01.01 . 03	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 04	Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan		
4.01 . 4.01.01 . 04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.01 . 4.01.01 . 04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 04 . 19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah	Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 04 . 20	Program Peningkatan Pelayanan Urusan Kedinasan dan Penataan Sekretariat Daerah	Pelayanan kedinasan dan penataan sekretariat daerah	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4.01 . 4.01.01 . 05	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 06	Bagian Hukum		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 06 . 13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan dokumen hukum	2 kegiatan
4.01 . 4.01.01 . 06 . 17	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Nilai evaluasi SAKIP CC	60 OPD
		Prosentase SKPD yang memperoleh nilai LAKIP minimal C	60 OPD
4.01 . 4.01.01 . 07	Bagian Organisasi dan Kepegawaian		
4.01 . 4.01.01 . 07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 Bulan
4.01 . 4.01.01 . 07 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.01 . 4.01.01 . 07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 07 . 12	Penataan Kelembagaan	Prosentase penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Seluma	80%
4.01 . 4.01.01 . 07 . 15	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan perkantoran	55 OPD
4.01 . 4.01.01 . 08	Bagian Humas dan Protokol		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 08 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.01 . 4.01.01 . 08 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 08 . 13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penggunaan teknologi informasi penyebaran informasi OPD	55 OPD
4.01 . 4.01.01 . 08 . 19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah	Pelayanan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait hubungan masyarakat dan protokoler kedinasan	2 orang
4.01 . 4.01.01 . 09	Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA		
4.01 . 4.01.01 . 09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 09 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 09 . 21	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Prosentase pencapaian komoditi ekspor Kabupaten Seluma	50%
4.01 . 4.01.01 . 09 . 23	Program Peningkatan Pengendalian Inflasi	Pencapaian pengendalian inflasi untuk komoditi	3 Kegiatan
4.01 . 4.01.01 . 09 . 24	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pencapaian perlindungan SDA	4 Kegiatan
4.01 . 4.01.01 . 09 . 25	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Jumlah Desa tertinggal/sangat tertinggal yang belum memiliki listrik dari jaringan PLN	4 Desa
4.01 . 4.01.01 . 09 . 26	Program Koordinasi dan Pembinaan SDA	Pelaksanaan koordinasi dan Pembinaan SDA	4 kegiatan
4.01 . 4.01.01 . 09 . 27	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pencapaian pengembangan bagi kelompok UMKM	4 Kegiatan
4.01 . 4.01.01 . 09 . 29	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pencapaian promosi investasi di tingkat provinsi dan nasional	80%
4.01 . 4.01.01 . 10	Bagian Administrasi Pembangunan		
4.01 . 4.01.01 . 10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4.01 . 4.01.01 . 10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 10 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.01 . 4.01.01 . 10 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 10 . 30	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Monitoring dan evaluasi TEPR	12 bulan
		Pembinaan Jasa Konstruksi	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 10 . 31	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Pengendalian pembangunan daerah	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 11	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan		
4.01 . 4.01.01 . 11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 Bulan
4.01 . 4.01.01 . 11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 Bulan
4.01 . 4.01.01 . 11 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.01 . 4.01.01 . 11 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.01 . 11 . 11	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pelaksanaan Lelang Barang/Jasa yang Efektif , Efisien dan Akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 Bulan
4.01 . 4.01.02	Sekretariat DPRD		
4.01 . 4.01.02 . 02	Sekretariat DPRD		
4.01 . 4.01.02 . 02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.02 . 02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.02 . 02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.02 . 02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.01 . 4.01.02 . 02 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.02 . 02 . 18	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase kesesuaian penetapan perda dengan prolegda	100%

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		Peningkatan kapasitas Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma	30 orang
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah	Pelayanan pelaksanaan kedinasan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Seluma	30 orang
4.01 . 4.01.03	Kecamatan Sukaraja		
4.01 . 4.01.03 . 01	Kecamatan Sukaraja		
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.04	Kecamatan Air Periukan		
4.01 . 4.01.04 . 01	Kecamatan Air Periukan		
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Lubuk Sandi		
4.01 . 4.01.06 . 01	Kecamatan Lubuk Sandi		
4.01 . 4.01.06 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Seluma		
4.01 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Seluma		
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.07 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.08	Kecamatan Seluma Barat		
4.01 . 4.01.08 . 01	Kecamatan Seluma Barat		
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.08 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.09	Kecamatan Seluma Utara		
4.01 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Seluma Utara		
4.01 . 4.01.09 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.10	Kecamatan Seluma Selatan		
4.01 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Seluma Selatan		
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.11	Kecamatan Seluma Timur		
4.01 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Seluma Timur		
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.12	Kecamatan Talo		
4.01 . 4.01.12 . 01	Kecamatan Talo		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.13	Kecamatan Ulu Talo		
4.01 . 4.01.13 . 01	Kecamatan Ulu Talo		
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.14	Kecamatan Ilir Talo		
4.01 . 4.01.14 . 01	Kecamatan Ilir Talo		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.15	Kecamatan Talo Kecil		
4.01 . 4.01.15 . 01	Kecamatan Talo Kecil		
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Semidang Alas		
4.01 . 4.01.16 . 01	Kecamatan Semidang Alas		
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.01 . 4.01.17	Kecamatan Semidang Alas Maras		
4.01 . 4.01.17 . 01	Kecamatan Semidang Alas Maras		
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indikator Penyediaan administrasi kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki indikator Penyediaan sarana dan prasarana ASN, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki indikator Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru memiliki 3 indikator diantaranya Penataan batas desa/kelurahan sebanyak 202 desa/kelurahan, Program

Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan indicator Penataan Perundang-undangan pemerintahan umum sebanyak 3 dokumen.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indicator Penyediaan administrasi kantor, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indicator Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki indicator Pemanfaatan teknologi informasi dalam penataan dokumen hukum dengan mengadakan 2 kegiatan, Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan indicator Nilai evaluasi SAKIP CC sebanyak 60 OPD dan Prosentase SKPD yang memperoleh nilai LAKIP minimal C sebanyak 60 OPD.

Program penataan Kelembagaan dengan indicator prosentase penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Seluma sebanyak 80%, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indicator Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan perkantoran sebanyak 55 OPD.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indicator Penggunaan teknologi informasi penyebaran informasi OPD kepada 55 OPD, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah dengan indicator Pelayanan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait hubungan masyarakat dan protokoler kedinasan sebanyak 2 orang.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan indicator sasaran Prosentase pencapaian komoditi ekspor Kabupaten Seluma sebesar 50%, Program Peningkatan Pengendalian Inflasi dengan indicator sasaran Pencapaian pengendalian inflasi untuk komoditi sebanyak 3 kegiatan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan indicator sasaran Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebanyak 4 kegiatan, Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan indicator sasaran Jumlah Desa tertinggal/sangat tertinggal yang belum memiliki listrik dari jaringan PLN sebanyak 4 desa, Program Koordinasi dan Pembinaan SDA dengan indicator sasaran Pelaksanaan koordinasi dan Pembinaan SDA sebanyak 4 kegiatan, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

dengan indicator sasaran Pencapaian pengembangan bagi kelompok UMKM sebanyak 4 Kegiatan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan indicator sasaran Pencapaian promosi investasi di tingkat provinsi dan nasional sebesar 80%.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indicator Pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 12 bulan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indicator sasaran Perencanaan, Monitoring dan evaluasi TEPPRA dan Pembinaan Jasa Konstruksi selama 12 bulan, Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dengan indicator sasaran Pengendalian pembangunan daerah selama 12 bulan.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indicator Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan, Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan indicator sasaran Pelaksanaan Lelang Barang/Jasa yang Efektif , Efisien dan Akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku selama 12 bulan.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan indicator sasaran Prosentase kesesuaian penetapan perda dengan prolegda sebesar 100% dan Peningkatan kapasitas Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seluma sebanyak 30 orang, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah dengan indicator sasaran Pelayanan pelaksanaan kedinasan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Seluma sebanyak 30 orang.

b. Pengawasan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan sebagai berikut :

Tabel 5.25.
Rincian Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
4.02	Pengawasan		
4.02 . 4.02.01	Inspektorat		
4.02 . 4.02.01 . 01	Inspektorat		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparat	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase tindak lanjut temuan BPK	80%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Prosentase peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa	80%
		Prosentase peningkatan kapasitas aparat pengawasan	80%
4.02 . 4.02.01 . 01 . 13	program peningkatan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Prosentase kasus yang terselesaikan	75%
		Tingkat/Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2 Poin
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2 Poin

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indicator sasaran Penyediaan administrasi kantor, Program peningkatan disiplin aparat memiliki indicator sasaran Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki indicator sasaran Peningkatan kapasitas bagi ASN sebanyak 30 ASN, Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan memiliki indicator Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan, Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH memiliki indicator Prosentase tindaklanjut temuan BPK sebesar 80%, program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan indicator Prosentase peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa Dan Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pengawasan masing – masing sebesar 80%, program peningkatan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan memiliki 3 indikator diantaranya Prosentase kasus yang terselesaikan sebanyak 75%.

c. Perencanaan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan sebagai berikut :

Tabel 5.26.
Rincian Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
4.03	Perencanaan		
4.03 . 2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan		
4.03 . 2.03.01 . 01	Dinas Ketahanan Pangan		
4.03 . 2.03.01 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Pencapaian perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan	5 Kegiatan
4.03 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika		
4.03 . 2.10.01 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika		
4.03 . 2.10.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi	Penyediaan data dan informasi kabupaten	3 Dokumen
4.03 . 4.01.01	Sekretariat Daerah		
4.03 . 4.01.01 . 02	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum		
4.03 . 4.01.01 . 02 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah/kementerian/lembaga	1 instansi
4.03 . 4.01.01 . 02 .	Program perencanaan	Perencanaan	5 kegiatan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
21	pembangunan daerah	pembangunan bidang pemerintahan umum	
4.03 . 4.01.03	Kecamatan Sukaraja		
4.03 . 4.01.03 . 01	Kecamatan Sukaraja		
4.03 . 4.01.03 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	2 kelurahan
4.03 . 4.01.04	Kecamatan Air Periukan		
4.03 . 4.01.04 . 01	Kecamatan Air Periukan		
4.03 . 4.01.04 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	1 kelurahan
4.03 . 4.01.07	Kecamatan Seluma		
4.03 . 4.01.07 . 01	Kecamatan Seluma		
4.03 . 4.01.07 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	7 kelurahan
4.03 . 4.01.09	Kecamatan Seluma Utara		
4.03 . 4.01.09 . 01	Kecamatan Seluma Utara		
4.03 . 4.01.09 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	1 kelurahan
4.03 . 4.01.10	Kecamatan Seluma Selatan		
4.03 . 4.01.10 . 01	Kecamatan Seluma Selatan		
4.03 . 4.01.10 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	3 kelurahan
4.03 . 4.01.11	Kecamatan Seluma Timur		
4.03 . 4.01.11 . 01	Kecamatan Seluma Timur		
4.03 . 4.01.11 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	3 kelurahan
4.03 . 4.01.12	Kecamatan Talo		
4.03 . 4.01.12 . 01	Kecamatan Talo		
4.03 . 4.01.12 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	1 kelurahan
4.03 . 4.01.16	Kecamatan Semidang Alas		
4.03 . 4.01.16 . 01	Kecamatan Semidang Alas		
4.03 . 4.01.16 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	1 kelurahan
4.03 . 4.01.17	Kecamatan Semidang Alas Maras		
4.03 . 4.01.17 . 01	Kecamatan Semidang Alas Maras		
4.03 . 4.01.17 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan kelurahan	1 kelurahan
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4.03 . 4.03.01 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi	Pengembangan database perencanaan	3 Kegiatan
		Pengembangan Database fisik dan prasarana	3 kegiatan
		Pengembangan database ekonomi, sosial dan budaya	3 kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama dengan perguruan tinggi/Kementerian/Lembaga Lainnya	1 instansi
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pengembangan wilayah perkantoran lingkungan pemerintah kabupaten seluma	1 wilayah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Perencanaan pengembangan drainase kabupaten seluma	2 kegiatan
		Perencanaan pengembangan PPLP kabupaten seluma	2 Kegiatan
		Perencanaan pengembangan sanitasi kabupaten seluma	2 kegiatan
		Perencanaan pengembangan air minum kabupaten seluma	2 kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD	80%
4.03 . 4.03.01 . 01 . 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Prosentase kesesuaian perencanaan pembangunan ekonomii	80%

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
		RPJMD dengan RKPD	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia	64 poin
		Kesesuaian perencanaan sosial dan budaya RKPD dengan RPJMD	80%
4.03 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan		
4.03 . 4.07.01 . 01	Badan Penelitian dan Pengembangan		
4.03 . 4.07.01 . 01 . 15	Program pengembangan data/informasi	Prosentase pengembangan data sistem inovasi daerah	80%
4.03 . 4.07.01 . 01 . 16	Program Kerjasama Pembangunan	Kerjasama teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi/kementerian/ lembaga lainnya	1 instansi
4.03 . 4.07.01 . 01 . 24	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Proses Perencanaan sumber daya genetik dalam inovasi daerah	70%
4.04	Keuangan		
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
4.04 . 4.04.01 . 01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Loket pelayanan dan ruang tunggu	1 OPD
		Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Penyediaan perlengkapan dan peralatan ASN	12 bulan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
		Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini atas laporan keuangan WDP	60 OPD
4.04 . 4.04.01 . 02	PPKD		
4.04 . 4.04.01 . 02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan
4.04 . 4.04.01 . 02 .	Program Peningkatan dan	Pencapaian	5 kegiatan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
07	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	pengelolaan keuangan daerah untuk bansos, hibah, dan pos lainnya	

Program perencanaan pada kecamatan indicator sasaran perencanaan pembangunan 20 kelurahan dan program perencanaan pada badan perancangan pembangunan daerah indikator sasaran persentase kesesuaian RPJMD dengan RKPD.

Program Kerjasama Pembangunan dengan indicator sasaran Kerjasama dengan perguruan tinggi/Kementerian/Lembaga Lainnya sebanyak 1 instansi, Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan indicator sasaran Pengembangan wilayah perkantoran lingkungan pemerintah kabupaten seluma sebanyak 1 wilayah, Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar memiliki 4 indicator sasaran diantaranya Perencanaan pengembangan air minum kabupaten seluma sebanyak 2 kegiatan, Program perencanaan pembangunan daerah dengan indicator sasaran Prosentase kesesuaian program RPJMD dan RKPD sebesar 80%, Program perencanaan pembangunan ekonomi dengan indicator sasaran Prosentase kesesuaian perencanaan pembangunan ekonomii RPJMD dengan RKPD sebesar 80%, Program perencanaan sosial dan budaya dengan indicator sasaran Indeks Pembangunan Manusia sebesar 64 point dan Kesesuaian perencanaan sosial dan budaya RKPD dengan RPJMD sebesar 80%.

Program pengembangan data/informasi dengan indicator sasaran Prosentase pengembangan data sistem inovasi daerah sebesar 80%, Program Kerjasama Pembangunan dengan indicator sasaran Kerjasama teknologi tepat guna dengan perguruan tinggi/kementerian/ lembaga lainnya 1 instansi, Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam dengan indicator sasaran Proses Perencanaan sumber daya genetik dalam inovasi daerah sebesar 70%. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indicator sasaran Opini atas laporan keuangan WDP sebanyak 60 OPD.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indicator sasaran Pencapaian pengelolaan keuangan daerah untuk bansos, hibah, dan pos lainnya sebanyak 5 kegiatan

d. Kepegawaian

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang Kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 5.27.
Rincian Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Kepegawaian

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
4.05	Kepegawaian		
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4.05 . 4.05.01 . 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Loket pelayanan dan ruang tunggu	1 OPD
		Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 Bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Prosentase Guru SLTP berpendidikan minimal S1	50%
		Prosentase Capaian standar pelayanan minimal ASN	70%
		Prosentase kesesuaian ASN berdasarkan pendidikan	50%
		Prosentase Pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM	50%
		Prosentase distribusi guru per kecamatan	50%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indikator Penyediaan administrasi kantor, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator Loker pelayanan dan ruang tunggu 1 OPD dan Penyediaan sarana dan prasarana ASN selama 12 bulan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki indikator Peningkatan kapasitas bagi ASN sebanyak 30 orang ASN, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator Pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 12 bulan dan Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan selama 12 bulan, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur memiliki 5 indikator diantaranya Prosentase distribusi guru per kecamatan sebesar 50%.

e. Penelitian dan Pengembangan

Adapun rincian program dan kegiatan pada urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

Tabel 5.28.
Rincian Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM	CAPAIAN PROGRAM	
		Sasaran	Target
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
4.07	Penelitian dan Pengembangan		
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan		
4.07 . 4.07.01 . 01	Badan Penelitian dan Pengembangan		
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan administrasi kantor	12 bulan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan sarana dan prasarana ASN	12 bulan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kapasitas bagi ASN	30 ASN
4.07 . 4.07.01 . 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 bulan
		Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan	12 bulan
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase pembentukan kelembagaan inovasi daerah	60%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran memiliki indicator Penyediaan administrasi kantor selama 12 bulan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur memiliki indicator Penyediaan sarana dan prasarana ASN selama 12 bulan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memiliki indicator Peningkatan kapasitas bagi ASN sebanyak 30 ASN, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan indicator Pelaporan capaian kinerja dan keuangan selama 12 bulan dan Peningkatan dan pengembangan kinerja dan keuangan selama 12 bulan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indicator Prosentase pembentukan kelembagaan inovasi daerah sebesar 60%.

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma tahun 2017 disusun berdasarkan pada berbagai ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010. Tahapan dan sistematika penyajian juga telah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan alur pikir yang melatarbelakangi proses penyusunan RKPD Kabupaten Seluma tahun 2018. Beberapa substansi penting dalam proses penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Proses penyusunan dimulai dengan pengolahan data dan informasi meliputi analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, serta evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Analisis didasarkan pada dokumen RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2016-2021, serta RKPD Kabupaten Seluma tahun 2016 dan 2017.
2. Selanjutnya dirumuskan berbagai permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Seluma yang didasarkan pada hasil analisis, hasil telaah terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu, serta pokok-pokok pikiran DPRD.
3. Berbagai permasalahan pembangunan yang telah dirumuskan menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas beserta pagu indikatifnya.
4. Hasil dari tahapan proses ini adalah berupa rancangan awal RKPD Kabupaten Seluma tahun 2018. Rancangan awal menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja SKPD Kabupaten Seluma tahun 2018.
5. Rancangan awal diverifikasi dengan rancangan awal RKP, RKPD Provinsi Bengkulu, dan rancangan Renja SKPD. Setelah diverifikasi, dilakukan integrasi rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja SKPD. Hasil verifikasi dan integrasi disajikan dalam rancangan RKPD.

6. Rancangan RKPD menjadi materi pembahasan dalam musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD juga dalam upaya sinkronisasi dengan hasil musrenbang RKPD tingkat kecamatan. Selain musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten Seluma, juga dievaluasi hasil musrenbang RKP dan RKPD Provinsi Bengkulu.
7. Rancangan RKPD yang disinkronkan dengan hasil musrenbang disajikan dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir harus mendapat persetujuan dari WaliKabupaten Seluma dan rekomendasi konsultasi dari Pemerintahan Provinsi Bengkulu. Setelahnya, rancangan akhir RKPD ditetapkan melalui Peraturan Bupati Seluma.
8. Rancangan akhir yang telah dilegalkan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018.

RKPD Kabupaten Seluma tahun 2018 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kabupaten Seluma untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kabupaten Seluma yang telah ditetapkan.

Focus pembangunan daerah di Kabupaten Seluma pada tahun 2018 meliputi:

1. Pengembangan sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perikanan;
2. Peningkatan infrastruktur desa/daerah tertinggal dan infrastruktur dasar;
3. Peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan;
4. Percepatan pembangunan desa.